

**PEREDAAN KETEGANGAN DALAM PERSPEKTIF  
KONSTRUKTIVIS: STUDI KASUS KONFLIK KOREA  
UTARA – KOREA SELATAN (2000-2002)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**TAUFIK RESMAILI  
0706187836**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Taufik Resmaili

NPM : 0706187836

Tanda Tangan : 

Tanggal : 24 Juni 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Taufik Resamaili  
NPM : 0706187836  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional, FISIP  
Judul Tesis : Peredaan Ketegangan Dalam Perspektif  
Konstruktivis : Studi Kasus Konflik Korea Utara-  
Korea Selatan (2000-2002)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat

(.....)

Sekretaris Sidang : Dwi Ardhanariswari S.Sos, M.A., M.Phil

(.....)

Pembimbing : Dr. Hariyadi Wirawan

(.....)

Penguji : Dra. Nurani Chandrawati, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. Hariyadi Wirawan, selaku pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc. MS; selaku staf pengajar pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberi banyak masukan dan bantuan informasi serta data akademik dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Dwi Ardhanariswari Sundrijo, S.Sos., MA, M.Phil; selaku staf pengajar mata kuliah dinamika politik internasional dan pembimbing akademik yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi mata kuliah tersebut dengan nilai baik;
- (4) Christian Harijanto, MA; selaku staf pengajar mata kuliah seminar rancangan penelitian atas masukannya yang berharga dalam penyusunan tesis ini, walaupun penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan.
- (5) Para Staf Sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Mba' Unun , Mba' Lina, Mba Iche, dan Pak Udin.
- (6) Pihak Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (7) Orang Tua (Mama Iyos R. dan Papa Chairil S.), adik-adik tercinta serta keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral baik pada masa studi maupun penyelesaian tesis ini; dan
- (8) Para sahabat : Frank Wawolangi, Idil Syawfi, Yugolastarob K, Rangga Aditya E, Denis L.T, Paladin Ansharullah, Rif'at S. Fachir, Lidya Nurjanah,

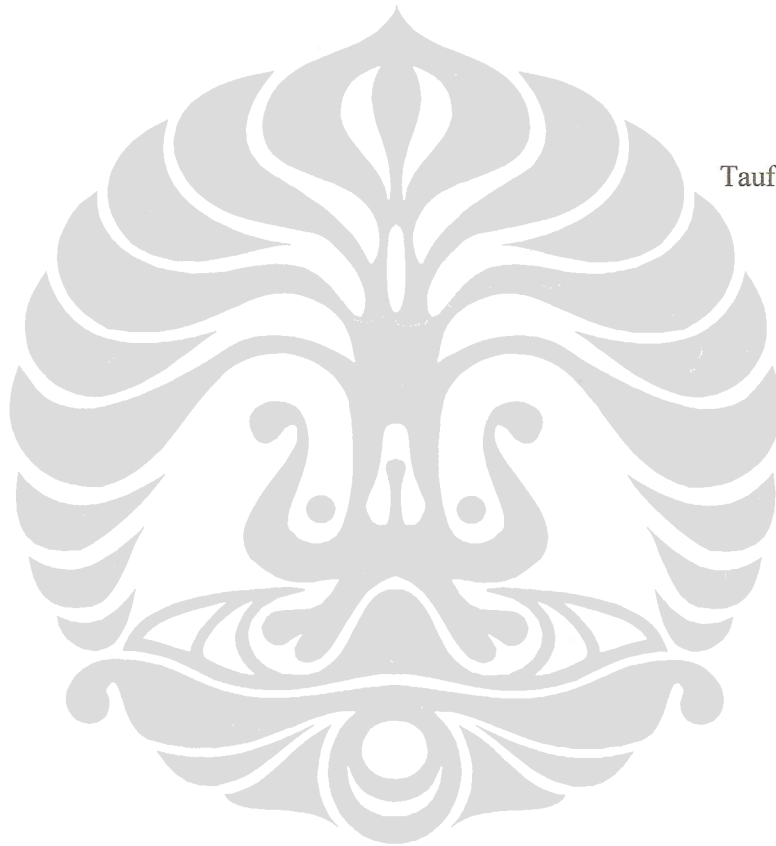
Editha M dan rekan-rekan angkatan XIV S2 HI UI yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 24 Juni 2009



Taufik Resmaili, S.Hum



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Resamaili  
NPM : 0706187836  
Program Studi : Pasca Sarjana  
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Peredaan Ketegangan Dalam Perspektif Konstruktivis : Studi Kasus Konflik  
Korea Utara-Korea Selatan (2000-2002)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juni 2009

Yang menyatakan



(Taufik Resamaili)

## ABSTRAK

Nama : Taufik Resamaili  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Peredaan Ketegangan Dalam Perspektif Konstruktivis : Studi Kasus Konflik Korea Utara-Korea Selatan (2000-2002)

Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses peredaan ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan dalam kurun waktu 2000-2002. Proses peredaan ketegangan terjadi diwarnai oleh berbagai macam aktifitas kedua negara, baik yang bersifat resistensi maupun diplomatis.

Kedua negara dapat dikatakan memiliki niat untuk melakukan rekonsiliasi dan berupaya menciptakan reunifikasi diantara keduanya. Terbukti dengan kemauan dua negara yang telah lama bertikai tersebut untuk memikirkan masa depan mereka melalui berbagai macam pertemuan. Dengan menempatkan pola dari perspektif konstruktivis, penelitian ini berhasil memunculkan *agen, struktur, identity, interest* dan *behavior* sebagai bagian-bagian penting dalam penerapan konstruktivis pada studi kasus konflik antara dua negara saudara yang bertikai dan terpisah oleh tirai ideologi. Pada penelitian ini juga digunakan metode *case study* dengan melihat konflik Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea sebagai obyek penelitian. Selain itu, penggunaan *Historical Perspective-Research* juga digunakan untuk membantu melakukan analisa dan kritik serta menyatukan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan.

Kata kunci: Peredaan Ketegangan, Konstruktivis, Konflik, Korea Utara, Korea Selatan, Reunifikasi.

## ABSTRACT

Name : Taufik Resamaili  
Study Program : International Relations Studies  
Title : De-escalation of Tensions in Constructivist Perspective : The  
Case Study of North Korea and South Korea Conflict (2000-2002).

The aim of this thesis is to find out the de-escalation of tension process that occurred between North and South Korea in the Korean Peninsula during the period of 2000-2002. The process was marked by a variety of activities from the two countries, including resistance and diplomacy.

The two countries can be said to have intention to do the reconcile and towards reunification. This is shown by the two conflicting countries willingness to consider their future through various meetings. By placing the pattern of constructivist perspective, this research successfully brought agency, structure, identity, interest and behaviour as an important parts in the implementation of constructivism on the case study of two sibling states locked in conflict and separated by ideological curtains. This research used case study methods which oversee the phenomena, situation and condition in the Korean Peninsula. This thesis also used a Historical Perspective-Research method to give some analyzed the historical background and the chronology of events in both countries.

Keywords: de-escalation, constructivist, conflict, North Korea, South Korea, reunification.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis .....	vi
Abstrak .....	vii
Abstrac .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Grafik .....	xiii
Daftar Singkatan .....	xiv
Daftar Lampiran .....	xvii

### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

1.1. Perumusan Masalah .....	1
1.1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Permasalahan Penelitian .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4. Kerangka Pemikiran .....	5
1.4.1. Tinjauan Pustaka .....	5
1.4.2. Kerangka Teori .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.5.1. Hipotesa Penelitian .....	12
1.5.2. Sistematika Penulisan .....	12
1.6. Sumber Penulisan .....	13
1.7. Model Analisis .....	15

### **BAB 2**

#### **PERJALANAN KONFLIK KOREA UTARA (DPRK)-KOREA SELATAN (ROK): DARI PERANG KOREA HINGGA DIPLOMASI**

2.1. Sejarah Singkat Perang Korea (25 Juni 1950-27 Juli 1953) .....	16
2.2. Perpecahan di Semenanjung Korea .....	20
2.3. Pasang Surut Hubungan Kedua Korea dalam Dinamika Politik Internasional .....	38
2.4. Intervensi Asing yang Terus Menanamkan Pengaruhnya di- Semenanjung Korea.....	50

### **BAB 3**

#### **SITUASI DAN KONDISI DI SEMENANJUNG KOREA SEBELUM DAN SESUDAH KTT INTER-KOREA**

3.1. Inisiatif Penyelenggaraan KTT Inter-Korea .....	57
3.2. Faktor-Faktor Pendukung Penyelenggaraan KTT Inter-Korea .....	61

3.3. Hasil dari Penyelenggaraan KTT Inter-Korea .....	75
3.4. Perkembangan Hubungan kedua Korea Pasca KTT Inter-Korea .....	90

#### **BAB 4**

#### **PROSES PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN REUNIFIKASI SEPAKBOLA ANTARA KOREA SELATAN DENGAN KOREA UTARA DI SEOUL SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA REUNIFIKASI KEDUA KOREA**

4.1. Kemunculan Ide Menuju Proses Reunifikasi Kedua Korea .....	98
4.2. Inisiatif <i>Union for The Future of Korea</i> Mencari Suatu <i>Milestone</i> dalam Memperbaiki Hubungan Dua Negara .....	100
4.3. Sikap Korea Utara Terhadap Bentuk dan Proses Reunifikasi Kedua Korea .....	102
4.4. Situasi dan Kondisi di Semenanjung Korea Secara Khusus Menjelang Penyelenggaraan Pertandingan Reunifikasi Sepakbola antara Korea Selatan dengan Korea Utara .....	104
4.5. Situasi di dalam Sangam World Cup Stadium Pada Saat Penyelenggaraan Pertandingan Reunifikasi Sepakbola antara Korea Selatan dengan Korea Utara .....	106
4.6. Implementasi Pertemuan KTT Inter-Korea dan Penyelenggaraan Pertandingan Reunifikasi Sepakbola antara Korea Utara dengan Korea Selatan .....	110

#### **BAB 5**

#### **PENUTUP**

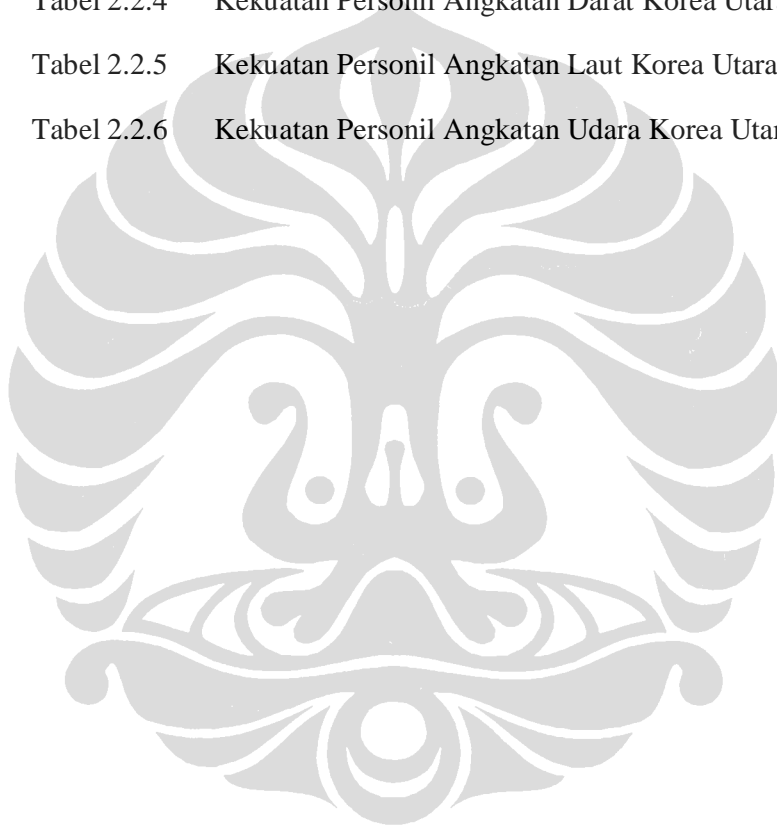
5.1. Kesimpulan .....	118
5.2. Implikasi Kebijakan .....	120
5.3. Implikasi Teoritis .....	121
5.4. Saran .....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	128
-----------------------	-----

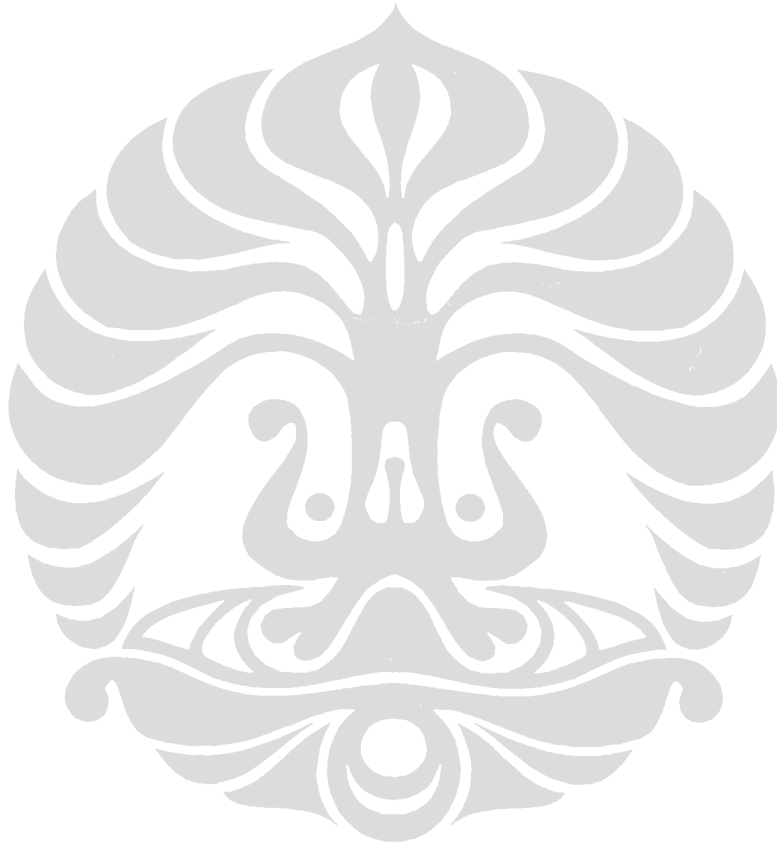
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Kekuatan Personil Angkatan Darat Korea Selatan	28
Tabel 2.2.2	Kekuatan Personil Angkatan Laut Korea Selatan	28
Tabel 2.2.3	Kekuatan Personil Angkatan Udara Korea Selatan	29
Tabel 2.2.4	Kekuatan Personil Angkatan Darat Korea Utara	36
Tabel 2.2.5	Kekuatan Personil Angkatan Laut Korea Utara	36
Tabel 2.2.6	Kekuatan Personil Angkatan Udara Korea Utara	37



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.7.1	Model Analisis	15
Gambar 2.2.1	Organisasi <i>Combined Force Command</i> (CFC) Amerika Serikat-Korea Selatan	32
Gambar 4.6.1	Pola dan Alur Hubungan antara Agen dan Struktur	114
Gambar 4.6.2	Penerapan Teori Konstruktifis	116




## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2.1	Perbandingan Kekuatan Angkatan Darat Korut-Korsel Pada Periode 1983-1984	26
Grafik 2.2.2	Perbandingan Kekuatan Angkatan Laut Korut-Korsel Pada Periode 1983-1984	26
Grafik 2.2.3	Perbandingan Kekuatan Angkatan Udara Korut-Korsel Pada Periode 1983-1984	27
Grafik 2.2.4	Peralatan Tempur Angkatan Darat Korea Selatan	28
Grafik 2.2.5	Peralatan Tempur Angkatan Laut Korea Selatan	29
Grafik 2.2.6	Peralatan Tempur Angkatan Udara Korea Selatan	29
Grafik 2.2.7	Peralatan Tempur Angkatan Darat Korea Utara	36
Grafik 2.2.8	Peralatan Tempur Angkatan Laut Korea Utara	37
Grafik 2.2.9	Peralatan Tempur Angkatan Udara Korea Utara	37
Grafik 2.3.1	Pasang Surut Hubungan Kedua Korea dalam Dinamika Politik Internasional	49
Grafik 3.3.1	Data Tahanan Perang (POW) Korea Selatan yang terdapat di Korea Utara	84
Grafik 3.4.1	Statistik Penduduk Korea Utara yang Melakukan Pelarian Diri ke Wilayah Korea Selatan dan Cina	96

## DAFTAR SINGKATAN

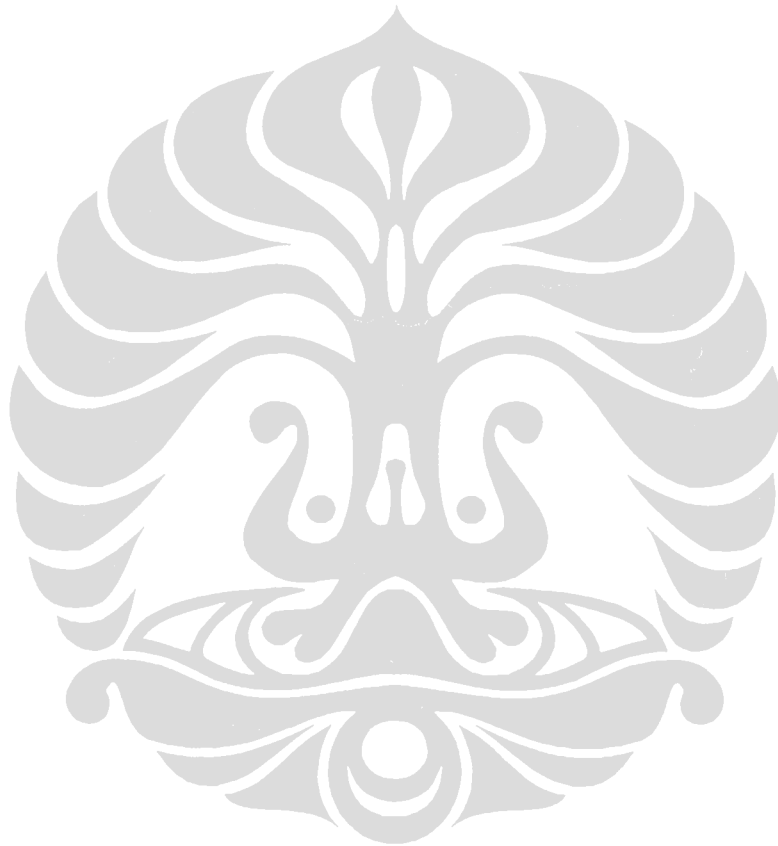


ADD	: <i>Agency for Defense Development</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ALUT	: <i>Alat Utama</i>
DPRK	: <i>Democratic People's Republic of Korea</i>
CBM	: <i>Confidence Building Measures</i>
CFC	: <i>Combined Force Command</i>
DML	: <i>Demarcation Military Line</i>
DPP	: <i>Democratic People's Party</i>
FDL-AP	: <i>Forum of Democratic Leader in the Asia-Pacific Region</i>
FROKA	: <i>First Republic of Korea Army</i>
GNP (1)	: <i>Gross National Product</i>
GNP (2)	: <i>Grand National Party</i>
HEU	: <i>Highly Enriched-Uranium</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>
IGA	: <i>Investment Guarantee Agreement</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
JCS	: <i>Joint Chief of Staff</i>
JOSAs	: <i>Joint Operation Sea Areas</i>
JNCC	: <i>Joint Nuclear Control Commission</i>
KADA	: <i>(South) Korea Air Defense Area</i>
KADIZ	: <i>(South) Korea Air Defense Identification Zone</i>
KAL	: <i>(South) Korean Airlines</i>



KCNA DPRK	: <i>Korean Central News Agency Democratic People's Republic of Korea</i>
KDX	: <i>(South) Korean Destroyer eXperimental</i>
KEDO	: <i>Korean Peninsula Energy Development Organization</i>
KEPCO	: <i>(South) Korea Electric Power Corporation</i>
K-PSAM	: <i>Korea Portable Surface to Air Missile</i>
LWR	: <i>Light Water Reactor</i>
MCRC	: <i>Master Control Reporting Center</i>
MCTR	: <i>Missile Control Technology Regime</i>
MDP	: <i>Millenium Democratic Party</i>
MRL	: <i>Multiple Rocket Launcher</i>
NBL	: <i>Northern Boundary Line</i>
NLL	: <i>Northern Limit Line</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PKO	: <i>Peace Keeping Operation</i>
POW	: <i>Prisoners of War</i>
PPK	: <i>Partai Pekerja Korea (Utara)</i>
RIMPAC	: <i>Rim of The Pacific</i>
ROK	: <i>Republic of Korea</i>
RSOI	: <i>Reception, Staging Onward Movement and Integration</i>
SPA	: <i>Supreme People Assembly</i>
SROKA	: <i>Second Republic of Korea Army</i>
SSU	: <i>Ship Salvage Unit</i>
TRK	: <i>Tentara Rakyat Korea</i>
TROKA	: <i>Third Republic of Korea Army</i>

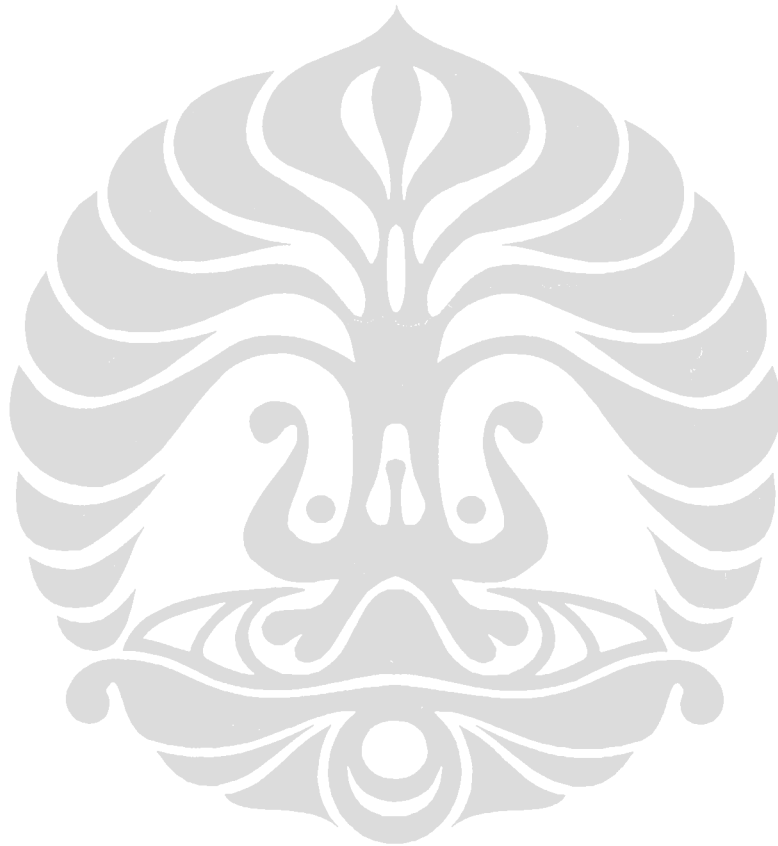
TSR : *Trans-Siberia Railway*  
UFL : *Ulchi Focus Lens*  
ULD : *United Liberal Democrats*  
UNC : *United Nation Command*





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Peta Semenanjung Korea	128
Lampiran B	Peta Alur Serangan Pertama Korea Utara Terhadap Wilayah Korea Selatan	129



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Perumusan Masalah

#### 1.1.1 Latar Belakang Masalah

Perang Korea yang dimulai pada 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953, ketika konflik antara rezim militer Korea Utara dengan Korea Selatan mencuat, membuat semenanjung Korea menjadi medan pertempuran hingga tiga tahun lamanya. Perseteruan ini juga dimotori oleh dua kekuatan dunia yang pada saat itu selalu berada di belakang Negara-negara yang sedang bermasalah, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang tentu saja bertolak belakang secara ideologi. Pertempuran dua negara saudara ini hingga kini tidak pernah terselesaikan. Namun dinamikanya selalu menjadi perhatian dunia, khususnya kawasan Asia Timur.<sup>1</sup> Upaya-upaya dalam meredam permusuhan dua Korea ini selalu tak pernah berhasil untuk diterapkan. Sebelumnya sudah sejak lama kedua negara serumpun di sana terlibat konflik terbuka. Kedua negara tak hanya dipisahkan tembok, tetapi juga tirai tebal ideologi. Utara menganut garis komunis, sementara Selatan menerapkan demokrasi. Walau demikian, sejatinya di antara rakyat di kedua negara tak ada dendam. Mereka terpisah karena politik. Untuk itu, sejak sepuluh tahun terakhir, kedua belah pihak berupaya membuka dialog, walaupun hasilnya masih minim. Sebelum terjadinya pertandingan ini<sup>2</sup>, usaha-usaha menuju perdamaian antara kedua negara telah banyak dilakukan, seperti usaha penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inter-Korea tahun 2000 dan pembentukan *Six Party Talk* tahun 2003. Konferensi Tingkat Tinggi Inter-Korea adalah wadah pertemuan politik pertama antara pemimpin kedua kepala negara sejak perang Korea bergulir pada tahun 1950-1953. Korea Utara diwakili Kim Jong-il dan Korea Selatan diwakili oleh Kim Dae-jung. Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 13 – 15 Juni 2000 ini, usaha mencapai

---

<sup>1</sup> Korea Institute of Military History, *The Korean War*, Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 2000, h. X-XI.

<sup>2</sup> Pertandingan Persahabatan Sepakbola Internasional (*International Friendly Match*) yang tercatat dalam agenda resmi FIFA antara Tim Nasional Korea Selatan (Republic of Korea) vs Tim Nasional Korea Utara (DPRK) di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 7 September 2002.

perdamaian menjadi isu utama pembicaraan.<sup>3</sup> Sedangkan *Six Party Talks*, merupakan suatu wadah untuk menemukan solusi perdamaian dari konflik yang terjadi di semenanjung Korea. Isu utama yang diangkat dari pembicaraan enam negara ini (Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, China, Jepang dan Rusia) adalah mengenai program senjata nuklir Korea Utara.<sup>4</sup> Yang kita ketahui bahwa program ini memang dianggap sebagai penyebab keresahan negara-negara tetangga Korea Utara. Ada dua alasan mengapa Korea Utara berusaha mengembangkan program nuklirnya. Pertama, pembekuan program nuklir yang bersumber pada *plutonium* tahun 1994 tidak membuahkan hasil timbal-balik yang diharapkan. Pyongyang menuduh AS mengingkari *Agreed Framework 1994* yang disepakati dengan menunda pengapalan 500.000 ton minyak ke Korea Utara. AS berdalih, penundaan dilakukan karena Korea Utara terus menjalankan program HEU (*Highly-Enriched Uranium*). Kedua, Korea Utara berambisi menjadi negara nuklir. Dengan memiliki senjata nuklir, negara ini menyandang prestise, mampu *survive* dan punya sarana *blackmail*. Tuduhan "*axis of evil*" makin meyakinkan Korea Utara perlunya kemampuan bela diri. Pyongyang berpendapat, kepemilikan senjata nuklir merupakan hak negara berdaulat "untuk mempertahankan kebebasan bangsa, keamanan negara dan mencegah perang".<sup>5</sup> Oleh karena itu, keanggotaan forum pembicaraan ini ditempati oleh negara-negara tetangga Korea Utara, tak terkecuali sang "Polisi Dunia". Dari semua usaha tersebut, pada kenyataannya proses menuju rekonsiliasi memang terus menjadi proses tarik-ulur. Sebelum dan sesudah momen tersebut, komunikasi antar kedua negara yang lama terlibat dalam konflik, sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Namun ada beberapa hal yang pernah menjadi suatu hal positif dalam mendamaikan dua saudara ini, dan itu terjadi dalam kegiatan yang dapat digolongkan sebagai suatu bentuk *Soft Power*. Kegiatan tersebut adalah suatu Pertandingan Sepakbola, yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah permainan belaka. Namun bagi Korea Utara dan Korea Selatan, pertandingan yang dilaksanakan di ibukota Korea

---

<sup>3</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan : Buku II (Bidang Operasional)*, Seoul: KBRI Seoul, 2000, h. 25-26.

<sup>4</sup> John S. Park, *The Washington Quarterly*; "Inside Multilateralism: The-Six Party Talks", Vol. 28, No. 4, Autumn 2005, h. 1-3.

<sup>5</sup> A. Agus Sriyono. "Korea Utara antara Diplomasi dan Perang" *Kompas*, Senin, 12 Mei 2003. <http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008

Selatan, Seoul pada tanggal 7 September 2002 ini, dapat dikatakan merupakan pertemuan yang menjadi *milestone* bagi hubungan kedua negara. Karena pada saat itu, perwakilan dari "Union for the future of Korea"<sup>6</sup>, Park Geun-hye dan perwakilan kedua Negara yang masing-masing diwakili oleh Ri Kwang-gun yang merupakan ketua umum federasi sepakbola Korea Utara dan Jong Mon-jun yang juga merupakan ketua umum dari federasi sepakbola Korea Selatan mengeluarkan pernyataan yang mencerminkan keinginan untuk bersatu dari kedua belah pihak, pernyataan tersebut berbunyi "Kami adalah satu, terlepas dari siapa pun yang menang" (*We are one regardless which side wins*).<sup>7</sup> Pertemuan pada pertandingan ini merupakan pertemuan yang pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir di atas lapangan sepakbola,<sup>8</sup> dan sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2002, Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-il telah berjanji akan mengirimkan tim nasional sepakbola negaranya ke Korea Selatan untuk melakukan pertandingan persahabatan yang diajukan oleh Korea Selatan dengan diwakili oleh Park Geun-hye pemimpin "Union for the future of Korea" di Korea Selatan, yang juga merupakan anak perempuan dari mantan diktator Korea Selatan, Park Chung-hee. Pada saat itu, Park Geun-hye mengatakan "Thursday I proposed the friendly match during my visit to Pyongyang last week, and Kim agreed".<sup>9</sup>

Keadaan di dalam maupun di luar Sangam *World Cup Stadium* benar-benar mencerminkan keinginan kuat dari masing-masing pendukung, hal tersebut terlihat dari fenomena dikumandangkannya lagu "Arirang" yang merupakan lagu kebangsaan jazirah Korea dan diperlihatkannya bendera-bendera Jazirah Korea yang menjadi simbol bangsa Korea, serta fenomena warna kaos biru langit dengan berlambangkan jazirah korea di dada mereka. Pemandangan ini tak lazim, karena biasanya pendukung Korea Selatan hadir di stadion dengan mengenakan peralatan

<sup>6</sup> Union for the future of Korea adalah suatu organisasi yang mewadahi suatu pergerakan menuju proses reunifikasi Korea.

<sup>7</sup> KCNA correspondent, *Football Match for reunification takes place in Seoul*, Seoul, 7 September 2002. KCNA (Korean Central News Agency) DPRK. <http://www.kcna.co.jp> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

<sup>8</sup> CNN.com Asia, *Koreas Unite for Soccer Match*, September 7, 2002 Posted: 10:34 AM EDT (1434 GMT). <http://www.cnn.com/asia> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

<sup>9</sup> Associated Press (AP), *Kim Jong Il Promises Friendly Inter-Korean Soccer Match*, 17 May 2002. <http://www.ap.org> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

dan pakaian serba merah. Namun kali ini tidak, mereka benar-benar ingin menunjukkan persatuan Korea.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Pokok permasalahan dalam rencana penelitian ini adalah tentang sikap-sikap yang dimunculkan oleh Korea Utara terhadap saudaranya, yaitu Korea Selatan sebelum dan sesudah pertandingan persahabatan, serta latar belakang menuju pertemuan yang mewakili kedua negara tersebut. Untuk membahas permasalahan secara lebih mendalam, akan diajukan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana proses peredaan ketegangan dalam konflik Korea Utara dan Korea Selatan pada rentang waktu 2000- 2002??

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini, adalah :

- **Tujuan Umum.** Untuk mengetahui sampai sejauh apa perubahan sikap yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan, mengingat pasca pertandingan persahabatan sepakbola tanggal 7 September 2002 keadaan di semenanjung Korea mengalami penurunan ketegangan.
- **Tujuan Khusus,** adalah mengetahui usaha perdamaian kedua negara yang selama ini diusahakan oleh kedua negara dan pihak ketiga. Tujuan kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana sepakbola dapat menjadi wadah dan elemen positif dari usaha perdamaian yang dilakukan keduanya.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya penelitian mengenai dinamika hubungan luar negeri antara Korea Utara (DPRK) dan Korea Selatan (ROK). Selain itu, manfaat dari penelitian ini juga adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai teori konstruktivis yang selama ini diketahui oleh dunia internasional untuk memahami pola dan tingkah laku aktor dalam hubungan internasional, pemahaman ini bisa didapat dari pemaparan teori

yang telah dilakukan oleh Stefano Guzzini, Alexander Wendt, Thomas Riise, Friedrich Kratochwil, Nicholas Onuf dan para pakar teori konstruktivis lainnya sebagai studi literatur. Melihat perubahan sikap Korea Utara terhadap Korea Selatan dalam periode dan rentang waktu 2000-2003 merupakan suatu tinjauan pemahaman konstruktivis yang menarik untuk diteliti. Kedua belah pihak (Korea Utara dan Selatan) selaku aktor dalam permasalahan dan dinamikanya yang menarik perhatian dan mencemaskan negara sekitarnya memunculkan cukup banyak pertanyaan yang menarik untuk dieksplorasi, terutama apa yang diangkat dalam tema penelitian ini, khususnya eksplorasi pada tinjauan terhadap perubahan sikap sang Utara terhadap Selatan yang memang pada kenyataannya selalu menjadi kutub yang berseberangan dan bertolak belakang. Bagian menarik lainnya adalah eksplorasi proses reunifikasi kedua Korea yang selalu diusahakan oleh berbagai pihak, mulai dari pertemuan tingkat tinggi hingga pertandingan persahabatan sepakbola yang menjadi perhatian dunia internasional. Keunikan hal terakhir inilah yang membuat penulis memberanikan diri untuk mengajukan proposal penelitian ini, karena hal terakhir tersebut yang sempat membuat ketegangan kedua Korea menjadi benar-benar cair dalam suatu suka cita pelaksanaan pertandingan persahabatan sepakbola.

#### **1.4 Kerangka Pemikiran**

##### **1.4.1 Tinjauan Pustaka**

Konsep utamanya adalah mengenai *security*, *bilateral relation* dan *identity*. Permasalahan dalam penulisan karya akademis ini tidak akan jauh dari konsep-konsep tersebut. Konflik Korea yang menjadi acuan diharapkan proses perdamaianya dapat dieksplorasi melalui pendekatan-pendekatan dalam studi pengkajian strategis dan keamanan, karena pada dasarnya konflik yang berkepanjangan tersebut tidak akan terlepas dari *Arms and Power* yang digunakan oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Studi-studi mengenai hubungan luar negeri Korea Utara dan Korea Selatan dapat dikatakan telah cukup banyak dilakukan, baik yang telah diterbitkan maupun sebagai sebuah karya akademis yang tidak diterbitkan. Namun semua

studi tersebut lebih cenderung mengangkat permasalahan senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara serta dinamika polemik dan persetujuan Korea Utara – Amerika Serikat. Selain itu, studi mengenai semenanjung Korea yang berkaitan dengan usaha perdamaian hanya memfokuskan pada usaha enam negara (AS, Korsel, Jepang, Rusia, China, dan Korea Utara) yang berkaitan dengan konflik Korea (*Six Party Talk*). Studi secara spesifik mengenai usaha perdamaian kedua Korea yang mempunyai perspektif lain dalam ilmu hubungan internasional (seperti; pertandingan sepakbola) sampai sejauh ini masih sangat langka. Studi terakhir yang penulis temukan adalah mengenai terjadinya KTT antar Korea Juni 2000 dari sudut Korea Utara serta dampaknya terhadap proses dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, dalam studi yang penulis temukan ini, hal yang menjadi pertanyaan adalah faktor apa yang mendasari Korea Utara sehingga mau mengadakan KTT tersebut di Pyongyang pada tahun 2000. Selain itu pendekatan yang berbeda yang membuat penulis memberanikan diri untuk membantah studi tersebut. Pendekatan studi tersebut lebih menekankan pada konsep ekopolin, yang menurut penulis kurang tepat, karena dua Korea ini sebenarnya mempunyai kesamaan, karena memang pada awalnya merupakan satu bangsa yang dipisahkan oleh tirai ideologi. Oleh karena itu, pendekatan pada pengkajian strategis dan keamananlah yang dirasakan penulis tepat berdasarkan analisa dan pengangkatan terhadap faktor-faktor yang dimunculkan oleh teori konstruktivis. Studi yang penulis lakukan adalah bagaimana proses peredaan ketegangan dalam konflik Korea Utara – Korea Selatan dalam kurun waktu tahun 2000-2002, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penulis melakukan penekanan pada perspektif teori konstruktivis, penekanan ini akan terlihat pada bab IV, yang dimana penulis akan menjelaskan secara deskriptif analisis dan faktor-faktor penentu kemunculan teori konstruktivis yang berdampak pada kemunculan situasi keamanan di kawasan semenanjung Korea. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan penulis dalam membangun analisa dan mengembangkan penelitian terbantu oleh pemberitaan media yang berdasarkan pada fakta dan kronologis kejadian dan waktu yang sesuai dengan terjadinya peristiwa tersebut.

### 1.4.2 Kerangka Teori

Kerangka teori yang hendak diangkat adalah teori Konstruktivis. Konstruktivis dianggap berkaitan dengan penulisan tema ini, karena konstruktivis menjelaskan bagaimana pola dan tingkah laku seorang aktor dalam hubungan dunia internasional.

Sebagai sebuah pendekatan teori, konstruktivis memfokuskan kepada kesadaran manusia dan tempatnya dalam hubungan internasional. Menurut Stefano Guzzini, dalam Konstruktivis, struktur dan agen akan saling mempengaruhi. Agen menciptakan struktur dan struktur menciptakan penafsiran individu terhadap kenyataan sosial.<sup>10</sup> Tidak seperti pendekatan realis yang memfokuskan diri kepada hal-hal material, dimana distribusi kekuatan material seperti kekuatan militer maupun ekonomi membentuk *balance of power* diantara negara dan menjelaskan perilaku dari negara. Penjelasan lainnya konstruktivisme lebih mementingkan faktor immaterial daripada material. Secara ontologis, konstruktivisme menjelaskan bahwa struktur hubungan internasional adalah konstruksi sosial yang tidak ditentukan oleh aspek material, melainkan oleh penafsiran. Penafsiran atau ide melahirkan proses pemberian makna terhadap interaksi para aktor dalam lingkup waktu dan situasi tertentu, yang akhirnya membentuk *interest* dan identitas aktor.<sup>11</sup> Konstruktivis sendiri berargumen bahwa aspek paling penting dari hubungan internasional adalah konstruksi sosial, yang melihat bahwa sistem internasional sebenarnya tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan kesadaran intersubjektif diantara manusia, dimana sistem internasional dibentuk oleh ide yang bersifat intersubjektif, bukan sekedar kekuatan material.<sup>12</sup> Hal tersebut diperkuat dengan dua prinsip utama dari konstruktivis. Yang menurut Alexander Wendt adalah pertama, struktur dari asosiasi manusia ditentukan oleh *shared ideas* diantara para aktor dan bukan oleh sekedar kekuatan material, dan kedua bahwa identitas dan kepentingan dari aktor

<sup>10</sup> Stefano Guzzini, "Constructivism and the role of Institution in International Relations", *The Commissioned Paper for a Special Issue of the Rassegna Italiana di Sociologia*, Copenhagen, Ed. Marco Clementi, 2003, h. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>12</sup> Roberts Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations: 3rd edition*, New York: Oxford University Press, 2006, h.162.



yang memiliki tujuan dibangun oleh ide-ide tersebut bukan tercipta dengan sendirinya.<sup>13</sup> Dalam artikelnya yang berjudul *Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics*, Wendt menyatakan bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarki, dimana tidak terdapat otoritas politik diatas negara, perilaku aktor terhadap objek termasuk aktor lain, didasarkan kepada pemahaman aktor terhadap objek. Sebuah negara akan berperilaku berbeda terhadap musuhnya dibandingkan terhadap temannya, karena musuh akan dipahami oleh sebuah negara bersifat mengancam sedangkan teman tidak. Konsepsi pemahaman ini bergantung kepada pemahaman intersubjektif dalam “distribusi pengetahuan”.<sup>14</sup> Dan pemahaman aktor dalam pengertian aksi yang diambilnya dibentuk melalui proses interaksi, yang kemudian membentuk identitasnya.<sup>15</sup> Konstruktivis berpandangan bahwa identitas merupakan dasar bagi sebuah kepentingan. Dimana kondisi non-material membentuk identitas aktor, identitas tersebut kemudian membentuk kepentingan aktor, dan pada tahap berikutnya mempengaruhi perilaku dari aktor.<sup>16</sup> Aktor akan mendefinisikan kepentingannya dalam proses memahami situasi.<sup>17</sup> Norma dan ide diasumsikan memiliki efek konstitutif dalam pembentukan identitas aktor.<sup>18</sup> Identitas dikatakan memiliki tiga fungsi. Pertama, untuk memberitahu aktor dan aktor lain mengenai siapa saya dan siapa aktor lain. Kedua, dalam memberitahu siapa diri saya, identitas menyatakan seperangkat kepentingan atau preferensi dengan melihat pilihan-pilihan aksi dalam daerah tertentu, dan dengan melihat aktor lain. Dan ketiga, identitas dari sebuah negara menyatakan preferensi dan tindakan dari

<sup>13</sup> Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, New York: Cambridge University Press, 1999, h. 1.

<sup>14</sup> Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics.” dalam Friedrich Kratochwil dan Edward D. Mansfield (eds) *International Organization: A Reader*, New York : Harper Collins College Publishers, 1994, h. 80.

<sup>15</sup> Cynthia Weber, *International Relations Theory : A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2001, h. 65.

<sup>16</sup> Christian Reus-Smit, “Constructivism.” dalam Scott Burchill, Richard Devetak, Andrew Linklater et.al (eds), *Theories of International Relations*, New York : Palgrave, h. 21.

<sup>17</sup> Wendt, *Social Theory of International Politics*, 1999, *op.cit.*, hal. 80.

<sup>18</sup> Hands Peter Schmitz dan Kathryn Sikkink, “International Human Rights.” dalam Walter Carlnaes, Thomas Risse, dan Beth Simmons (eds), *Handbook of International Relations*, London: Sage Publications, 2002, h.521.

aktor.<sup>19</sup> Identitas dan kepentingan ini menurut Wendt dibentuk melalui praktek interaksi keseharian aktor.<sup>20</sup> Dimana identitas tersebut dibentuk oleh struktur yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal.<sup>21</sup> Secara eksternal, identitas dibentuk melalui interaksi dengan aktor lain dalam lingkungan internasional. Dimana, struktur *ideational* dan normatif internasional dipandang dapat membentuk identitas, kepentingan dan perilaku aktor sosial.<sup>22</sup> Lingkungan sosial dimana kita menemukan diri kita membentuk identitas kita sebagai makhluk sosial, dan pada saat yang sama agensi manusia menciptakan, mereproduksi, dan merubah kultur melalui praktek keseharian.<sup>23</sup> Identitas dan kepentingan dipelajari dan ditopang melalui praktek yang didasari intersubjektivitas, dimana negara berfikir dan bekerja merupakan apa yang diperbuat negara terhadap anarki.<sup>24</sup> Sehingga, negara memahami aktor lain melalui identitas yang dimilikinya, dan pada saat lain secara simultan mereproduksi identitas dirinya sendiri melalui praktek kesehariannya.<sup>25</sup> Selain dibentuk oleh proses sosial antar negara di dalam lingkungan internasional. Identitas negara diproduksi melalui interaksi diantara masyarakat domestiknya. Dimana pertanyaan mengenai siapa kawan dan siapa lawan dibentuk dari masyarakat domestik.<sup>26</sup> Dimana tanpa masyarakat domestik tidak akan ada kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>27</sup> Identitas domestik membentuk identitas, kepentingan dan aksi sebuah negara dalam politik luar negerinya.<sup>28</sup> Identitas domestik dapat menjadi determinan kunci dalam menjelaskan bagaimana negara memandang situasi internasional dan dalam

<sup>19</sup> Ted Hopf, "The Promise of Constructivism in International Relations Theory." dalam *International Relations: Critical Concept in Political Science*. London: Routledge, 2000, h. 1759.

<sup>20</sup> Wendt, "Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics." dalam Friedrich Kratochwil dan Edward D. Mansfield (eds) *International Organization : A Reader, op.cit.*, h.78.

<sup>21</sup> Wendt, *Social Theory of International Politics*, 1999, *op.cit.*, h. 224.

<sup>22</sup> Christian Reus-Smith, *op.cit.*, h. 216.

<sup>23</sup> Thomas Risse, "Social Constructivism Meets Globalization", in: David Held/Anthony McGrew (eds.), *Understanding Globalization: Theories and Controversie*, Cambridge: Polity Press, 2005, h 125.

<sup>24</sup> Maja Zehfuss, "Constructivism in International Relations: Wendt, Onuf, and Kratochwil." dalam Karin M. Fierke dan Knud Erik Jorgensen (eds), *Constructing International Relations: the Next Generation*. New York: M.E. Sharpe, 2001, h. 55.

<sup>25</sup> Ted Hopf, *op.cit.*, h.1759.

<sup>26</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *op.cit.*, h. 172.

<sup>27</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, New York: Palgrave Macmillan, 2003, h. 37.

<sup>28</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *op.cit.*, h. 172.

mendefinisikan kepentingan nasionalnya.<sup>29</sup> Identitas domestik merupakan dasar struktur kognitif sosial yang membuat ancaman, kesempatan, musuh dan sekutu dapat dimengerti. Dan identitas domestik ini kemudian diekspresikan melalui para pembuat kebijakan di dalam negara.<sup>30</sup> Dalam melihat kebijakan yang diambil negara, Konstruktivis mencoba untuk membangun hubungan diantara *agent* dan *structure*, *agent* merupakan entitas yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan aksi dalam setiap konteks. Sedangkan *structure* adalah seperangkat faktor yang menciptakan lingkungan dimana *agen* beroperasi, dan dapat membentuk pilihan-pilihan.<sup>31</sup> Konstruktivis melihat bahwa *agent* dan *structure* bersifat mutual konstitutif, dimana perilaku *agent* dapat membentuk *structure*, serta *structure* dapat mempengaruhi perilaku dari *agent*, dimana kebijakan luar negeri dapat dipahami baik secara umum dan khusus terhadap konteks.<sup>32</sup>

Identitas yang dimiliki sebuah negara yang dibentuk melalui proses sosial baik dalam tingkatan lingkungan internasional dan politik domestiknya, kemudian dapat mempengaruhi bentuk hubungan negara tersebut dengan negara lain. Wendt menyatakan bahwa dalam struktur internasional yang bersifat anarki, dimana tidak terdapat otoritas di atas negara, hubungan antar negara dapat mengambil tiga bentuk, yaitu melihat negara lain sebagai musuh (*hobbesian*), melihat negara lain sebagai rival (*lockean*), dan melihat negara lain sebagai teman (*kantian*).<sup>33</sup> Dalam tema ini konstruktivis coba menjelaskan perubahan pola berpikir dan tingkah laku Korea Utara terhadap Korea Selatan dalam konflik yang terjadi diantara keduanya, dan dalam tema ini pula penggunaan variabel kasus pertandingan reunifikasi sepakbola sebagai faktor kemunculan identitas yang berkesinambungan dengan teori konstruktivis, seperti yang dijelaskan oleh Stefano Guzzini, bahwa peran sentral identitas dalam konstruktivis juga mencontohkan perbedaan krusial pada level teori sosial, termasuk didalamnya elemen perubahan dan dinamisme.<sup>34</sup> Semua yang dikemukakan oleh para pakar

<sup>29</sup> Wendt, *Social Theory of International Politics*, *op.cit.*, h. 141.

<sup>30</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *op.cit.*, h. 172.

<sup>31</sup> Christopher Hill, *op.cit.*, h. 26-27.

<sup>32</sup> Wendt, *Social Theory of International Politic*, *op.cit.*, h. 171.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 257.

<sup>34</sup> Stefano Guzzini, *op.cit.*, h. 10.

konstruktivis diatas merupakan studi literatur yang dielaborasikan ke dalam studi kasus ini dengan mengusung konstruktivis sebagai dasar teori.

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode untuk melakukan penelitian. Metode ini menekan pada penelitian sumber tertulis atau studi literatur.<sup>35</sup> Tahapan yang harus dilakukan adalah tahap pencarian, penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan ilmu hubungan internasional dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Pencarian sumber-sumber penulisan (dapat) dilakukan melalui studi kepustakaan. Pada tahap ini, berhasil dikumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang ditemukan berupa buku-buku, media cetak dan pemberitaan fakta dalam koran, data *Military Balance* yang dirilis oleh *The International Institute for Strategic Studies*, dan laporan operasional tahunan KBRI di Seoul yang dibukukan. Sedangkan sumber sekunder yang ditemukan adalah berupa artikel, buku. Baik sumber primer maupun sekunder yang berhasil penulis kumpulkan sangat berguna untuk menunjang penulisan proposal ini sebagai sebuah penelitian awal. Pada tahap pengumpulan sumber-sumber penelitian yang relevan ini terdapat kendala yang dihadapi penulis. Kendala yang dihadapi dari pengumpulan sumber-sumber penelitian ini adalah terbatasnya waktu.<sup>36</sup> Namun sejauh ini sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dari Perpustakaan Sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Perpustakaan FISIP UI (Miriam Budiardjo Research Center), Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Departemen Luar Negeri RI, Arsip dari Kantor Kedutaan Besar Korea Selatan, Perpustakaan Freedom Institute, CSIS, Arsip Jurnal dan Buku di Website, seperti JSTOR, *Gigapedia*, *Proquest*, *E-Journal* dan penggunaan beberapa buku koleksi pribadi.

---

<sup>35</sup> Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd. Ed. Boston: Allyn and Bacon, 1997, h. 70.

<sup>36</sup> John A. Creswell (terjemahan oleh Aris Budiman), *Research Design: Qualitative and Quantitative Approachs*, Jakarta: Klik Press, 2002. h. 57.

Tahap kedua dari metode penelitian yang digunakan dan harus dilakukan adalah dengan menggunakan metode *Case Study* yang tentunya melakukan tahapan Kritik. Selain itu penulis juga menerapkan *Historical Perspective Research* dalam melakukan penelitian ini. Pada tahap ini penulis berusaha menguji data-data yang berhasil ditemukan baik dari sumber primer maupun sekunder tersebut antara lain adalah membandingkan data yang sama yang terdapat pada sumber primer dengan data yang terdapat di sumber sekunder. Dari proses kritik ini diharapkan dapat dikumpulkan fakta-fakta yang akurat sebagai bahan penulisan.

### **1.5.1 Hipotesa Penelitian**

Hipotesa dalam penelitian ini adalah :

Ketegangan keduanya yang telah berlangsung sejak 25 Juni 1950, cukup menurun drastis pada kurun waktu 2000-2002 yang disebabkan oleh pelaksanaan KTT-Inter Korea dan implementasi hasilnya serta pelaksanaan pertandingan persahabatan sepakbola tanggal 7 September 2002.

### **1.5.2 Sistematika Penulisan**

Penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari :

Bab 1 : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas. Didalamnya terdapat perumusan masalah yang mempunyai sub-sub-bab latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang mempunyai sub-sub-bab kerangka teori dan kajian pustaka, metode penelitian yang mempunyai sub-sub-bab hipotesa dan sistematika penulisan, serta sub-bab terakhir dari bab I adalah sumber penulisan.

Bab 2 : Perjalanan Konflik Korea Utara (DPRK) – Korea Selatan (ROK): dari Perang Korea hingga Diplomasi. Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai sejarah panjang konflik Korea Utara dan Korea Selatan, dan pasang surutnya yang

berkepanjangan dalam dinamika politik internasional serta munculnya berbagai macam intervensi asing dalam hubungan keduanya.

Bab 3 : Situasi dan kondisi di Semenanjung Korea sebelum dan sesudah KTT-Inter-Korea. Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendukung untuk dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi Inter-Korea, baik secara umum maupun secara khusus. Serta penjelasan mengenai keadaan di semenanjung Korea pasca dilaksanakannya konferensi regional tersebut dan penjelasan mengenai penerapan dari hasil konferensi tersebut.

Bab 4 : Proses penyelenggaraan pertandingan reunifikasi sepakbola antara Korea Selatan dengan Korea Utara di Seoul sebagai bagian dari rencana reunifikasi kedua Korea. Bab ini berisi tentang penjelasan penuh mengenai keadaan pertandingan persahabatan sepakbola antara kedua Korea tersebut dan analisa perubahan sikap Korea Utara yang didasarkan pada keputusan pemimpin besar Korea Utara, Kim Jong-Il serta mengambil bentuk analisa dari *Individual State Analysis*.

Bab 5 : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini

### **1.6 Sumber Penulisan**

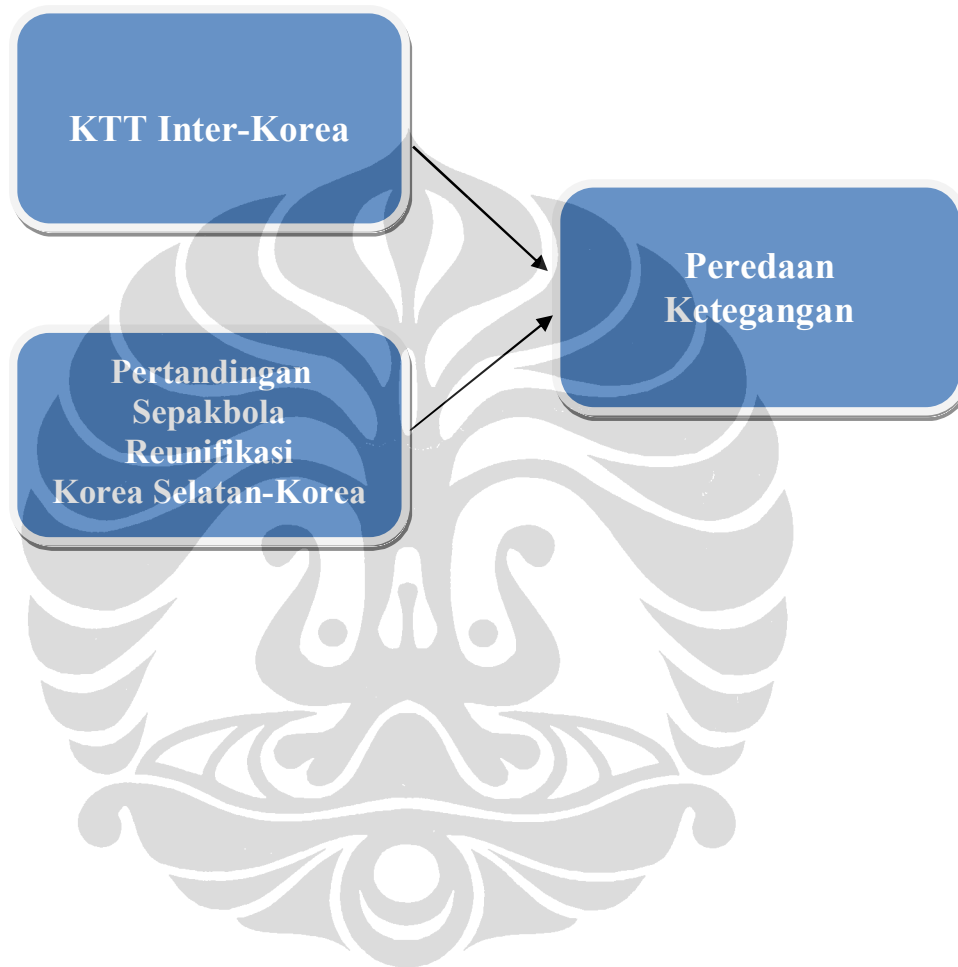
Dalam penelitian ini digunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber yang ditemukan sejauh ini berupa : Sumber Artikel, Koran dan pemberitaan berbahasa Inggris, seperti *Associated Press (AP)*, *Kim Jong Il Promises Friendly Inter-Korean Soccer Match, 17 May 2002* , Caroline Gluck, BBC Seoul correspondent in BBC News world edition (Asia-Pacific news world page), *High Emotions in Korea Football Stand*, Saturday, 7 September 2002, 21:18 GMT 22:18 UK. CNN.com Asia, *Koreas Unite for Soccer Match*, September 7, 2002 Posted : 10:34 AM EDT (1434 GMT), KCNA DPRK correspondent, *Football Match for reunification takes place in Seoul*, Seoul, 7 September 2002. KCNA (Korean Central News Agency) DPRK. Korea Times, *DPRK Airs World Cup Matches*, 3 June 2002. Alexander Wendt, 'Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics, dalam

Friedrich Kratochwil dan Edward D. Mansfield (eds), 1994, *International Organization: A Reader*, New York: Harper Collins College Publishers. Hans Peter Schmitz dan Kathryn Sikkink, 'International Human Rights', dalam Walter Carls, Thomas Risse, dan Beth Simmons (eds), 2002, *Handbook of International Relations*, London: Sage Publications. John S. Park, 'The Washington Quarterly ; "Inside Multilateralism : The Six-Party Talks"', Vol. 28, No. 4, Autumn 2005. Bob Sugeng Hadiwinata, 'Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme Hingga Konstruktivisme', dalam Yulius P. Hermawan (ed), 2007, *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, Parahyangan Catholic University Press-Graha Ilmu. Christian Reus-Smit, 'Constructivism', dalam Scott Burchill, Richard Devetak, Andrew Linklater, et.al (eds), *Theories of International Relations*, New York: Palgrave. Maja Zehfuss, 'Constructivism in International Relations: Wendt, Onuf, and Kratochwil', dalam Karin M. Fierke dan Knud Erik Jorgensen (eds), 2001, *Constructing International Relations: the Next Generation*, New York: M.E. Sharpe. Ted Hopf, 'The Promise of Constructivism in International Relations Theory', dalam Andrew Linklater (ed), *International Relations: Critical Concept in Political Science*, 2000, London: Routledge. Sumber buku yang digunakan, seperti buku yang ditulis oleh Korea Institute of Military History, *The Korean War*, Lincoln : University of Nebraska Press, 2000. Alexander Wendt, 1999, *Social Theory of International Politics*, New York: Cambridge University Press. Christopher Hill, 2003, *The Changing Politics of Foreign Policy*, New York: Palgrave Macmillan. Cynthia Weber, 2001, *International Relations Theory : A Critical Introduction*, New York : Routledge. Robert Jackson dan George Sorensen, 2006, *Introduction to International Relations: 3rd edition*, New York: Oxford University Press. Thomas Risse, *Social Constructivism Meets Globalization*. Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd Ed. Boston : Allyn and Bacon. John A. Creswell (terjemahan oleh Aris Budiman), *Research Design : Qualitative and Quantitative Approachs*, Jakarta : Klik Press, 2002. William Stueck, *The Korean War : an International History*, New Jersey : Princeton University Press, 1999. Buku-buku ini menjelaskan tentang metode penelitian, kerangka teori yang

digunakan serta upaya perdamaian di Korea dan sejarah yang menggambarkan tentang situasi pada masa perang Korea di wilayah semenanjung Korea.

### 1.7 Model Analisis

**Gambar 1.7.1**





## BAB 2

### PERJALANAN KONFLIK KOREA UTARA (DPRK) – KOREA SELATAN (REPUBLIC OF KOREA): DARI PERANG KOREA HINGGA DIPLOMASI

#### 2.1 Sejarah Singkat Perang Korea (25 Juni 1950 – 27 Juli 1953)

Perang Korea dimulai pada tanggal 25 Juni 1950 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 1953. Perang ini diawali ketika tentara Korea Utara secara mengejutkan melakukan serangan pada hari minggu, tanggal 25 Juni 1950 waktu Korea. Permasalahan utama perang dua negara saudara tersebut adalah tidak adanya titik temu antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat mengenai masa depan semenanjung Korea. Dua kekuatan tersebut memainkan peranannya masing-masing sebagai pemenang perang dunia II di semenanjung Korea yang memang sebelumnya diduduki oleh fasisme Jepang. Wilayah semenanjung Korea yang mempunyai peradabannya sendiri dibawah kekuasaan Dinasti Korea, tepatnya dinasti *Joseon* (1392-1910) yang tunduk dibawah kekuasaan dinasti *Qing* dari Cina.<sup>35</sup>

Pada awalnya wilayah semenanjung Korea inipun telah diduduki oleh Jepang pada awal tahun 1900-an. Jepang berhasil menduduki wilayah semenanjung Korea setelah mengalahkan Rusia dalam *Russo-Japanese War* (Februari 1904-September 1905)<sup>36</sup> dan Jepang membuat kesepakatan di *Eulsa Treaty* pada tanggal 17 November 1905 dengan Korea, serta menjadikan wilayah semenanjung Korea sebagai wilayah protektorat Jepang. Perjanjian ini memperkuat kedudukan Jepang di wilayah semenanjung Korea. Jepang terus menduduki Korea dalam upayanya memperluas kekuasaan fasisme-nya di perang Asia Timur Raya (*Dai Toa No Senso*) yang sebelumnya Korea berhasil memproklamkan kemerdekaannya dari pendudukan Jepang di tahap I

---

<sup>35</sup> Samuel Hawley, *The Imjin War: Japan's Sixteenth Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China*, Seoul: The Royal Asiatic Society, 2005, h. 195.

<sup>36</sup> The Russo-Japanese War Research Society, *op.cit.*

pada tanggal 1 Maret 1919<sup>37</sup> melalui gerakan kemerdekaan rakyat Korea bersatu. Korea di periode tersebut telah memiliki kesadaran nasionalisme untuk mengusir penjajah Jepang yang telah melakukan okupasi di wilayah semenanjung Korea selama sepuluh tahun. Meskipun gerakan nasionalis tersebut dapat dipatahkan oleh Jepang dan gagal menjadi gerakan kemerdekaan, namun tanggal tersebut tetap diperingati sebagai titik tolak kesadaran nasionalisme Korea oleh bangsa Korea sendiri. Para pejuang Korea tersebut terus berusaha mendirikan pemerintah provisional Korea yang dibentuk untuk melakukan tindakan reaksioner terhadap Jepang.<sup>38</sup>

Pemerintah provisional Korea dibentuk oleh para pemimpin nasional Korea seperti Syngman Ree, Yi Tong-hwi, An Ch'ang-ho dan Kim Ku. Para pemimpin tersebut membawa isu kemerdekaan Korea ke wilayah Cina, dan mendeklarasikan pembentukan pemerintahan tersebut di Shanghai pada bulan April 1919. Pada tahun 1922, semua kelompok dari berbagai aliran yang melakukan tindakan resistensi terhadap Jepang bersatu dibawah kepemimpinan pemerintah provisional Korea, yang dimana Syngman Ree menjadi presidennya dan Yi Tong-hwi yang berpaham komunis diangkat menjadi perdana menterinya. Kelak, Yi membantu Uni Soviet melakukan operasi revolusioner di Manchuria dan Kim Ku mendekati pemimpin sayap kanan nasionalis Cina, yaitu Chiang Kai-sek. Hingga perang dunia II berakhir dan membuat wilayah semenanjung Korea terbebas dari belenggu pendudukan Jepang, para pemimpin pemerintah provisional Korea dan beserta para anggotanya kembali ke semenanjung Korea. Semenjak kekalahan Jepang di perang dunia II tersebut, wilayah-wilayah bekas pendudukan Jepang mengalami *Vacuum of Power*, tidak terkecuali wilayah yang dinamakan semenanjung Korea. Kelompok-kelompok yang melakukan tindakan resistensi terhadap pendudukan Jepang kembali mengambil alih wilayah-wilayah yang selama ini menjadi asal pengaruh mereka. Seperti kelompok yang beraliran komunis kembali menduduki wilayah utara begitupula dengan pemerintahan

---

<sup>37</sup> William Stueck, *The Korean War: an International History*, New Jersey: Princeton University Press, 1999, h. 14-15. Lihat juga Asian Info.org March 1<sup>st</sup> Independence Struggle, [http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/history/march\\_1st\\_independence\\_struggle.htm](http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/history/march_1st_independence_struggle.htm) diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

<sup>38</sup> William Stueck, *Ibid.*, h. 14-15.

provisional Korea pimpinan Syngman Ree yang menduduki wilayah selatan semenanjung Korea.<sup>39</sup> Cita-cita reunifikasi sebenarnya telah tercipta ketika berbagai kekuatan dari berbagai aliran di dalam bangsa Korea memproklamkan pemerintah provisional Korea dan bersama-sama berupaya mengusir Jepang dari wilayah semenanjung Korea, namun semua hal tersebut sirna ketika para kekuatan asing pemenang perang dunia II melakukan intervensi dan membagi jatah wilayah kemenangan perang dunia II, termasuk wilayah semenanjung Korea, yang dimana Uni Soviet mempengaruhi wilayah utara dan Amerika Serikat mempengaruhi wilayah selatan semenanjung Korea dengan pemahaman dan ideologinya masing-masing. Uni Soviet dan Amerika Serikat berusaha membentuk pemerintahan administrasi masing-masing wilayah yang akhirnya tercipta dengan *Democratic People of Republic Korea* yang dikenal dengan Korea Utara dan *Republic of Korea* yang dikenal dengan sebutan Korea Selatan. Pemisahan kekuasaan pemerintah administrasi ini sendiri diketahui dan dibawah arahan PBB, hal ini dilakukan karena tidak adanya titik temu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan amanat PBB (penyatuan) terhadap wilayah Korea.<sup>40</sup>

Pertempuran pertama kali berlangsung ketika Korea Utara untuk pertama kalinya melakukan serangan ke wilayah Korea Selatan. Dalam serangan tersebut sangat terlihat keunggulan Korea Utara dalam berbagai lini bila dibandingkan dengan Korea Selatan. Korea Utara yang memang didukung sepenuhnya oleh pihak Uni Soviet dalam bidang persenjataan melakukan serangan dari darat dan udara. Korea Selatan terlihat tidak dapat menandingi kekuatan Korea Utara tersebut, hal ini dikarenakan pada masa itu, Korea Selatan masih belum mempunyai persenjataan dan kekuatan pertahanan yang cukup untuk menandingi kekuatan Korea Utara. Korea Selatan pada masa itu tidak sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat dalam berbagai hal, termasuk dalam militer dan persenjataan. Hal ini dikarenakan pada masa itu, Amerika Serikat tidak sepenuhnya memberikan perhatian terhadap kawasan semenanjung Korea, terutama Korea Selatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka ketika

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 26-27. Lihat juga Chris Trueman, *The United Nations and the Korean War*, [http://www.historylearningsite.co.uk/united\\_nations\\_korean\\_war.htm](http://www.historylearningsite.co.uk/united_nations_korean_war.htm) diakses pada tanggal 9 Juni 2009. Lihat Lampiran A (Peta Semenanjung Korea).

Amerika Serikat turut menjadi *trigger* pembentukan *Republic of Korea*. Amerika Serikat juga pada masa itu terlihat belum melihat signifikansi pentingnya semenanjung Korea. Sedangkan dari sisi Korea Utara yang terus didorong oleh kekuatan ideologi komunis Uni Soviet ingin sekali melakukan proses penerapan ideologi komunis secara keseluruhan di kawasan semenanjung Korea yang memang diharapkan oleh Uni Soviet dan Cina.<sup>41</sup>

Dalam melakukan serangan balasan, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Harry S. Truman terlihat lambat dalam mengambil keputusan untuk mendukung Korea Selatan di pertempuran semenanjung Korea. Bahkan yang mengambil inisiatif terlebih dahulu dalam membalas serangan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut adalah Jenderal Douglas MacArthur yang bertindak sebagai komandan pertahanan Amerika Serikat yang berkedudukan di Tokyo. Tindakan MacArthur tersebut dilakukan, terutama untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di kawasan semenanjung Korea. Namun tanpa dukungan kekuatan yang memadai dari Washington yang lambat dalam mengambil keputusan, serangan balasan yang diperintahkan MacArthur dari Tokyo tetap tak sanggup menandingi kekuatan Korea Utara yang didukung oleh persenjataan Uni Soviet, dan pada tanggal 27 Juli 1953, pihak Amerika Serikat menyatakan untuk melakukan gencatan senjata mengenai pertempuran selama tiga tahun tersebut dan mengakui keunggulan Korea Utara. Tanggal tersebut hingga kini terus dikenang oleh seluruh warga negara Korea Utara akan kemenangan dalam perjuangannya melawan pasukan Amerika Serikat yang terjadi selama Perang Korea. Persetujuan gencatan senjata antara Korea Utara dengan Amerika Serikat secara penuh mengakhiri Perang Korea yang telah berlangsung sejak tahun 1950.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> William Stueck, *op.cit.*, h. 3-9. Lihat Lampiran B (Peta Alur Serangan Pertama Korea Utara Terhadap Wilayah Korea Selatan Pada Tanggal 25 Juni 1950).

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 11.

## 2.2 Perpecahan di Semenanjung Korea

Semenanjung Korea, semenanjung yang pernah dianggap selalu mengalami kesialan dalam perspektif historisnya. Telah banyak kejadian di beberapa abad dan tahun sebelumnya yang mampu melahirkan Korea seperti di abad saat ini. Korea yang terpecah, Korea yang terbagi dua berdasarkan ideologi. Semenanjung ini telah mengalami empat kali pendudukan yang dilakukan oleh bangsa lain, yaitu Cina, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat; serta pernah juga merasakan sekitar 900 invasi dalam perjalanan sejarah semenanjung ini. Kesialan-kesialan itulah yang telah mereka alami selama hampir ratusan tahun lamanya. Dapat dikatakan, bangsa Korea secara historis merupakan bangsa yang telah diberikan hadiah untuk bertetangga dengan para pemilik kekuatan didunia ini. Namun walau bagaimanapun, dalam perjalanannya Amerika Serikat-lah yang telah membuat semenanjung Korea memiliki banyak dinamika yang dapat dipelajari.<sup>43</sup>

Hubungan pertama Amerika dengan bangsa Korea adalah dengan kerajaan Hermit, dan hubungan pertama tersebut adalah suatu pertemuan yang cukup mengesankan bagi kerajaan Hermit. Hubungan dengan Amerika Serikat pada pertama kali ini dianggap mereka cukup membantu dalam mempertahankan diri dari tetangga-tetangga besarnya. Bahkan raja (Korea) Hermit sangat senang dengan kedatangan Amerika Serikat dan hubungan mereka dengan bangsa tersebut. Tetapi hal tersebut sesungguhnya terlalu prematur untuk dianggap sebagai suatu keberkahan bagi bangsa Korea, karena dalam beberapa tahun selanjutnya, Washington (Amerika Serikat) sesungguhnya akan menjual pertemanan baru mereka dengan bangsa Korea.<sup>44</sup> Seperti halnya dengan bangsa Jepang dan Rusia yang juga memiliki ketertarikan untuk melakukan kontrol terhadap Korea. Akan tetapi, setelah kemenangan Jepang dalam *Russo-Japanese War* di tahun 1904-1905,<sup>45</sup> bangsa (Jepang) ini justru memiliki kemampuan untuk melakukan aneksasi terhadap wilayah bangsa Korea.

---

<sup>43</sup> Roland Bleiker, *Divided Korea: Toward a Culture of Reconciliation*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005, h. 6-9.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 7-8

<sup>45</sup> The Russo-Japanese War Research Society, <http://www.russojapanesewar.com/phila-1.html>

Dalam masa pendudukan tersebut, Jepang berusaha melenyapkan budaya-budaya Korea dan menanamkan pengaruh kebudayaan Jepang. Pengaruh mereka lakukan dengan cara penggunaan nama-nama Jepang di diri individu bangsa Korea serta upaya penghapusan bahasa Korea. Jepang juga menanamkan pengaruh kepercayaan Shinto, serta memberikan pengajaran baru mengenai sejarah bangsa Korea kepada anak-anak kecil bangsa Korea. Jutaan pria dan wanita bangsa Korea benar-benar dibuat untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap mereka, banyak dari mereka juga yang diajak Jepang untuk turut serta membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya (*Dai Toa No Senso*). Bangsa Korea benar-benar dibuat loyal kepada kaisar yang berada di Tokyo.<sup>46</sup>

Namun ketika Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Korea yang sempat mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari pendudukan bangsa asing berdasarkan pada Deklarasi Kairo di tahun 1943 justru pada tahun 1945 kembali mengalami aneksasi dari Uni Soviet yang mempunyai pengaruh Komunis dan Amerika Serikat yang mempunyai pengaruh liberal. Uni Soviet mencoba mempengaruhi bagian utara dan Amerika Serikat menanamkan pengaruh di bagian selatan, dan mulai saat itulah perpecahan di semenanjung Korea terjadi.<sup>47</sup>

Bagi Korea Utara, ideologi komunis adalah sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Bahkan Korea Utara mempunyai penyesuaian tersendiri terhadap ideologi komunis yang berdasarkan ajaran Marxisme dan Leninisme. Ajaran dan ideologi tersebut dinamakan ajaran *Juche*<sup>48</sup> yang diterapkan secara menyeluruh oleh pemimpin besar Korea Utara pada masa itu, yaitu Kim Il-sung melalui Partai

---

diakses pada tanggal 6 Juni 2009.

<sup>46</sup> Gordon G. Chang, *Nuclear Showdown: North Korea Takes on The World*, London: Hutchinson, 2007, h. 4-5.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Juche* adalah ideologi dan pemahaman akan *Self Reliance* yang berdasarkan pada pemahaman akan sosialisme dan ditanamkan oleh mantan Presiden Kim Il-sung kepada seluruh rakyat Korea Utara dan wajib diterapkan pada semua sendi kehidupan. Lihat The Official Webpage of Democratic People's of Republic of Korea, <http://www.korea-dpr.com/koreajuche.htm> diakses pada tanggal 6 Juni 2009.

Pekerja Korea (PPK) yang didirikannya pada tanggal 10 Oktober 1945.<sup>49</sup> Bagi Kim Il-sung, sejak awal periode revolusi dan pemerintahan yang dipimpinnya telah diajarkan bahwa revolusi di bidang ideologi berada di atas segala pekerjaan.<sup>50</sup> Sejak tahun 1992, *Juche* dianggap sebagai ajaran asli Korea yang tidak meniru Marxisme-Leninisme atau ajaran asing lainnya. Ajaran ayah dari Kim Jong-il ini menjadi pegangan wajib bagi setiap pejabat partai, pemerintah, militer dan seluruh rakyat Korea Utara. Bahkan selain di dalam negeri, penguasa Korea Utara juga terus berusaha untuk menanamkan ajaran-ajaran tersebut diluar negeri Korea Utara,<sup>51</sup> dan sejak tanggal 9 September 1997 Korea Utara memberlakukan tahun *Juche* patokan tanggal kelahiran Kim Il-sung yakni 15 April 1912 sebagai tahun kesatu, sedangkan tanggal dan bulan tetap mengikuti sistem penanggalan masehi.<sup>52</sup>

Demikian pula halnya dengan Partai Pekerja Korea yang terbukti berhasil menempatkan ideologi sebagai dasar kekuatannya dalam menggerakkan pembangunan bangsa. Partai Pekerja Korea berhasil melakukan gerakan umum bagi mobilisasi ideologi yang juga menjadi momentum utama dalam mengawali gerakan tersebut sehingga menciptakan kemajuan bagi pembangunan sosialis pasca perang Korea. Di samping itu, Presiden Kim Il-sung telah meletakkan teori mengenai ideologi yang menentang gagasan bahwa gerakan massa merupakan faktor utama dalam revolusi dan pembangunan. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan memegang teguh pada ideologi sebagai salah satu tonggak dalam mendirikan negara yang kuat, maka pada gilirannya negara akan mencapai kejayaannya.<sup>53</sup>

Dengan kebijakan itu maka rakyat Korea Utara hanya diperkenankan mengenal satu kebudayaan yang sejalan dengan ideologi partai dan negara, dan kebudayaan tersebut dianggap oleh Korea Utara sebagai kebudayaan asli (*juche*). Akibatnya adalah pengaruh kebudayaan asing di Korea Utara dapat dikatakan

---

<sup>49</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (operasional)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2000, h. 10.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>51</sup> The Official Webpage of Democratic People's of Republic of Korea, *op.cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000, op.cit.*, h.20.

hampir tidak ada dan bahkan muncul penolakan terhadap kebudayaan asing tersebut. Mengingat bahwa kegiatan sosial dan budaya merupakan salah satu sasaran propaganda dan pelaksana kepentingan negara, maka aktivitas seni, budaya dan olahraga tetap diutamakan dan dikembangkan dengan tetap memperhatikan kualitas disamping kuantitas. Oleh karena itulah maka kegiatan festival seni besar-besaran dalam perayaan *The Sun's Day* dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk upaya propaganda kepentingan nasional baik yang ditujukan sebagai komsumsi ke dalam negeri maupun luar negeri.<sup>54</sup>

Pada periode tahun 1999, salah satu penyebab terjadinya perpecahan adalah adanya masa kejayaan bagi angkatan bersenjata Korea Selatan, karena jika pada masa-masa periode sebelumnya angkatan bersenjata Korea Selatan dapat menangkap 2 kapal selam Korea Utara secara kebetulan, seperti secara kebetulan berhasil menangkap kandasnya kapal selam Korea Utara di pantai Kangneung dan penangkapan kapal selam Korea Utara lainnya karena terjerat jaring kapal ikan nelayan Korea Selatan di sekitar perairan Sokcho. Akan tetapi pada periode milenium baru ini, angkatan bersenjata Korea Selatan yang dalam hal ini merupakan angkatan laut Korea Selatan berhasil menenggelamkan 1 kapal angkatan laut Korea Utara yang telah beberapa kali melanggar *Northern Limit Line* (NLL), dan pada periode secara singkat terjadi peningkatan pada bidang persenjataan angkatan laut Korea Selatan yang mempunyai peralatan lebih modern dengan personil yang lebih tertatih dari periode tahun-tahun sebelumnya.<sup>55</sup>

Walaupun demikian, usaha dalam mengejar peningkatan persenjataan Korea Utara dilakukan oleh Korea Selatan dengan melakukan pengeluaran yang sangat besar dibidang militernya. Meskipun doktrin militer dan struktur kekuatan Korea Utara berorientasi ofensif bila dibandingkan dengan Korea Selatan yang lebih cenderung defensif, namun kehadiran kekuatan militer tersebut melakukan kompensasi dalam munculnya perbedaan tersebut. Berdasarkan perkiraan terakhir *Institute of International and Strategic Studies* di London, Angkatan Darat Korea Utara melebihi 784.500 yang merupakan 3,8% penduduk, sedangkan Korea

---

<sup>54</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2001, h. 10-11.

<sup>55</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, Seoul: KBRI Seoul, h. 31.



Selatan dengan jumlah 622.000 yang merupakan 1,3% dari jumlah penduduknya.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, Korea Utara menempatkan setengah dari pasukan tempurnya di daerah *Demilitarized Zone* (DMZ). Menurut pengakuan Amerika Serikat pada tahun 1983, Korea Utara mengeluarkan 25% GNP-nya untuk keperluan bidang militernya, sedangkan Korea Utara sendiri hanya 6% dari GNP-nya. Dalam tiga tahun terakhir Korea Utara mempercepat program militerisasinya untuk memproduksi tank yang berasal dari Uni Soviet dengan tipe T-26, memperoleh pesawat A-7 produksi Cina serta memproduksi pesawat tiruan bertipe MIG-21. Selain itu Korea Utara juga melakukan peningkatan pada angkatan lautnya dengan menambahkan 500 kapal tempur atau perusak, 21 kapal selam serta menambahkan kapal-kapal yang dilengkapi dengan peluru-peluru jarak jauh. Pada saat itu pasukan Korea Utara mampu melakukan serangan terhadap Korea Selatan, bahkan tanpa bantuan dari Cina dan Uni Soviet sendiri. Sedangkan pada saat itu, Korea Selatan sendiri mengalami penurunan bantuan dari Amerika Serikat. Perangkat defensif Korea Utara sendiri, seperti Tank dan Artileri bahkan dibuat didalam negeri mereka sendiri. Dalam hal ini, pihak Korea Utara dapat dikatakan lebih kuat dari Korea Selatan, mereka (Korea Utara) bahkan melengkapi perangkat defensifnya tersebut dengan kepentingan agar dapat melakukan *Blitzkrieg* terhadap pihak Korea Selatan, dengan tujuan utama mendobrak garda depan wilayah DMZ dan Seoul. Bahkan Amerika Serikat terus memprovokasi keadaan tersebut dengan mengatakan bahwa Korea Utara masih terus meningkatkan jumlah satuan artilerinya dengan peralatan-peralatan yang lebih berat. Menurut pengakuan Amerika Serikat pada saat itu, jumlah kekuatan Korea Utara tersebut merupakan tiga perempat dari jumlah artileri yang dimiliki Amerika Serikat dan ditempatkan diseluruh dunia.<sup>57</sup>

Korea Utara juga mempunyai pasukan komando dengan jumlah sedikitnya 100.000 personil yang dapat dengan cepat dipindahkan menggunakan 100 kapal pendarat berkecepatan tinggi. Korea Utara juga memiliki kapal transportasi militer

---

<sup>56</sup> Robert Scalapino, Seizaburo Sato, Jusuf Wanandi (ed.), *Masalah Keamanan Asia*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1990, h. 171.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 171-172.

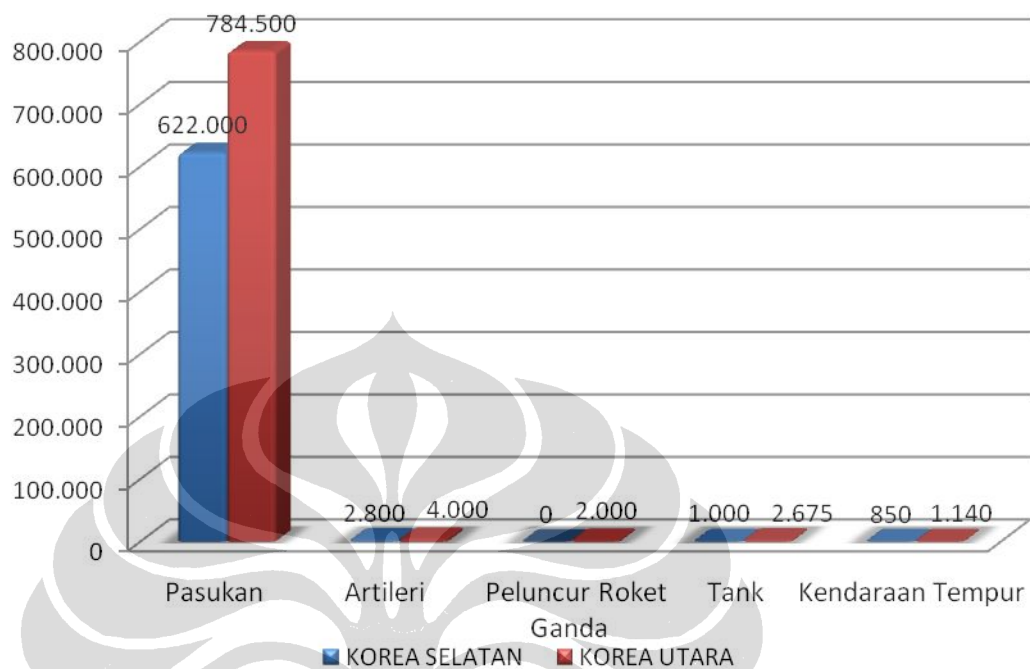
bertipe A-2 yang dapat melalui terowongan bawah tanah mereka untuk dapat menerobos jauh ke wilayah Korea Selatan. Dan lebih hebatnya lagi, Korea Utara pada masa ini mampu menghancurkan atau mengacaukan jaringan komando dan komunikasi lawan yang sekaligus saudaranya tersebut. Kekuatan pasukan komando gerak cepat ini juga tercatat mampu melakukan serangkaian kegiatan yang bersifat terorisme, seperti yang mereka lakukan di tahun 1968 dengan menyerang kediaman presiden Korea Selatan serta melakukan percobaan pembunuhan terhadap presiden Korea Selatan yang lain di kota Rangoon pada Oktober 1983. Selain kekuatan angkatan bersenjata yang dalam hal ini telah dijelaskan bertipe angkatan darat. Korea Utara juga mengungguli Korea Selatan dalam angkatan laut dan udara dengan jumlah kuantitas yang lebih besar. Perbandingan diantara keduanya tercatat, Korea Utara memiliki 500 kapal tempur, sedangkan Korea Selatan hanya 100 kapal tempur. Korea Utara memiliki 21 kapal selam berikut kapal patroli yang mempunyai peluru kendali, sedangkan Korea Selatan hanya memiliki 8 kapal perusak peninggalan Amerika Serikat di masa perang dunia II. Korea Utara memiliki 740 pesawat tempur, sedangkan Korea Selatan hanya memiliki 450 pesawat tempur.<sup>58</sup> Pada tahun 1983 ini, persaingan kekuatan militer kedua Korea meningkat tajam, ditandai dengan semakin sering keduanya terlibat dalam konflik terbuka. Persaingan ini tentunya semakin memperbesar jurang pemisah dan semakin kuatnya perpecahan diantara keduanya. Perbandingan dan perimbangan kekuatan tiga angkatan bersenjata Korea Utara dan Korea Selatan pada periode 1980-an dapat dilihat pada grafik dihalaman selanjutnya.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 172.

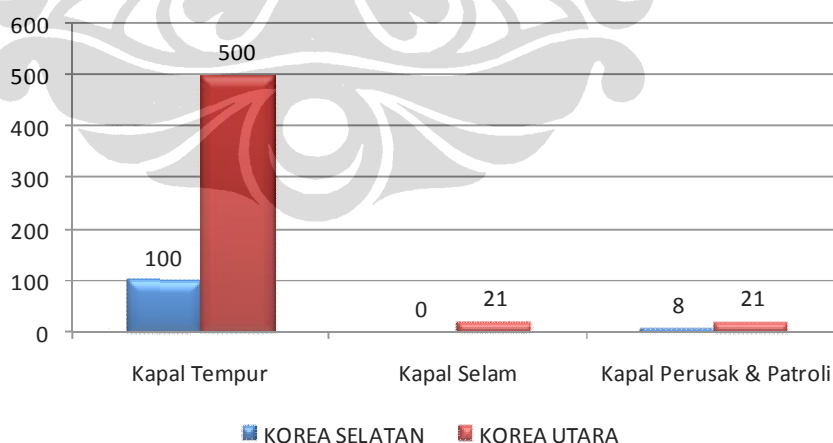
Grafik 2.2.1

**Perbandingan Kekuatan Angkatan Darat Korea Utara dan Korea Selatan  
Pada Periode 1983-1984<sup>59</sup>**



Grafik 2.2.2

**Perbandingan Kekuatan Angkatan Laut Korea Utara dan Korea Selatan  
Pada Periode 1983-1984<sup>60</sup>**



<sup>59</sup> Korea Herald, 3 Februari 1984; *The Military Balance*, 1983-1984, h. 93-94. Lihat Juga Yoong Ko-cha, Kang Choi, *South Korea Defense Posture*, Seoul: JFQ Forum, Spring 1995, h. 30.

<sup>60</sup> *Ibid.* Lihat Juga Yoong Ko-cha, Kang Choi, *ibid.*

**Grafik 2.2.3**  
**Perbandingan Kekuatan Angkatan Udara Korea Utara dan Korea Selatan**  
**Pada Periode 1983-1984<sup>61</sup>**



Peningkatan kemampuan angkatan bersenjata Korea Selatan pada periode milenium baru dapat terlaksana, karena pada periode ini Korea Selatan sudah dapat menyelesaikan krisis ekonominya dengan baik dalam waktu yang cukup singkat. Dengan pulihnya keadaan ekonomi Korea Selatan tersebut, maka Korea Selatan dapat melanjutkan kembali mega proyek modernisasi militer yang mulai dijalankan pada periode tahun 1970-an tersebut, namun tertunda karena krisis ekonomi yang menimpa mereka. Mega proyek modernisasi yang tertunda itu, seperti proyek pembangunan kapal selam (SSU)<sup>62</sup> dan proyek kapal perusak (KDX).<sup>63</sup> Proyek-proyek ini terus dikembangkan, mengingat angkatan bersenjata Korea Selatan masih melihat keadaan dilapangan yang kurang lebih 60% dari pasukan kedua negara masih tersebar disepanjang garis perbatasan, kendati dibidang politik kedua negara telah mengalami banyak kemajuan, seperti telah disetujuinya pembicaraan antara kedua pemimpin Korea di ibukota Korea Utara, Pyongyang pada tanggal 12-14 Juni 2000.<sup>64</sup>

Persaingan kedua Korea di periode tahun 1999, yang merupakan tahun meningkatnya ketegangan dalam hubungan keduanya terlihat dari kekuatan

<sup>61</sup> *Ibid.* Lihat Juga Yoong Ko-cha, Kang Choi, *ibid.*

<sup>62</sup> SSU (*Ship Salvage Unit*), unit pasukan kapal selam. Lihat [Half Century History of the ROK Navy](#)". [Republic of Korea Navy Official Website](#). March 4, 2007

<sup>63</sup> KDX (*Korean Destroyer eXperimental*), Kapal perusak Korea Selatan. Lihat *ibid.*

<sup>64</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 31.

militer yang dimiliki. Dalam menghadapi ancaman Korea Utara, angkatan bersenjata Korea Selatan memiliki personel dan peralatan yang lebih modern dibanding periode 1980-1990-an. Ditambah lagi dengan kehadiran pasukan Amerika Serikat.<sup>65</sup> Data-data susunan tempur Korea Selatan ditahun 1999 adalah :

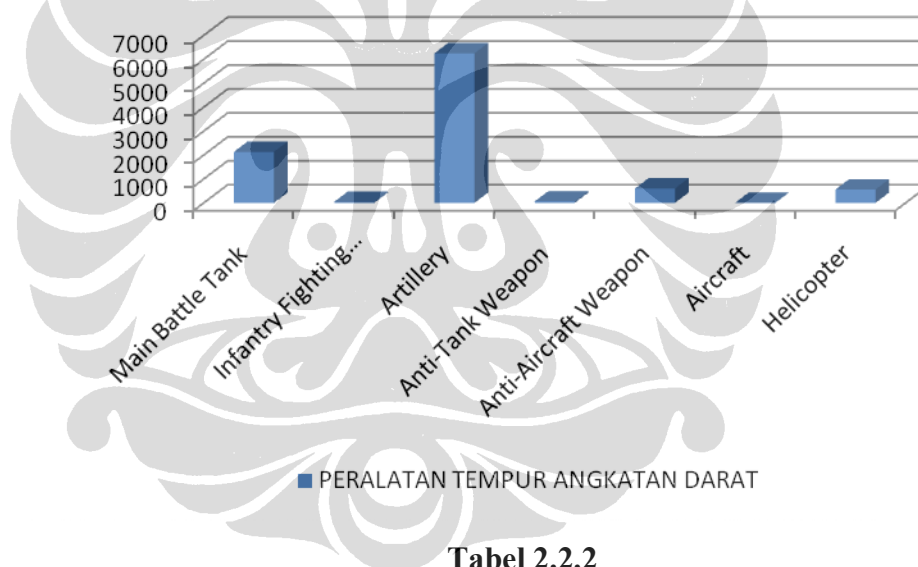
**Tabel 2.2.1**

**Kekuatan Personil Angkatan Darat Korea Selatan<sup>66</sup>**



**Grafik 2.2.4**

**Peralatan Tempur Angkatan Darat Korea Selatan<sup>67</sup>**



**Tabel 2.2.2**

**Kekuatan Personil Angkatan Laut Korea Selatan<sup>68</sup>**



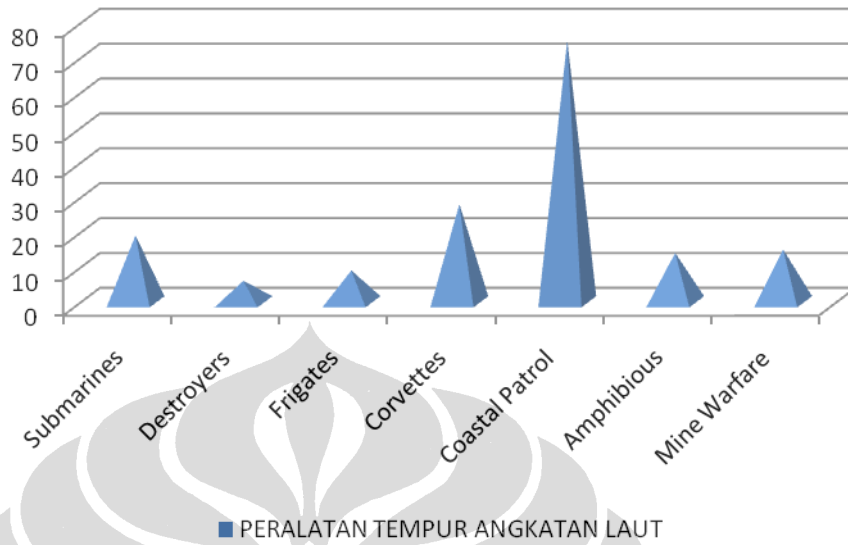
<sup>65</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 1999-2000*, London: International Institute for Strategic Studies, h. 195.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 195-196.

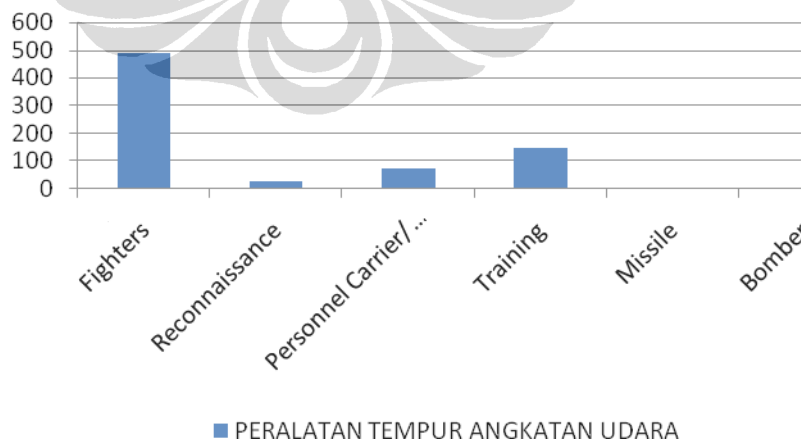
**Grafik 2.2.5**  
**Peralatan Tempur Angkatan Laut Korea Selatan<sup>69</sup>**



**Tabel 2.2.3**  
**Kekuatan Personil Angkatan Udara Korea Selatan<sup>70</sup>**



**Grafik 2.2.6**  
**Peralatan Tempur Angkatan Udara Korea Selatan<sup>71</sup>**



<sup>69</sup> *Ibid.*  
<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 196.  
<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 196.

Korea Selatan mempunyai strategi dasar dalam melaksanakan tujuan keamanan nasional, yaitu memelihara aliansinya dengan Amerika Serikat, memperkuat postur keamanan bebas dan meningkatkan persahabatan, hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di dalam maupun di luar kawasan sembari mencari koeksistensi damai dengan pihak Korea Utara. Inti dari strategi keamanan nasional dalam arahan strategi tersebut adalah :

1. Mencegah terjadinya perang dengan mempertahankan lingkungan keamanan yang stabil sembari menyelesaikan konfrontasi hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan. Dengan demikian dapat terbentuk pondasi untuk keamanan yang stabil.
2. Meningkatkan hubungan koeksistensi damai dengan cara rekonsiliasi dan kerjasama lebih jauh sambil menjamin keamanan nasional terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar dengan memperkuat kerjasama bilateral maupun multilateral.
3. Menciptakan kemakmuran yang sejalan dengan keamanan nasional terhadap ancaman dari luar dan dari dalam dengan cara memperkuat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral.<sup>72</sup>

Korea Selatan juga mempunyai tujuan pertahanan mereka dalam ruang lingkup tujuan keamanan nasional, yaitu :

1. Mempertahankan negara terhadap ancaman militer dari luar dan terhadap invasi.
2. Menjamin reunifikasi secara damai.
3. Menciptakan stabilisasi kawasan dan perdamaian dunia.<sup>73</sup>

Dalam mencapai tujuan pertahanan ini, ditentukan 4 arahan dasar, yaitu :

1. Diarahkan pada pertahanan nasional yang mempunyai kualitas tinggi.
2. Terus menciptakan kebijakan-kebijakan militer dalam upaya mengurangi ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea.

<sup>72</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 32.

<sup>73</sup> *Ibid.*

3. Meningkatkan aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat dan memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara kawasan.
4. Menciptakan kerjasama yang baik antara angkatan bersenjata dengan rakyat.<sup>74</sup>

Selain hal yang telah tersebut, Korea Selatan juga berupaya meningkatkan profesionalisme militer, angkatan bersenjata Korea Selatan secara rutin melaksanakan latihan gabungan, baik bersama Amerika Serikat, negara-negara lain maupun latihan internal angkatan bersenjata Korea Selatan. Latihan yang rutin dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Latihan *Ulchi Focus Lens* (UFL)
2. Latihan *Reception, Staging Onward Movement and Integration* (RSOI)
3. Latihan *Doksuri* (Foal-Eagle)
4. Latihan *Rim of the Pacific* (RIMPAC)
5. Latihan Komando Akhir, *Joint Chief of Staff* (JCS)
6. Latihan *Hokuk*.<sup>75</sup>

Angkatan bersenjata Korea Selatan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan latihan bersama dengan luar negeri guna meningkatkan kesiapan tempur yang terpadu. Disamping itu Korea Selatan juga aktif berperan dalam *Peace Keeping Operation* (PKO) dan kegiatan lainnya yang menunjang stabilitas regional.<sup>76</sup>

Angkatan bersenjata Korea Selatan melakukan kombinasi struktural dalam garis komando yang dinamakan *Combined Force Command* (CFC) dengan pihak Amerika Serikat. Dihalaman selanjutnya dapat dilihat gambar *Organizational Chart* antara angkatan bersenjata Korea Selatan dengan Amerika Serikat :

---

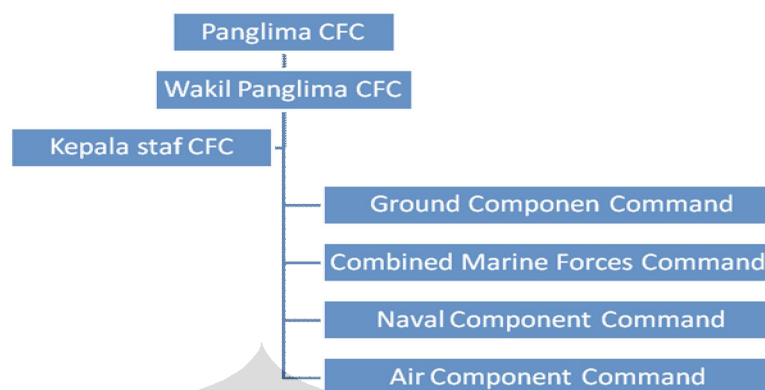
<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>76</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 148



Gambar 2.2.1

Organisasi *Combined Force Command* (CFC) Amerika Serikat - Korsel<sup>77</sup>

Pada posisi panglima, Amerika Serikat mengambil alih komando, penempatan hal tersebut memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat merupakan aktor yang selalu ingin menjadi pemimpin dalam peta kekuatan militer di dunia. Strategi Korea Selatan dalam menghadapi serangan mendadak dari Korea Utara yaitu, ditingkatkannya penggunaan sistem penginderaan dini dan pasukan reaksi cepat. Strategi operasinya adalah melakukan penghadangan dan menyerang lawan pada tempat masuknya. Kemudian mencegah infiltrasi musuh dan mengadakan hubungan dari garda depan ke belakang, serta melakukan serangan balasan dengan skala penuh.

## 1) Pasukan reaksi cepat

- Sistem komando operasi integrasi dengan memaksimalkan dan mengefektifkan sistem kombinasi operasi bersama.
- Menjaga terus integrasi sistem peringatan dini dan pengawasan bersama Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Guna menghadapi serangan mendadak, meningkatkan kesiapan tempur dan latihan-latihan operasi yang intensif dengan peralatan canggih serta memperkuat kesiapan tempur di garis perbatasan.
- Meningkatkan kemampuan pertahanan untuk menghadapi serangan rudal di garis depan dan belakang. Terus melakukan pengawalan intensif pada kedudukan rudal Korea Utara dan hadangan terhadap gerakan pesawat musuh.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 154.

- Guna menghadapi angkatan laut Korea Utara yang terus meningkat baik jumlah maupun penyebaran infiltran di malam hari, pesawat udara yang terbang rendah dan *Hovercraft* dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk pendaratan dan penyusupan. Untuk itu Korea Selatan meningkatkan kemampuan penjagaan dan pertahanan udara, laut dan darat melalui operasi bersama dengan Amerika Serikat serta sistem peringatan dini untuk laut dan udara.
- Untuk menghadapi serangan Korea Utara, Korea Selatan mengadakan pengawasan intensif dengan peralatan peringatan dini untuk mendeteksi serangan senjata kimia di garis depan dan belakang. Juga menyiapkan peralatan untuk melindungi penduduk sipil dan personel militer. Latihan-latihan pertahanan perang selalu dilakukan pada setiap tingkatan.<sup>78</sup>

Seoul yang berjarak hanya 40 km dari DMZ merupakan kota dan daerah paling rawan dalam sistem pertahanan Korea Selatan. Dengan demikian Seoul memiliki prioritas paling tinggi dalam rencana strategi dan operasi pertahanan nasional. Untuk pertahanan wilayah ibukota ini, dilakukan sistem penghadangan dan blokade pada pintu-pintu masuk utama dekat DMZ, Dalam waktu bersamaan disiapkan untuk perlawanan menghadapi musuh yang lewat jalan memutar atau unit-unit pasukan khusus, serangan udara dan artileri jarak jauh. Disamping itu juga meningkatkan kemampuan penduduk sipil seperti pertolongan medis, suplai air dan makanan, evakuasi dan sebagainya sambil membentuk organisasi unit-unit administrasi dengan kerjasama erat antara pemerintah militer dan sipil. Korea Utara akan menggelar strategi dengan kombinasi berbagai sistem perang. Diperkirakan bahwa unit-unit komando khusus untuk melaksanakan infiltrasi dalam skala besar lewat darat, udara dan laut untuk mencoba kesiapan dan kemampuan militer Korea Selatan. Pasukan-pasukan khusus ini berusaha untuk memacu dan mengintensifkan operasi di daerah-daerah front depan. Untuk menghadapi berbagai serangan Korea Utara di garis belakang. Angkatan bersenjata Korea Selatan menerapkan sistem pertahanan *multilayer* (berlapis).

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 149.

Dalam sistem pertahanan ini juga dibuat konsep-konsep operasi untuk berperang dalam daerah-daerah front depan dan belakang sekaligus.<sup>79</sup>

Secara geografis, Semenanjung Korea merupakan jembatan antara kekuatan darat dan kekuatan laut. Wilayah perairan yang mengelilingi negara ini (Korea Selatan) adalah 12 mil laut, baik di sebelah timur, selatan maupun barat. Untuk melindungi perairan tersebut, Korea Selatan melaksanakan *Joint Operation Sea Areas* (JOSAs) = Kerjasama operasi laut untuk deteksi dini, identifikasi dan pengendalian kapal-kapal lawan yang masuk perairan teritorial. Korea Selatan juga membangun *Northern Boundary Line* (NBL) di Laut Timur dan *Northern Limit Line* (NLL) di Laut Kuning berdasarkan konsep *Demarcation Military Line* (DML) di darat yang ditetapkan oleh *United Nations Command* (UNC) pada tahun 1953.<sup>80</sup>

Untuk pertahanan udara, Korea Selatan membangun *Korea Air Defense Identification Zone* (KADIZ) dan *The Korea Air Defense Area* (KADA). KADIZ untuk mengidentifikasi dan mengendalikan pesawat udara dengan cepat. KADA untuk mengidentifikasi, penempatan dalam pengawasan dan pengendalian pesawat udara di daerah udara musuh. Batas geografi KADA di atas perairan sama dengan JOSA. Untuk mengidentifikasi pesawat udara yang memasuki wilayah udara Korea Selatan dan mencegah pesawat udara musuh, Korea Selatan mengoperasikan angkatan udara untuk melakukan pengawasan 24 jam dan sistem peringatan dini.<sup>81</sup>

Menurut Korea Selatan, Korea Utara banyak melakukan tindakan-tindakan provokasi dan cukup sering melakukan perang psikologis. Tindakan-tindakan provokasi yang berhasil Korea Selatan catat dari pasca perpecahan yang diantara keduanya hingga insiden terakhir di laut barat semenanjung Korea Selatan. Kejadian-kejadian yang dapat dicatat adalah sebagai berikut :

- 21 Juni 1968 : Serangan kilat ke *Blue House* (Istana Kepresidenan)
- 1968 : Infiltrasi ke Ulchin dan Samchok oleh pasukan khusus

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 150.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 151.

- 1976 : Pembunuhan terhadap perwira UNC di Panmunjom.
- 1983 : Pemboman di Makam Pahlawan Aungsan Rangoon, Myanmar dan pengeboman pesawat komersial KAL 858. Penggalan terowongan (4 buah) untuk infiltrasi dan perampokan kapal-kapal ikan di Laut Timur.
- Oktober 1995 : Penyusupan-penyusupan di Puyo dan Sungai Imjin
- 18 Sept 1996 : Penyusupan kapal selam mini Korut di pantai Kangnung.
- 15 Juni 1999 : Insiden Laut Barat<sup>82</sup>

Sedangkan dipihak Korea Utara, Korea Utara tidak pernah berhenti melakukan modernisasi kekuatan militernya. Dengan status negara yang keamanannya fluktuatif di tiap saat, Korea Utara terus menyiagakan kekuatan militernya untuk mengantisipasi ancaman perang agresi dari negara-negara yang mempunyai hubungan fluktuatif pula dengan Korea Utara, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang. Pentingnya posisi dan peranan militer di Korea Utara, yang tergabung dalam *People's Armed Forces* atau Tentara Rakyat Korea (TRK), merupakan salah satu kebijakan nasional yang dicetuskan oleh pemimpin besar Korea Utara, Marsekal Kim Jong-il, dengan nama kebijakannya adalah *Army-first Policy*. Peranan militer adalah salah satu kunci dari tiga kekuatan yang sering dipropagandakan di Korea Utara, selain ideologi *Juche* dan ilmu pengetahuan. Kesiapsiagaan militer di Korea Utara juga ditunjukkan dengan sikap aktifnya yang diwarnai dengan percobaan-percobaan peluncuran satelit dan dianggap oleh negara-negara yang berseberangan dengan Korea Utara sebagai peluru kendali. Peluncuran satelit itu antara lain, *Kwangmyongsong-I*. Selain itu sikap lain yang ditunjukkan Korea Utara adalah pertunjukan kekuatan TRK yang tiap tahun secara rutin menyelenggarakan peringatan hari berdirinya TRK yang diisi dengan parade dan *defile* kekuatan militer baik *manpower* ataupun *equipment* yang mereka miliki. TRK berada dibawah komando tertinggi komisi pertahanan nasional yang diketuai oleh Marsekal Kim Jong-il yang bertindak pula sebagai panglima tertinggi TRK, sementara yang bertindak sebagai menteri angkatan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

bersenjata di era milenium baru adalah *Vice-Marshal* Kim Il-chol.<sup>83</sup> Berdasarkan informasi statistik kekuatan angkatan bersenjata negara-negara di dunia. Kekuatan militer Korea Utara pada tahun 1999<sup>84</sup> akan dijelaskan pada tabel dan grafik berikut :

**Tabel 2.2.4**

**Kekuatan Personil Angkatan Darat Korea Utara<sup>85</sup>**



**Grafik 2.2.7**

**Peralatan Tempur Angkatan Darat Korea Utara<sup>86</sup>**



**Tabel 2.2.5**

**Kekuatan Personil Angkatan Laut Korea Utara<sup>87</sup>**



<sup>83</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (operasional)*, o.pcit., h. 125.

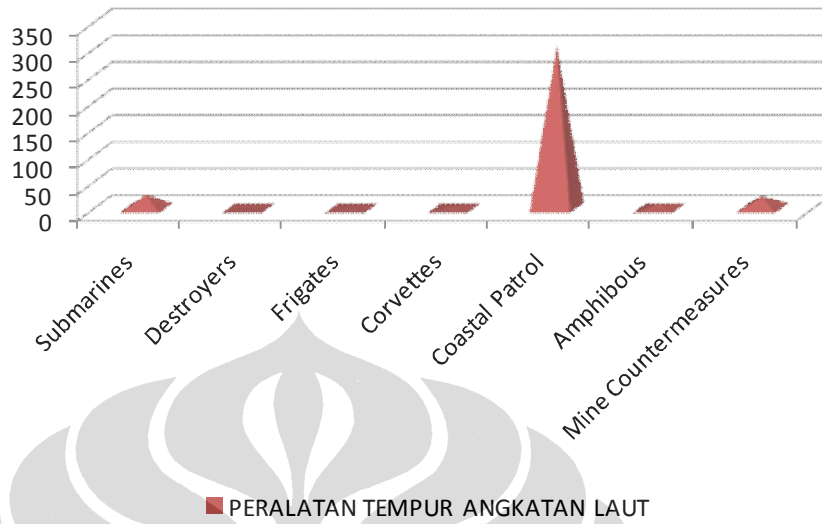
<sup>84</sup> Tahun 1999 merupakan fase tertinggi dalam ketegangan hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, setelah terjadinya insiden laut barat diantara keduanya.

<sup>85</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 1999-2000*, op.cit., h. 193-194.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 194.

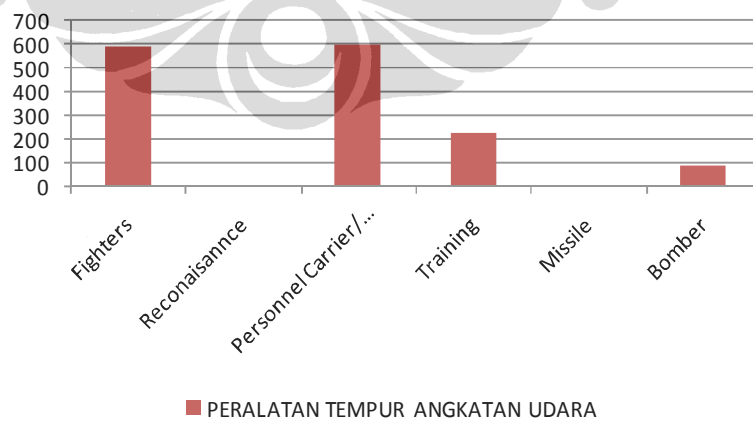
**Grafik 2.2.8**  
**Peralatan Tempur Angkatan Laut Korea Utara<sup>88</sup>**



**Tabel 2.2.6**  
**Kekuatan Personil Angkatan Udara Korea Utara<sup>89</sup>**

<b>AIR FORCE</b>
<b>86.000 Personnel</b>

**Grafik 2.2.9**  
**Peralatan Tempur Angkatan Udara Korea Utara<sup>90</sup>**



<sup>88</sup> Ibid.  
<sup>89</sup> Ibid.  
<sup>90</sup> Ibid.

Untuk peralatan dan persenjataannya, Korea Utara lebih menekankan pada modernisasi peledak-peledak jarak jauh yang dianggap lebih efektif. Pengembangan ini termasuk dalam mortir, artileri udara, MRL (Multiple Rocket Launcher), rudal *Frog-5*, *Frog-7* dan rudal *scud*. Rudal *scud B/C* telah diproduksi dengan beberapa modifikasi 100 buah per tahun, sejak Korea Utara mampu mengimpor rudal ini dari Mesir pada tahun 1980. Setelah mampu memproduksi, Korea Utara melakukan aktifitas ekspor rudal ini ke daerah Timur-Tengah, termasuk Syria, Iran, sehingga Korea Utara dianggap salah satu negara pengeksport rudal. Penjualan rudal ini untuk menopang ekonomi dalam negerinya yang menjadi ciri khas negara militer.<sup>91</sup>

### 2.3 Pasang Surut Hubungan Kedua Korea dalam dinamika politik-Internasional

Dalam era pasca berakhirnya Perang Dingin, regional Asia Pasifik masih mengalami ketidakpastian keadaan, terutama mengenai keadaan *Balance of Power* serta *Balance of Interest*. Hal lain yang juga membebani adalah munculnya berbagai macam permasalahan klasik yang telah diakhiri, namun kembali muncul. Teori penangkalan menjadi suatu langkah menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang kembali muncul tersebut di era ini. Dalam melakukan langkah tersebut, *Security Dilemma* memerlukan stabilitas produksi senjata, yang justru meningkatkan ketegangan. Hal itulah yang dilakukan oleh Korea Utara dengan program nuklirnya yang memang berawal dari pemikiran terhadap strategi penangkalan. Nuklir dianggap oleh Korea Utara sebagai alat politik yang dalam pandangan Korea Utara dapat membantu mereka dalam keadaan yang masih pada tahap ketidakpastian. Sikap Korea Utara ini merupakan reaksi dari kecurigaan mereka terhadap Amerika Serikat yang mulai menggunakan kebijakannya di arena semenanjung Korea.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (operasional)*, opcit., h. 125-126. Lihat juga KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, Seoul: KBRI Seoul, 2001, h. 127-128.

<sup>92</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik dan Perkembangan Kawasan Pasca-Perang Dingin*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjend DPR-RI, 2004, h. 55.

Selain itu pasca Perang Dingin pula, Rusia dan Cina (yang merupakan sekutu lama Korea Utara) telah menormalisasi hubungannya dengan Korea Selatan. Langkah kedua negara tersebut merupakan langkah realistis dalam melihat perkembangan dalam negerinya. Pasca runtuhnya Uni Soviet, negara yang kemudian memproklamirkan dirinya menjadi Republik Rusia, tidak lantas bisa bebas dari hal-hal yang memberatkan begitu saja. Tetapi justru, mereka dibebani oleh krisis ekonomi yang sangat parah dalam sejarah perjalanan bangsa mereka. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan luar negeri untuk lepas dari hal tersebut. Normalisasi hubungan antara Rusia dan Korea Selatan pada tahun 1990 telah diikuti dengan pengucuran bantuan ekonomi dan berbagai kerjasama investasi lainnya. Sementara itu dalam usahanya untuk tetap melanjutkan reformasi ekonominya Cina mengambil langkah yang sama dengan Rusia. Normalisasi hubungan antara Korea Selatan-Cina dan Korea Selatan-Rusia merupakan tamparan keras bagi Korea Utara. Korea Utara merasa ditinggalkan oleh para sekutu tradisionalnya. Normalisasi hubungan kedua negara tersebut dengan Korea Selatan menjadikan Korea Utara makin terisolasi dari komunitas internasional. Hal ini makin diperparah dengan masalah dalam negeri berupa kekurangan pangan karena kesalahan kebijakan pertanian Korea Utara dan telah membuat mereka mengalami krisis pangan dan bencana kelaparan berkepanjangan yang menimpa rakyat Korea Utara. Untuk menutupi hal tersebut, Korea Utara mengembangkan senjata dan kemampuan mengelola reaktor nuklirnya dalam upaya untuk mempertahankan *bargaining position*-nya di semenanjung Korea, dan tindakan Korea Utara tersebut merupakan reaksi terhadap sistem yang berubah di lingkungannya.<sup>93</sup>

Namun dalam penulisan ini, isu nuklir Korea Utara ini tidak akan menjadi suatu yang deskriptif, akan tetapi justru akan menjadi dasar dari pembicaraan Seoul-Pyongyang dalam kerangka proses reunifikasi kedua Korea. Presiden Korea Selatan di era ini, yaitu Roh Tae-woo menginginkan suatu upaya-upaya yang diharapkan dapat dilakukan pada bulan Juni 1988 untuk memperbaiki hubungan

---

<sup>93</sup> Keith R. Legg dan James F. Morrison, "The Formulation of Foreign Policy Objectives", dalam Richard Little dan Michael Smith (eds), *Perspective on World Politics*, second edition, Routledge 11 New Fetter Lane, London, 2000, h. 62.



antara Korea Utara dan Selatan yang mengalami ketegangan secara berkepanjangan. Upaya-upaya yang dilakukan pada bulan Juni tersebut adalah program *family reunification* (penyatuan kembali keluarga Korea yang terpisah), dibukanya ruang perdagangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta forum-forum pembicaraan tingkat internasional yang dianggap sangat penting dalam mempertemukan keduanya. Bahkan, Presiden Roh Tae-woo, mengangkat keinginannya tersebut dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya tersebut Presiden Korea Selatan yang terpilih di era tersebut, mengajak Korea Utara untuk membicarakan dan membahas isu-isu keamanan yang terdapat di semenanjung Korea.<sup>94</sup>

Dari sisi Korea Utara, negara Komunis ini mulai melakukan pengajuan untuk melakukan pertemuan politik secepatnya dalam membahas rencana reunifikasi dan mencapai kesepakatan perjanjian kedua belah pihak sebagai bagian dari metode reunifikasi. Bahkan di bulan September tahun 1989, kedua belah pihak mulai memikirkan rencana pertemuan keduanya, dan yang akhirnya terjadi pada bulan September tahun 1990 di Seoul.<sup>95</sup>

Situasi keamanan di semenanjung Korea pada tahun 1990 mulai bergerak menuju akhir persaingan antara Korea Utara dan Korea Selatan, walaupun ada ketegangan yang muncul dengan meninggalnya presiden Korea Utara Kim Il-sung pada tahun 1994 dan adanya isu nuklir dari Korea Utara. Korea Utara sendiri telah berusaha untuk membuka diri dalam usahanya menyelesaikan masalah ekonomi dan krisis diplomatiknya. Perjanjian Jenewa pada bulan Oktober 1994 antara Amerika Serikat dan Korea Utara merupakan titik balik dalam diplomasi Korea Utara mengupayakan mencari keuntungan ekonomi dan diplomasi, dengan persyaratan Korea Utara harus menghentikan program nuklirnya. Hal yang disadari oleh Korea Utara, adalah sangat sulit bagi Korea Utara untuk dapat berhasil dalam memelihara sistem yang keterbukaannya demikian terbatas, apalagi tanpa adanya tindakan-tindakan untuk merubah sistem dasarnya. Walau

<sup>94</sup> Steven Aftergood, *Nuclear Weapons Program-North Korea*, <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/index.html>, 9 Juni 2003, h. 3.

<sup>95</sup> Kim Byong Hong, Korean Reunification dalam *Proceedings of the Academy of Political Science*, Vol. 38, No. 2, "The China Challenge: American Policies in East Asia", The Academy of Political Science, 1991, h. 115.

demikian, Korea Utara mempunyai kemampuan yang cukup dalam bidang militer, baik dalam hal untuk meningkatkan ketegangan militer maupun dalam hal kemampuan melakukan agresi militer.<sup>96</sup>

Korea Utara pada kisaran tahun 1990-an meningkatkan usahanya untuk menjadi suatu negara yang kuat dengan meningkatkan kemampuan bidang militer, ideologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden Kim Jong-il yang menggantikan mendiang ayahnya meminta dan menekankan kepada rakyat Korea Utara pentingnya menjaga persatuan dan berusaha membangun suatu negara yang kuat dalam persenjataan, teknologi dan ilmu pengetahuan melalui pesan tahun baru. Mengenai hubungan Inter-Korea, Korea Utara menegaskan lagi garis kerasnya terhadap Korea Selatan dan mengesampingkan perkiraan kemungkinan pengadaaan kembali pembicaraan antar pemerintah yang tertunda. Korea Utara juga mengkritik negara-negara yang memusuhinya, terutama Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat mempunyai ambisi Imperialis yang beracun terhadap ideologi *Juche* (*Self Reliance*). Korea Utara saat ini mengalami kesulitan dalam memelihara sistem politiknya yang disebabkan oleh persoalan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengkhianat yang keluar dari Korea Utara. Dengan kebijakan militer dan strategi yang digariskan oleh presiden terdahulu, yaitu Kim Il-sung pada tahun 1994, dan krisis pangan yang melanda Korea Utara sebagai akibat banjir yang melanda Korea Utara secara berturut-turut tahun 1995 dan 1996. Meski, hal tersebut tidak dapat merubah kebijakan dan strategi anakhronistisnya, yaitu mengkomunikasikan seluruh semenanjung Korea dengan caranya sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya, Korea Utara tanpa ragu-ragu akan menggunakan kekuatan militer dan senjata nuklirnya, tetapi dilain pihak Korea Utara masih terikat pada perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat. Menyadari bahwa kekuatan militer adalah suatu cara yang paling ampuh untuk memelihara rezim politiknya dan untuk mengkomunikasikan seluruh semenanjung Korea. Oleh karena itu Korea Utara telah dan terus memperkuat angkatan bersenjataanya dengan menekankan prioritas utama pada pembangunan

---

<sup>96</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, Seoul: KBRI Seoul, 2000, h. 119.

pangkalan-pangkalan militer dan menumbuhkan semangat tempur pada setiap prajuritnya.<sup>97</sup>

Perkiraan mengenai masa depan Korea Utara cenderung menjadi ekstrim. Perkiraan pertama seperti yang terjadi pada bekas negara Uni Soviet dan rezim-rezim sosialis di Eropa Timur Laut, Korea Utara akan runtuh. Sebaliknya perkiraan kedua melihat bahwa rezim Pyongyang akan tetap bertahan dengan karakteristiknya yang unik. Korea Utara berbeda dengan negara-negara Eropa Timur, karena Korea Utara memelihara sistem Stalin secara ketat, tetapi disamping itu Korea Utara juga mengalami konflik-konflik sosial dan kesulitan ekonomi yang sama seperti yang pernah dialami oleh negara bekas negara-negara komunis Eropa Timur. Walaupun dalam hal ini kesulitan ekonomi yang dialami Korea Utara jauh lebih berat dari pada yang dialami negara-negara Eropa Timur.<sup>98</sup>

Masalah ekonomi mungkin merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial dalam kesadaran sosial rakyat Korea Utara. Kebutuhan utama sehari-hari didistribusikan melalui sistem ransum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sistem ransum tersebut dalam beberapa tahun ini telah mengalami hambatan-hambatan dan keterlambatan karena meningkatnya kesulitan ekonomi Korea Utara. Belakangan ini perubahan sosial yang cepat telah terjadi dan ini diluar jangkauan pengawasan pemerintah. Menurunnya ekonomi secara tiba-tiba dan runtuhnya blok sosialis pada akhir 1980-an, telah menyebabkan berkurangnya bahan makanan dan bahan pokok yang lain. Rakyat Korea Utara saat ini harus mencari suatu cara untuk mengatasi kekurangan bahan makanan, karena mereka tidak lagi dapat mengandalkan ransum dari pemerintah dan sebagai hasilnya kesadaran sosial mereka mulai berubah. Ketidakpercayaan rakyat Korea Utara pada pemerintah dapat dilihat dalam dua bentuk, yang pertama dimanifestasikan dalam bentuk kritik langsung terhadap sistem ransum, yang lainnya muncul dalam bentuk pasar gelap. "Pasar Kedua" ini menjadi penting karena ia dapat menyediakan kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Munculnya pasar gelap ini menunjukkan bahwa elemen-elemen kapitalis telah diperkenalkan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 120.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 121.

ke dalam sistem distribusi. Kurangnya bahan makanan dan kebutuhan lain dapat didefinisikan sebagai masalah ekonomi, tetapi perubahan yang terjadi dalam cara mendapatkan barang menunjukkan adanya perubahan dalam sistem itu sendiri. Sistem ransum yang merupakan salah satu pilar dari kehidupan ekonomi Korea Utara saat ini sedang goyah, bahkan beberapa pengamat menyatakan bahwa sistem tersebut sudah runtuh. Ketika rakyat mempunyai pengalaman bahwa membeli kebutuhan di pasar gelap dan mendapat untung melalui partisipasi langsung dalam perdagangan, maka persepsi mereka mengenal nilai uang mulai berubah secara drastis. Individualisme dan materialisme segera muncul sebagai suatu sistem nilai. Materialisme, termasuk pandangan baru terhadap uang, suap sedang menancapkan akarnya di Korea Utara.<sup>99</sup>

Diawali dengan langkah dialog yang positif, pertemuan tingkat menteri antar kedua negara menjadi suatu awalan yang baik bagi hubungan keduanya. Pertemuan tersebut melahirkan dua kesepakatan yang dianggap penting oleh keduanya, yaitu *Reconciliation Agreement*, Meniadakan Agresi, dan melakukan kegiatan *Exchange* serta *Cooperation* diantara keduanya di berbagai bidang. Kesepakatan pertama ini merupakan basic agreement yang diteruskan dengan *Joint Declaration* yang berisi tentang kesepakatan menghapus kebijakan nuklirisasi di semenanjung Korea. Dua perjanjian ini berhasil ditandatangani pada akhir tahun 1991 oleh kedua belah pihak.<sup>100</sup>

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan juga semakin mencair, setelah dibentuknya Organisasi yang dinamakan *Korean Peninsula Energy Development Organization* (KEDO), disini Korea Selatan bahu membahu bersama Amerika Serikat dan Jepang melakukan pengadaan energi air untuk membantu kebutuhan Korea Utara. Pembentukan organisasi ini sendiri merupakan hasil dari kesepakatan dalam *Agreed Framework* tahun 1994.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 121-122

<sup>100</sup> Steven Aftergood, *op.cit.*, h. 2. Lihat juga Kim Byong Hong, *ibid.*

<sup>101</sup> Larry A. Niksch, *North Korea's Nuclear Weapons Program*, CRS Issue Brief for Congress, Congressional Research Service, 27 Agustus 2003, h. 10. Lihat juga International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance : 1999-2000*, *op.cit.*, h. 172.

Memasuki tahun 1998, atau tepatnya di akhir bulan Agustus. Hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan kembali memanas, hal ini dikarenakan tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba rudal Jarak Jauh, yang mereka namakan *Taepo Dong-1*. Peluncuran tersebut menimbulkan kekhawatiran kembali, baik disemenanjung Korea maupun dikawasan Asia Timur.<sup>102</sup>

Pada tanggal 15 Juni 1999, pukul 7 pagi, 10 kapal patroli AL Korea Utara dan tiga kapal torpedonya menyusup masuk ke daerah penyangga perbatasan lautt sampai 5 km ke dalam wilayah perairan Korea Selatan, 13 km berat laut pulau Yangpyong mengawal 20 kapal nelayan Korea Utara. Sedangkan kapal patroli AL Korea Selatan yang sudah sejak tanggal 9 Juni 1999 mengawasi gerak kapal-kapal AL Korea Utara berupaya untuk mengusir sambil membentur tiga kapal patroli AL Korea Utara agar kembali ke perairan wilayah mereka sendiri (NLL). Pada pukul 09.25 pagi satu dari kapal patroli AL Korea Utara tersebut menembak kapal patroli AL Korea Selatan dengan senjata *canon 25 mm* yang kemudian dibalas oleh kapal patroli AL Korea Selatan. Dalam tembak-menembak selama 5 menit satu kapal torpedo Korea Utara berbobot mati 40 ton tenggelam dan diperkirakan 10 orang ABK-nya tewas, sementara 5 kapal patroli AL Korea Utara lainnya mengalami rusak berat dan kembali ke daerah perbatasan (NLL). Dipihak AL Korea Selatan 7 orang prajurit mengalami luka-luka dan 5 kapal patroli AL Korea Selatan mengalami kerusakan. Partai oposisi GNP menilai Kim Dae-jung telah gagal menerapkan *sunshine policy* terhadap Korea Utara. Kim dianggap terlalu lembek dalam menghadapi Korea Utara mengingat bantuan-bantuan yang dikirimkan ke Korea Utara berasal dari Korea Selatan sebagai timbal baliknya Korea Utara membalasnya dengan provokasi militer.<sup>103</sup>

Perundingan tingkat Wakil Menteri Korea Selatan - Korea Utara dibuka kembali tanggal 22 Juni 1999 di Beijing setelah tertunda satu hari dari rencana semula tanggal 21 Juni 1999 karena Korea Utara melakukan protes atas penundaan pengiriman 100 ribu ton pupuk ke kepada mereka. Ketua delegasi Korea Selatan Yang Young-shik yang juga merupakan wakil menteri unifikasi,

<sup>102</sup> Murray Hiebert, John Larkin dan Susan Lawrence, *North Korea: Consequence of Confession*, Far Eastern Economic, 31 Oktober 2002, h. 14-16.

<sup>103</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000*, *op.cit.*, h. 46-48.

dalam perundingan tersebut mengatakan bahwa sekarang ini waktunya bagi Korea Selatan dan Korea Utara untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi rasa kesedihan bagi keluarga kedua Korea yang terpisah dan mengusulkan agar Korea Utara dapat mengizinkan keluarga Korea yang terpisah untuk mengetahui sanak keluarganya jika masih hidup dan dapat mengirim surat serta mengadakan pertemuan. Meminta Seoul dan Pyongyang mendirikan kantor penghubung seperti yang telah dituangkan dalam isi *Basic Agreement* kedua Korea 1992.<sup>104</sup>

Park Yong-su pejabat senior komite unifikasi perdamaian tanah air yang memimpin delegasi Korea Utara, tidak memberikan jawaban terhadap masalah pertemuan tersebut dan sebaliknya mengecam Korea Selatan atas insiden saling menembak yang terjadi di Laut Barat tanggal 15 Juni 1999 serta menuntut Seoul agar menyatakan permintaan maaf dan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kemudian kedua pihak saling tuduh-menuduh atas insiden tersebut dan akhirnya perundingan mengalami jalan buntu karena kedua pihak tetap pada posisinya masing-masing. Pada perundingan berikutnya tanggal 2 Juli 1999, juga mengalami jalan buntu setelah delegasi Korea Utara *walkout* dari meja perundingan dan mengancam akan memboikot pertemuan selanjutnya kecuali Seoul meminta maaf atas insiden kapal perang di Laut Barat dan segera mengirimkan pupuk kepada Pyongyang.<sup>105</sup>

Suhu politik hubungan kedua negara semakin memanas dengan ditahannya seorang turis asal Korea Selatan Min Yong-mi pada tanggal 20 Juni 1999 yang sedang melakukan perjalanan wisata ke gunung Kumgang. Otoritas hukum Korea Utara menuduh Min melakukan kegiatan spionase dan menghasut pemandu wisata Korea Utara untuk membelot ke Korea Selatan. Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyampaikan protes keras kepada Korea Utara dan menuntut Pyongyang agar segera membebaskan warganya serta meminta Hyundai untuk menghentikan semua operasi kapal pesiarnya ke Korea Utara. Dengan adanya instruksi tersebut maka satu dari tiga kapal pesiar *Hyundai* yang kebetulan baru tiba pagi hari tanggal 21 Juni 1999 di pelabuhan Changjwon, Korea Utara, pada

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 48-49.

malam harinya kembali ke pelabuhan Tonghae, Korea Selatan. Menindaklanjuti instruksi Dewan Keamanan Nasional, *Hyundai* menghentikan pembayaran tiap bulan kepada Korea Utara sebesar US\$ 8 juta serta mempertimbangkan untuk menarik semua pejabat-pejabat *Hyundai* yang ada di Korea Utara. Untuk sementara pemerintah Korea Selatan menghentikan wisata ke gunung Kumgang dan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara.<sup>106</sup>

*Hyundai Group* sebagai penyelenggara wisata ke Gunung Kumgang dan yang bertanggung jawab terhadap penahanan Min Yong-mi terus berupaya melakukan perundingan dengan Komite Perdamaian Tanah Air Korea Utara untuk membebaskannya. Berkat upaya-upaya keras *Hyundai Group*, akhirnya pada tanggal 25 Juni 1999 Min Young-mi dibebaskan dari penahanan dan kembali ke Seoul didampingi oleh pejabat *Hyundai Group*.<sup>107</sup>

Ketegangan di semenanjung Korea kembali meningkat dikarenakan kegiatan provokatif dan infiltrasi Korea Selatan terhadap Korea Utara di bulan Juni 1999. Korea Selatan yang diperintahkan Amerika Serikat dalam menjalankan misi invasinya ke Korea Utara yang berlatarkan kekalahan mereka di Perang Korea (1950-1953). Infiltrasi Korea Selatan ke wilayah perairan Korea Utara memunculkan insiden yang dinamakan insiden laut barat. Korea Utara merasa sangat dipermainkan oleh pihak Korea Selatan dan Amerika Serikat, melalui perundingan tanggal 2 Juli 1999 di Panmunjom yang dihadiri oleh para perwira tingkat tinggi Korea Utara dengan Amerika Serikat yang masing-masing dipimpin oleh Letjen Ro Chan-bok dan Mayjen Michael Dunn. Dalam perundingan tersebut delegasi militer Korea Utara mengulangi kecamannya atas infiltrasi militer Korea Selatan ke perairan Korea Utara dan sekaligus mengecam pihak Amerika Serikat yang secara sepihak telah menetapkan “Garis Batas Utara” atas wilayah perairan yang dianggap daerah netral dalam persetujuan Gencatan Senjata tahun 1953. Pada kesempatan tersebut delegasi militer Korea Utara mengajukan lima tuntutan, yakni :

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>107</sup> *Ibid.*

- Pihak militer Amerika Serikat harus segera membatalkan penetapan sepihak “Garis Batas Utara”.
- Militer Amerika Serikat harus ditarik mundur dari wilayah perairan yang dipersengketakan tersebut.
- Gangguan dan provokasi terhadap daerah perairan Korea Utara harus segera dihentikan.
- Para pelaku tindakan provokatif dalam insiden 15 Juni yang lalu harus dijatuhi hukuman.
- Mengusulkan disetujuinya prinsip-prinsip persetujuan untuk mencegah konflik kekuatan laut di daerah laut barat Korea pada tingkat perwira tinggi dan mendiskusikan masalah-masalah praktis sebagai implementasinya dalam pembicaraan terpisah.

Pihak militer Amerika Serikat menolak tuntutan Korea Utara tersebut dengan menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut daerah perairan yang dimaksud harus dirundingkan oleh Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>108</sup>

Korea Utara menjawab penolakan Amerika Serikat tersebut, bagi Korea Utara tuntutan yang mereka kemukakan tersebut terkait dengan persetujuan gencatan senjata karena fungsi berbagai forum Inter-Korea seperti “dialog utara-selatan” dan komisi militer bersama Utara-Selatan dianggap Korea Utara telah mengalami kemacetan. Pihak militer mengemukakan bahwa “Garis Batas Utara” yang ditetapkan secara unilateral tidak memerlukan persetujuan kedua pihak dan akan tetap ada hingga tercapainya garis demarkasi baru di daerah perairan barat tersebut. Akan tetapi Korea Utara menegaskan sekali kepada pihak militer Amerika Serikat, bahwa bila Amerika Serikat benar-benar menginginkan peredaan ketegangan di semenanjung Korea, maka pihak Amerika Serikat harus mempertimbangkan secara positif usul dari delegasi militer Korea Utara seperti yang telah ditekankan pada perundingan Panmunjom.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (Operasional)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2000, h. 136-141.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 142.



Namun ketegangan kembali mereda di akhir tahun 1999, ketika lagi-lagi Korea Utara melunak dengan Amerika Serikat dan bersedia melakukan penandatanganan perjanjian moratorium pelaksanaan uji coba rudal jarak jauhnya.<sup>110</sup>

Surat kabar milik partai buruh komunis Korea Utara *Rodong Sinmun* dalam editorialnya memberitakan :

- Pemerintah Korea Utara tanggal 14 Maret 2000 secara resmi dapat menerima usul Presiden Kim Dae-jung untuk membuka kembali dialog tingkat pejabat tinggi antar kedua Korea jika Korea Selatan menunjukkan sikap perubahan yang positif dan sungguh-sungguh.
- Korea Utara berkeinginan untuk mengadakan dialog dari hati kehati untuk membicarakan isu *pending* yang ada di antara kedua Korea.
- Berupaya mewujudkan reunifikasi nasional dengan Korea Selatan, jika Seoul benar-benar mengubah kebijakan konfrontasinya.
- Pemerintah Seoul pertama harus menghapuskan undang-undang keamanan nasional dalam mengakhiri kebijakan koordinasi anti Pyongyang yang selama ini dijalin dengan sekutunya dan menjamin kebebasan aktivis pro-Korea Utara di Korea Selatan.<sup>111</sup>

Pada grafik dibawah terlihat hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang mengalami pasang surut dalam periode-periode seperti, pada tahun 1945-1950, wilayah semenanjung Korea yang diduduki oleh Jepang pada masa perang dunia II dan dilepaskan pasca kekalahan Jepang. Tahun 1950-1953 merupakan awal perpecahan semenanjung Korea menjadi dua wilayah dalam perang saudara yang disebut Perang Korea. Di tahun 1960-1980, masing wilayah-wilayah telah mengalami perpecahan dan masing-masing wilayah telah mempunyai ideologinya masing-masing, yang dimana Korea Utara berideologi Komunis dan Korea Selatan berideologi Demokrasi Liberal akibat pengaruh dari dua polar besar dunia pasca Perang Dingin, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Tahun 1980-1992, merupakan tahun persaingan kekuatan militer antara Korea

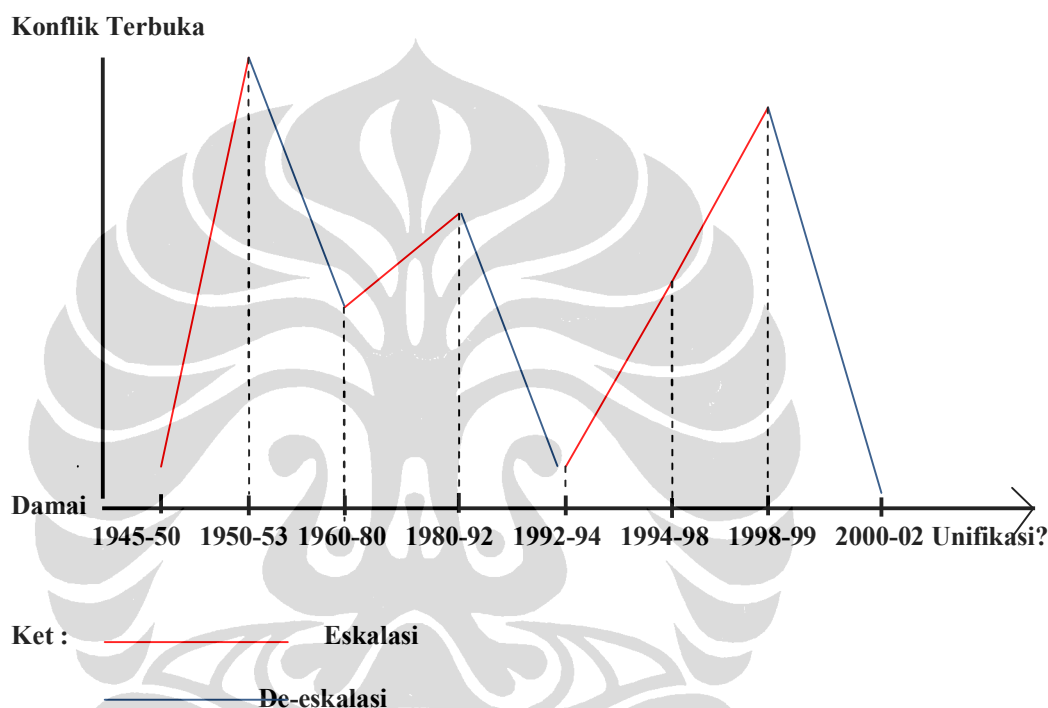
<sup>110</sup> Murray Hiebert, John Larkin dan Susan Lawrence, *op.cit.*, h. 14-16.

<sup>111</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000*, *op.cit.*, h. 52-53.

Utara dengan Korea Selatan, namun pada tahun tersebut Korea Utara mengungguli kekuatan militer Korea Selatan, dikarenakan pada saat itu Korea Selatan mengalami krisis ekonomi dan tindakan-tindakan represif terjadi yang sering menimbulkan percikan konflik.<sup>112</sup>

**Grafik 2.3.1**

**Pasang Surut Hubungan kedua Korea dalam  
Dinamika Politik Internasional**



Tahun 1992-1994 merupakan tahun penurunan ketegangan diantaranya keduanya yang dimana, di tahun tersebut kedua Korea menandatangani *Basic Agreement* yang menempatkan keduanya pada proses penyelesaian konflik, hingga berujung pada *Agreement Framework* antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang mengharuskan Korea Utara melakukan gencatan senjata dan memelihara perdamaian di semenanjung Korea. Tahun 1994-1998 hubungan keduanya kembali memburuk, bahkan cenderung naik ke potensi permasalahan besar di tahun 1998-1999, yang dimana Insiden Laut Barat<sup>113</sup> merupakan salah

<sup>112</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 1983-1984*, London: The International Institute for Strategic Studies, 1983, h. 93-94.

<sup>113</sup> Insiden laut barat adalah pertempuran antara Korea Utara dan Korea Selatan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Selatan pada tanggal 7 Juni 1999

satu pertempuran terbuka diantara keduanya. Memasuki milenium baru, hubungan kedua kembali mencair dengan upaya-upaya Korea Selatan menciptakan perdamaian diantara keduanya serta mengangkat isu reunifikasi. Di tahun 1999-2000, Korea Utara menurunkan egonya demi mendapatkan bantuan dari Korea Selatan dalam berbagai hal yang mereka butuhkan, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan dan kebutuhan energi. Di tahun 2000 pula, terjadinya pertemuan tingkat tinggi antara dua pemimpin besar kedua Korea yang dinamakan KTT Inter-Korea pada tanggal 13-15 Juni 2000 dan keduanya mulai mengambil langkah-langkah menuju proses reunifikasi.

#### 2.4 Intervensi asing yang terus menanamkan pengaruhnya - di Semenanjung Korea

Perpecahan dan ketegangan yang ada antara Korea Selatan dan Korea Utara masih terus berlanjut diperiode ini. Karena kunci penyelesaian kedua hal tersebut, sebenarnya bukan hanya berada pada kedua negara yang bersengketa, dalam hal ini Korea Utara dan Korea Selatan. Akan tetapi juga sangat banyak dipengaruhi oleh negara-negara kuat lainnya, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Jepang.

Proses pencairan hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan juga diwarnai oleh campur tangan Amerika Serikat dalam berbagai kegiatan yang didasari oleh kewaspadaan terhadap kegiatan Korea Utara yang kembali melakukan pengaktifan program nuklirnya dan penolakan-penolakan terhadap himbuan badan-badan yang bergerak dalam kerjasama dan kegiatan analisa nuklir, seperti *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan *Joint Nuclear Control Commission* (JNCC) yang akhirnya JNCC sendiri mengalami kegagalan

---

dengan memasuki perairan Korea Utara dan bahkan melabuhkan sembilan kapal perangnya di pulau-pulau kecil Syongphyong dan Taechong, di wilayah perairan Korea Utara. Bahkan di tanggal 8 Juni, keesokan harinya Korea Selatan terus menambah armada lautnya tersebut dan berbalik arah setelah bertemu dengan kapal patroli Korea Utara. Aksi yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut merupakan aksi provokasi dan infiltrasi bagi Korea Utara, dan hal tersebut dinilai oleh Korea Utara merupakan perintah Amerika Serikat yang ingin melakukan invasi ke wilayah Korea Utara. Kegiatan ini dianggap Korea Utara merupakan pelanggaran berat atas persetujuan gencatan senjata 1953. Bahkan aksi pemicu peperangan dilakukan oleh kapal-kapal *destroyer* Korea Selatan tersebut pada tanggal 15 Juni 1999 terhadap kapal-kapal Korea Utara dan mengakibatkan hancurnya kapal-kapal perang Korea Utara di daerah perairan laut barat. Lihat KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 46-48.

dalam menahan niat Korea Utara.<sup>114</sup> Pada bulan Juni 1994, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter berkunjung ke ibukota Korea Utara, Pyongyang, untuk melakukan seruan agar kedua Korea yang kembali berseteru pasca tahun 1991, untuk melakukan dialog peredaan ketegangan diantara keduanya.<sup>115</sup>

Upaya Amerika Serikat tersebut terbilang cukup sukses karena berhasil menggiring Korea Utara ke dalam pertemuan Amerika Serikat-Korea Utara di Jenewa, Swiss pada tanggal 21 Oktober 1994, yang menghasilkan *Agreed Framework* (Kerangka Perjanjian) antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Kesediaan Korea Utara tersebut dibalas dengan kebijakan Amerika Serikat yang melepas sanksi ekonomi yang ditujukan kepada Korea Utara, seperti dibukanya kembali akses ekonomi, komunikasi dan perbankan yang sebelumnya dibekukan oleh Amerika Serikat.<sup>116</sup>

Dalam upaya mencegah Korea Utara melakukan uji coba rudal *Taepodong II*, Menlu AS, William Cohen pada tanggal 29 Juli 1999 di Seoul mengadakan pertemuan koordinasi dengan Menhan Korea Selatan, Cho Seong-tae. Dalam pernyataannya, Menhan Cohen mengancam jika Korea Utara tetap melakukan uji coba peluncuran rudal balistik maka Pyongyang akan terisolasi dari masyarakat internasional dan sanksi ekonomi yang lebih keras lagi, karena uji coba tersebut akan merusak rencana perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Menlu Korea Utara, Paek Nam-sun dalam sidang umum PBB ke 54 di New York tanggal 24 September 1999, menyampaikan keputusan pemerintahnya untuk menanggihkan uji coba peluncuran rudal *Taepodong-II*, namun sebaliknya Korea Utara juga menginginkan agar Amerika Serikat juga menghormati hak kedaulatan negaranya dan menghentikan kebijakan permusuhan. Presiden Kim Dae-jung juga meminta agar Cina dapat memainkan peranannya untuk mencegah Korea Utara agar tidak melakukan rencananya. Sedangkan Amerika Serikat dan Jepang tetap meningkatkan kerjasamanya untuk mengakhiri struktur perang dingin yang masih melekat di kawasan Semenanjung Korea. Selain itu, Korea Selatan juga

---

<sup>114</sup> Larry A. Niksch, *op.cit.*, h. 10.

<sup>115</sup> Robert Scalapino, Seizaburo Sato, Jusuf Wanandi (ed.), *op.cit.*, h. 60.

<sup>116</sup> *Ibid.*

berkeinginan untuk meningkatkan jarak tempak rudalnya menjadi 500 km guna meng – *counter* ancaman rudal Korea Utara.<sup>117</sup>

Bagi Amerika Serikat, penempatan pasukan mereka di Korea Selatan mempunyai arti strategis karena dengan demikian pasukan Amerika Serikat akan selalu dapat digerakan secara cepat jika terdapat situasi *contingency* di kawasan Asia Pasifik. Pada periode ini, *interest* Amerika Serikat terhadap Korea Selatan bukan semata-mata pada masalah keamanan saja tetapi telah meluas pada masalah ekonomi.<sup>118</sup>

Untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea serta pembentukan struktur hidup berdampingan secara damai antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tanggal 15 September 1999, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Perry, dalam laporannya pada kongres Amerika Serikat menyampaikan kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara, antara lain sebagai berikut:

- Normalisasi hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan mencabut sanksi ekonomi dengan jaminan Korea Utara tidak meneruskan program nuklirnya dan menghentikan uji coba peluncuran rudalnya.
- Amerika Serikat harus mengakhiri struktur perang dingin di Semenanjung Korea dengan membantu Korea Selatan, Korea Utara dan Jepang dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mengurangi permasalahan yang ada di kawasan.
- 37.000 pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan harus tetap dipertahankan dan perjanjian “*Agreement Framework*” antara Amerika Serikat dengan Korea Utara pada tahun 1994 di Jenewa harus tetap dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah Korea Utara mengembangkan program senjata nuklirnya.
- Kebijakan baru Amerika Serikat melalui pendekatan yang komprehensif dan konsisten terhadap Korea Utara, serta memelihara hubungan dalam *trilateral coordination and oversight group*, sebagai

<sup>117</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 50.

<sup>118</sup> *Ibid.*

saluran dialog tingkat tinggi antara Seoul, Washington dan Tokyo untuk menyatukan persepsi dan kebijakan terhadap Korea Utara.

- Meminta kongres Amerika Serikat agar memberi dukungan terhadap paket usul perdamaian yang dibuat pemerintah Clinton untuk mencegah kemungkinan provokasi militer Korea Utara.<sup>119</sup>

Di pihak lain, negara seperti Jepang yang notabene merupakan negara yang mempunyai perekonomian terkuat di Asia, khususnya Asia Timur, mempunyai perhitungan terhadap Korea Selatan sebagai saingan yang perlu diperhatikan secara perkembangan dalam bidang ekonomi. Jepang sendiri memperhitungkan bagaimana meningkatnya kekuatan kedua Korea, jika bersatu. Gabungan sinergi persatuan (unifikasi) dari dua kekuatan tersebut diperkirakan dapat mampu menyaingi Jepang, dengan demikian analisa terhadap faktor negatifnya, pihak Jepang akan berada posisi untuk tidak menyetujui unifikasi kedua Korea dalam waktu dekat.<sup>120</sup>

Sedangkan bagi Cina, sebagai negara yang dalam waktu sekitar 10 tahun mendatang diperkirakan akan menjadi negara *Superpower* dan merupakan sekutu tradisional bagi Korea Utara, maka sudah pasti mereka akan menempatkan diri dipihak yang berseberangan dengan pihak Amerika Serikat. Hal ini mengingat terpecahnya kedua Korea dalam perbedaan ideologi dan pandangan, tak lain karena persetujuan dua negara besar ini, sehingga diperkirakan dalam kritis Cina tidak akan meninggalkan Korea Utara. Selain itu, Cina yang merasa berkedudukan sama dengan pihak Amerika Serikat, maka Cina akan selalu menunjukkan kepada dunia luar dan juga kepada Amerika Serikat bahwa Cina adalah negara *super power* yang sulit didikte oleh pihak Amerika Serikat.<sup>121</sup>

Hubungan tradisional dan historis Korea Utara dengan Cina tetap dekat dan akan berlanjut dengan baik, apalagi setelah runtuhnya Uni Soviet maka hubungan tersebut lebih dekat lagi karena Cina-lah negara yang sangat diandalkan untuk membantu Korea Utara yang terus menerus dilanda kesulitan ekonomi.

<sup>119</sup> *Ibid.*,

<sup>120</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 34.

<sup>121</sup> *Ibid.*

Untuk itu maka pejabat-pejabat baik Korea Utara maupun Cina tetap melakukan kegiatan saling berkunjung,<sup>122</sup> bahkan banyak pengusaha-pengusaha Cina yang berdomisili di Korea Utara untuk mensuplai bahan atau barang-barang yang diperlukan Korea Utara.

Untuk Rusia, yang merupakan sekutu tradisional Korea Utara dan pada periode ini mulai menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan, walaupun masih terdapatnya hambatan-hambatan seperti adanya kasus saling mengusir perwakilan negaranya (korps diplomatik) dan dikecewakannya Korea Selatan karena Rusia menolak ketika Korea Selatan meminta agar pelarian Korea Utara yang melewati daerah Rusia agar diserahkan kepada Korea Selatan. Masih bersikap menunggu dan mengamati situasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, sikap hati-hati ini ditunjukkan Rusia karena situasi perekonomian mereka sendiri kurang baik.<sup>123</sup>

Sedangkan dengan Korea Utara, sejak usainya perang dingin dan bubarnya Uni Soviet maka hubungan Korea Utara dengan Rusia mengalami titik terendah, ditambah dengan pembukaan hubungan diplomatik Rusia-Korea Selatan yang dianggap Korea Utara sebagai pengkhianatan hubungan tradisional diantara keduanya yang telah terjalin puluhan tahun lamanya. Karena pada awalnya, setelah bubarnya Uni Soviet dan Rusia berdiri, negara baru tersebut tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara sekutu Uni Soviet, salah satunya Korea Utara yang banyak mendapat bantuan ekonomi dan teknologi dari negara tersebut. Namun di pertengahan berdirinya negara Rusia, Rusia juga mengalami kesulitan ekonomi dan beberapa tahun terakhir di penghujung abad 20 boleh dikatakan tidak ada bantuan ekonomi yang datang dari Rusia. Untuk memulihkan kembali hubungan tradisional kedua negara, maka beberapa pejabat tinggi mulai melakukan kunjungan ke Korea Utara, seperti kunjungan Presiden Rusia Vladimir

---

<sup>122</sup> Seperti kunjungan terakhir pemimpin besar Korea Utara, Marsenal Kim Jong-il ke Cina pada tanggal 29-31 Mei 2001 dalam rangka memenuhi undangan sekretaris jenderal komite sentral Partai Komunis Cina, Jiang Zemin, yang juga presiden RRC. Kedua belah pihak mengadakan tukar pikiran mengenai kemajuan dan perkembangan hubungan tradisional kedua Negara dan kedua partai (PKC & PPK) serta kehendak untuk lebih mengembangkan hubungan tersebut khususnya dalam pembangunan sosialisme dimasa depan. Kedua Negara juga selain bertukar pikiran sekitar hubungan bilateral kedua Negara dan kedua partai, Korea Utara juga membicarakan perihal rencana berlangsungnya KTT Inter-Korea di Pyongyang yang direncanakan pada tanggal 12-14 Juni 2000. Lihat KBRI Seoul, Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti), *op.cit.*, h. 6-7.

<sup>123</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 34.

Putin ke Pyongyang pada tanggal 10-20 Juli 2000. Pada pertemuan yang berlangsung dalam suasana bersahabat dan akrab tersebut, telah dibicarakan berbagai hal menyangkut situasi dalam negeri masing-masing serta mendiskusikan upaya-upaya dalam mengembangkan dan memperluas hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara khususnya tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama, yaitu keamanan wilayah Asia Timur dan semenanjung Korea. Pertemuan dan pembicaraan antara Vladimir Putin dan Kim Jong-il tersebut diakhiri dengan menandatangani sebuah "*Joint Declaration*" yang isi pokoknya adalah pernyataan sikap kedua negara yang menentang dan mengutuk terorisme internasional, kesepakatan untuk mulai menjalin kembali kerjasama ekonomi, penegasan sikap untuk mempertahankan perjanjian "*Anti-Balistic Missile*", menyambut dan mendukung hasil-hasil KTT Inter-Korea tanggal 13-15 Juni 2000, serta keinginan membina hubungan persahabatan, bertetangga baik sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara kedua negara tanggal 9 Februari 2000, serta kerjasama dalam bidang-bidang IPTEK, budaya dan pendidikan.<sup>124</sup>

Kunjungan presiden Rusia ini mempunyai arti penting bagi kedua negara karena ini merupakan kunjungan pertama pemimpin tertinggi Rusia sejak terpecahnya Uni Soviet. Dengan terjadinya kunjungan ini, kiranya pemerintah Korea Utara mengharapkan hubungan historis antara kedua negara yang sempat "dingin" dapat kembali ditingkatkan. Dapat pula dikatakan bahwa Korea Utara tengah memperkuat posisinya baik dalam aspek politik dan militer dengan mendekati Rusia yang pada saat bersamaan ingin kembali menempatkan dirinya sebagai salah satu aktor kunci dalam perimbangan strategis (politik dan militer) di semenanjung Korea dan Asia Timur pada umumnya. Upaya kearah ini nampak semakin dekatnya Rusia dan Cina serta diikuti pula dengan bergabungnya Korea Utara. Dalam konteks perimbangan kekuatan di kawasan hal ini kiranya dapat dilihat sebagai sebuah aliansi segitiga baru (Rusia-Cina-Korea Utara) yang diindikasikan bermaksud mengimbangi aliansi Amerika Serikat Jepang dan Korea Selatan yang terlebih dahulu mapan. Dalam kaitannya dengan KTT Inter-Korea

---

<sup>124</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2000: Jilid II (Periode April – Desember 2000)*, op.cit., h. 39-40.



beberapa waktu lalu, kedekatan Korea Utara dengan Rusia dan Cina pada yang bersamaan menunjukkan bahwa Korea Utara ingin meningkatkan pengaruhnya pada saat berhadapan dengan Korea Selatan maupun dengan Amerika Serikat dan Jepang.<sup>125</sup>

Hubungan Korea Utara dengan Jepang selalu diwarnai oleh dinamika yang sangat beragam, meskipun tetap diisi oleh berbagai rektorika, namun pada tahun 2002 hubungan diantara kedua sedikit mencair ketika perdana menteri Junichiro Koizumi dengan pemimpin besar Korea Utara, Marsekal Kim Jong-il, pada bulan September 2002 melakukan pertemuan di Pyongyang, Korea Utara yang pada akhir pertemuan kedua pemimpin menandatangani sebuah Deklarasi Bersama yang secara resmi dinamakan sebagai *The DPRK-Japan Pyongyang Declaration*.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>126</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2002: Buku II (Kegiatan Operasional)*, Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2002, h. 26-27.

## BAB 3

### SITUASI DAN KONDISI DI SEMENANJUNG KOREA SEBELUM DAN SESUDAH KTT INTER-KOREA

#### 3.1 Inisiatif Penyelenggaraan KTT Inter-Korea

Inisiatif penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ini pada dasarnya muncul ketika kedua negara bersaudara ini membutuhkan momentum untuk meredakan perselisihan diantara keduanya. Dalam perspektif Korea Utara, penyelesaian masalah yang berkepanjangan mereka dengan Korea Selatan dilatar belakangi oleh keinginan Korea Utara untuk mengurangi permasalahan dalam negeri mereka yang terus mengancam kelangsungan hidup rakyat mereka pada akhir abad ke-20. Masalah *famine* atau bencana kelaparan merubah kebijakan luar negeri Korea Utara dengan idealisme yang tetap mempertahankan *national identity* mereka. Dalam hal ini, Korea Utara mengambil kebijakan bahwa dengan bantuan asinglah, bencana kelaparan yang sedang mereka alami dapat teratasi. Sebagai fokus utama adalah mencoba menormalisasi hubungan mereka dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai aktor yang berpengaruh dalam peta geopolitik serta kekuatan ekonomi di dunia internasional.

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat-Tinggi (*Summit*) Inter-Korea Utara dan Korea Selatan di ibukota Korea Utara, Pyongyang. Pada awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2000, namun atas usul Korea Utara maka KTT berhasil diselenggarakan pada tanggal 13-15 Juni 2000. KTT ini merupakan sejarah penting dalam hubungan antara kedua negara yang bermusuhan sejak lebih kurang selama 50 tahun. Dengan adanya kesepakatan kedua Korea untuk mengadakan pertemuan ini, merupakan suatu perubahan dan kecenderungan baru di Korea Utara untuk membuka diri terhadap dunia internasional dan melepaskan diri dari politik isolasinya selama ini, tanpa melepaskan identitas mereka sebagai salah satu negara komunis yang masih tegak berdiri. Kecenderungan ini nampak pula dari indikasi yang antara lain adanya kesediaan diri Korea Utara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara sejak awal tahun 2000, seperti negara-negara di ASEAN, Australia dan negara-negara di Eropa. Walaupun yang terutama adalah kesediaan diri Korea Utara untuk membuka diri

terhadap saudaranya yang selama ini menjadi lawan dalam pertikaianya dan menyambut tawaran pemerintah Korea Selatan untuk mengadakan *Summit* antara kedua negara (Korea Utara-Korea Selatan) pada tanggal 13-15 Juni 2000.<sup>124</sup>

Sebagai pertemuan pertama kali yang terjadi antara pemimpin tertinggi kedua negara sejak pecahnya semenanjung Korea pada perang tahun 1950-1953, maka pertemuan ini dapat dikatakan sebagai pertemuan bersejarah yang tak diduga sebelumnya dapat terlaksana. Namun demikian, antara pemerintah dan rakyat Korea Utara nampak menunjukkan rasa persahabatan dan sambutan yang meriah dengan menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung ke Pyongyang untuk berkomitmen terhadap penyelenggaraan KTT Inter-Korea tersebut.<sup>125</sup>

Tanggal 13 Juni 2000, pukul 10.30 waktu Korea Utara, pesawat Presiden Kim Dae-jung bersama anggota delegasinya, antara lain istrinya, Menteri Unifikasi, Pak Jae-gyu, Menteri Keuangan dan Ekonomi Ri Han-jae, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Ji-won dan Assisten Khusus Kim Dae-jung, Rim Tong-won berhasil mendarat di bandara Sun'an Pyongyang dan disambut langsung oleh pemimpin besar Korea Utara, Kim Jong-il di depan tangga pesawat. Dalam pertemuan kedua pemimpin ini tidak nampak suasana negara yang sedang berkonflik, bahkan Marsekal Kim Jong-il justru memperlihatkan sikap yang sangat *welcome* dan penuh senyum kepada Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung. Dengan rasa percaya diri Kim Jong-il mengarahkan Presiden Kim Dae-jung untuk memeriksa barisan kehormatan diatas karpet merah. Kemudian Kim Jong-il memperkenalkan Presidium *Supreme People Assembly* (SPA) Kim Yong-nam, Wakil Ketua Pertama Komisi Pertahanan Nasional Jo Myong-rok, Direktur Jenderal Departemen Politik Tentara Rakyat Korea (TRK), Chae Thae-bok, Ketua SPA, Kim Kuk-thae, Sekretaris Partai Pekerja Korea, Kim Yong-sun, Sekretaris Presidium SPA Kim Yong-dae dan para anggota kabinet, anggota parlemen serta pejabat tinggi lainnya. Turut dipersiapkan pula barisan wanita dan pria yang berpakaian tradisional Korea menyambut delegasi Korea Selatan dengan ayunan

<sup>124</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2000: Jilid II (Periode April-Desember 2000)*, *op.cit*, h. 14-15.

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 15.

bunga dan mengelu-elukan kedua pemimpin. Suasana penyambutan yang sangat meriah dan penuh haru tersebut tidak saja terlihat di bandara, namun juga disepanjang jalan yang dilalui Presiden Kim Dae-jung yang didampingi Kim Jong-il dalam mobil yang sama dan menuju tempat penginapan para tamu tertinggi negara, yaitu wisma tamu negara, Pyongyang, delegasi Korea Selatan disambut dan dielu-elukan oleh sekitar 600.000 masyarakat kota Pyongyang yang secara khusus dipersiapkan dalam penyambutan kedatangan delegasi Korea Selatan. Penjagaan ketat juga terlihat dengan adanya 2 orang polisi di tiap jarak 100 meter sepanjang jalan di bandara Sun'an menuju kota Pyongyang. Bahkan bagi rakyat Korea Utara yang tinggal disepanjang jalan itu tidak diperkenankan untuk keluar rumahnya masing-masing. Dari situasi dan kondisi tersebut sangat terlihat betapa besarnya harapan rakyat Korea akan keberhasilan KTT ini di masa mendatang. Jamuan makan dan berbagai kegiatan dalam kunjungan presiden Korea Selatan merupakan kesempatan penting sebagai momentum reunifikasi dan kemakmuran bangsa Korea yang dinantikan oleh 70.000.000 rakyat di semenanjung Korea yang sudah terpisah dan menginginkan reunifikasi untuk diwujudkan. Sementara itu dalam pidato balasannya, Presiden Kim Dae-jung menyampaikan pengharapan yang tulus atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kim Jong-il dan seluruh warga Korea Utara. Melalui kunjungan dan rencana pertemuannya dengan Kim Jong-il dan seluruh warga Korea Utara. Melalui kunjungan dan rencana pertemuannya dengan Kim Jong-il, ia berharap bahwa masa depan bangsa Korea dapat diciptakan oleh bangsa Korea sendiri dan kunjungan ini menjadi awal baru bagi era penghapusan segala konfrontasi dan ketidakpercayaan serta mulai membangun rekonsiliasi dan kerjasama.<sup>126</sup>

Pada tanggal 14 Juni bertempat di gedung *Mansudae Hall* (Gedung Parlemen Korea Utara) telah berlangsung pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Kim Dae-jung dan delegasi dengan Presidium SPA Kim Yong-nam yang didampingi para pejabat tinggi Korea Utara. Pada pertemuan tersebut Kim Yong-nam menyatakan bahwa bagi Korea Utara reunifikasi nasional merupakan cita-cita lama yang diwariskan oleh mantan Presiden Kim Il-sung yang kemudian

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 15-17.

diteruskan oleh Presiden Kim Jong-il hendaknya dicapai melalui tiga pokok reunifikasi, yakni tiga prinsip reunifikasi nasional (independensi, reunifikasi secara damai dan penyatuan seluruh bangsa Korea, sepuluh butir program penyatuan menyeluruh bangsa Korea, dan usulan pembentukan sebuah negara "Republik Konfederasi Demokrasi Koryo". Selanjutnya Kim Yong-nam menyebutkan bahwa satu hal yang terpenting dalam mewujudkan reunifikasi nasional adalah meletakkan tanggung jawab sepenuhnya pada kemandirian (tanpa campur tangan pihak lain) dan keberhasilan pembicaraan dalam KTT, dapat dilihat oleh semua pihak di dalam dan luar negeri bahwa bangsa Korea mampu menyelesaikan masalah reunifikasinya sendiri. Kemudian Kim Yong-nam menyatakan pula hendaknya kedua belah pihak dalam mengusahakan reunifikasi ini tidak saling berkonfrontasi, tetapi sebagai suatu bangsa walaupun berbeda dalam ideologi dan sistem sosialnya. Presiden Kim Dae-jung juga dalam tanggapannya menyatakan rasa terima kasih yang tulus kepada Presiden Kim Jong-il dan semua warga Pyongyang yang telah menyambut delegasi Korea Selatan dengan hangat, dan tidak ia duga sebelumnya bahwa Presiden Kim Jong-il akan menyambutnya langsung di bandara Sun'an dan masyarakat Pyongyang menyambut demikian hangat yang menunjukkan keinginan yang kuat kedua belah pihak untuk mewujudkan reunifikasi dan sekaligus memperlihatkan bahwa kedua negara adalah satu bangsa. Kim Dae-jung selanjutnya menyatakan bahwa apabila Korea Utara dan Korea Selatan menggabungkan kekuatannya bersama-sama dalam era milenium baru, maka Korea akan menjadi satu negara yang diperhitungkan di dunia dan tidak akan tertinggal di belakang negara lainnya, terutama di Asia.<sup>127</sup>

Tanggal 15 Juni merupakan akhir dari KTT Inter-Korea yang menghasilkan "Deklarasi Bersama" diantara kedua Korea. Presiden Kim Dae-jung dan rombongannya berangkat meninggalkan Pyongyang dan kembali menuju Seoul. Sebagaimana sewaktu tiba, pada saat kepulangannya ke Seoul pun dari tempat penginapan sudah dieluk-elukan oleh sekitar 500.000 masyarakat Pyongyang dan demikian pula di bandara Sun'an, Pyongyang, Presiden Kim Dae-

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 17.

jung dilepas dengan upacara yang meriah. Presiden Kim Jong-il sendiri melepas hingga ke tangga pesawat Sebelum naik pesawat, Presiden Kim Dae-jung bersalaman dan berpelukan dengan Presiden Kim Jong-il, dan Kim Jong-il sendiri menyatakan kepuasannya atas keberhasilan KTT ini sebagai permulaan yang baik menuju reunifikasi kedua Korea. Demikian juga, Kim Dae-jung menyatakan rasa puasnya atas penyambutan dan penyelenggaraan serta hasil KTT yang dicapai.<sup>128</sup>

### 3.2 Faktor-faktor Pendukung Penyelenggaraan KTT Inter-Korea

Terdapat beberapa faktor pendukung penyelenggaraan KTT Inter-Korea tahun 2000, salah satunya adalah pertemuan antar pejabat-pejabat eksekutif KEDO<sup>129</sup> dengan Korea Utara yang diadakan pada tanggal 29 Februari 2000 di Pyongyang telah menghasilkan persetujuan pembukaan jalur perjalanan ferry langsung antara pelabuhan *Sokcho*, Korea Selatan dan *Yanghwo*, Korea Utara. Pembukaan jalur perjalanan ferry langsung ini merupakan sebagai pintu gerbang bagi pengiriman peralatan dan bahan-bahan untuk membangun dua proyek LWR<sup>130</sup> Korea Utara. Dengan disetujuinya pembukaan jalur perjalanan ferry ini, maka akan dapat mengurangi waktu perjalanan 5 jam dan pada dibuka pada tahun tersebut. Selain itu, persetujuan ini juga merupakan implementasi dari terbukanya kembali jalur-jalur transportasi dari wilayah Korea Selatan ke Korea Utara yang sempat tertutup bagi keduanya.<sup>131</sup>

Pada tanggal 14 Agustus 1999, Parlemen meratifikasi perjanjian pemerintah Korea Selatan untuk memberikan pinjaman dana sebesar US\$ 3,22 miliar kepada KEDO guna membiayai 2 proyek LWR Korea Utara dari biaya keseluruhan sebesar US\$ 4,6 miliar. Menurut perjanjian tersebut, Korea Utara akan mengembalikan pinjaman secara angsuran kepada KEDO selama 20 tahun setelah perpanjangan selama 3 tahun dan apabila Korea Utara gagal mengembalikan pinjaman tersebut, maka KEDO akan mengambil alih

<sup>128</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>129</sup> *Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO)*, sebuah konsorsium yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang untuk melaksanakan isi *Agreement Framework 1994* yang terkait dengan pengadaan energi air ringan bagi kebutuhan energi Korea Utara. Lihat Larry A. Niksch, *op.cit.* hal. 11.

<sup>130</sup> *Light Water Reactor (LWR)*. Proyek pengadaan energi air ringan bagi kebutuhan energi Korea Utara dan merupakan implemetasi dari *Agreement Framework 1994* antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. *Ibid.*

<sup>131</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 9-10.

tanggungjawabnya. Selain itu Parlemen Jepang juga telah meratifikasi perjanjian pemerintah Jepang untuk memberikan pinjaman dana kepada KEDO sebesar US\$ 1 miliar.<sup>132</sup>

Pada tanggal 15 Desember 1999, KEPCO telah menandatangani kontrak dengan KEDO untuk membangun reaktor nuklir air ringan (LWR) Korea Utara. Penandatanganan kontrak LWR senilai US\$ 4,6 miliar diadakan di Seoul antara Direktur Eksekutif KEDO Desaix Anderson dan dihadiri oleh 12 Dubes dari negara-negara anggota KEDO. Pejabat KEPCO mengatakan bahwa pekerjaan persiapan untuk pembangunan dua LWR di Komho, Hamgyong-do, Korea Utara sedang dikerjakan sejak bulan Agustus 1997 dan dengan ditandatanganinya kontrak tersebut merupakan tanda-tanda resmi dilakukannya pekerjaan konstruksi KEPCO. Pada kesempatan upacara penandatanganan tersebut, Direktur Eksekutif KEDO Anderson mengatakan KEPCO telah melengkapi semua kewajibannya dalam pekerjaan persiapan untuk membangun dua LWR dan tidak meragukan lagi bahwa KEDO akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan hasil baik. KEPCO telah menjadi kontraktor utama dalam konstruksi pembangunan dua LWR yang berkekuatan 1000-2000 megawatt sesuai kontrak dengan konsorium yang diketuai AS dan berharap akan menjadi katalisator utama dalam perbaikan hubungan antara Korsel dan Korea Utara. Walaupun pemerintah Korea Utara juga pada saat itu menyatakan kekhawatirannya akan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut, namun proyek tersebut membuka jalannya proses dialog dan hubungan yang cukup diantara Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>133</sup>

Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara merupakan inti diplomasi Seoul dalam abad ke-21. Kebijakan yang dinamakan *Sunshine Policy* dan bertujuan membujuk Korea Utara untuk dapat merubah sikapnya yang konfrontatif. Pemerintah Korea Selatan yang dipimpin Presiden Kim Dae-jung terus mendorong *Sunshine Policy* untuk dapat memajukan kerjasama dan rekonsiliasi antar kedua Korea guna menuju kearah perdamaian dan reunifikasi. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Berlin di bulan Maret 2000, pemerintah Korea Selatan tetap membantu Korea Utara menanggulangi bahaya kelaparan dan

---

<sup>132</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 54.

<sup>133</sup> *Ibid.*

krisis ekonominya, meskipun mendapat tekanan oleh provokasi Korea Utara. Saat itu pemerintah Korea Selatan lebih berupaya untuk mengakhiri konfrontasi Perang Dingin di semenanjung Korea dan memantapkan perdamaian. Upaya-upaya dalam mewujudkan hal-hal tersebut, dilakukan dalam implementasi *Sunshine Policy* yang berupa diplomasi aktif dan penggunaan kekuatan ekonomi Korea Selatan. Diplomasi yang dilakukan Korea Selatan secara komprehensif mendapatkan dukungan dari negara-negara sahabatnya. Dukungan tersebut muncul, karena Korea Selatan dianggap cukup berhasil dalam mengubah sikap Korea Utara sehingga mau menerima tawaran pemerintah Korea Selatan untuk mengadakan dialog tingkat tinggi diantara kedua negara.<sup>134</sup> Kebijakan *Sunshine Policy* ini ditujukan untuk mewujudkan sebuah paradigma baru dalam hubungan antara kedua Korea, yaitu atas dasar saling mengakui masa depan rakyat Korea, kerjasama lebih baik daripada konflik, dan damai lebih baik daripada perang. *Sunshine Policy* diharapkan akan membuat adanya kontak hubungan antara rakyat kedua Korea menuju hubungan yang stabil dan mengurangi resiko konflik. Kebijakan ini dijadikan inti diplomasi Seoul dalam abad milenium baru, yang diprioritaskan untuk memperbaiki hubungannya dengan Pyongyang melalui bantuan pembangunan ekonomi dan usaha mengajak Korea Utara menjadi bagian dari komunitas internasional serta mewujudkan hidup berdampingan secara damai diantara kedua Korea. Sejak Presiden Kim Dae-jung dilantik, pemerintah Korea Selatan telah memajukan kebijakan *Sunshine Policy*-nya terhadap Korea Utara dengan tujuan :

- a. Menghilangkan struktur perang dingin di semenanjung Korea dan memajukan kerjasama serta rekonsiliasi antara kedua Korea.
- b. Pemerintah Korea Selatan terus mendorong *Sunshine Policy*-nya dengan asumsi bahwa Korea Utara tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengubah sikapnya yang konfrontatif dan menerima usulan perdamaian yang ditawarkan Korea Selatan.

---

<sup>134</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, op.cit., h. 6.



- c. Meminta Korea Utara agar tidak melakukan agresi militernya ke Korea Selatan dan apabila terjadi perang di semenanjung Korea, maka hal tersebut merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat diampuni.<sup>135</sup>

Menteri luar negeri dan perdagangan Korea Selatan Hong Soon-young dalam pesannya pada peringatan HUT PBB ke-55 meminta Korea Utara agar menanggalkan kebijakan militernya dan mencurahkan perhatiannya terhadap sektor pertanian yang produktif. Korea Selatan siap memberikan bantuan kepada Korea Utara, jika Korea Utara mau mengubah sikap dan menyangkal tuduhan yang menurut Korea Selatan tidak mempunyai niat baik. Dalam hal ini Korea Utara menuduh bahwa *Sunshine Policy* yang diterapkan oleh Korea Selatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan antagonisme, konfrontasi dan juga untuk menguasai Korea Utara. Oleh karena itu, menteri luar negeri dan perdagangan Korea Selatan menegaskan bahwa *Sunshine Policy* bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi Korea Utara dan membantu Korea Utara untuk menjadi komunitas internasional serta membangun hidup berdampingan secara damai antara kedua Korea. Begitu pula dengan sikap yang dikemukakan Perdana Menteri Korea Selatan Kim Jong-pil dalam pesannya pada hari kebangkitan nasional tanggal 3 Oktober 1999 yang meminta Korea Utara dapat melaksanakan perjanjian dasar Korea Selatan-Korea Utara yang telah ditandatangani pada tahun 1992 untuk membuka era rekonsiliasi dan kooperasi antar kedua Korea. Perdana Menteri Ki menegaskan bahwa kini waktunya telah tiba bagi kedua Korea secara bersama-sama untuk mengakhiri dan menghilangkan warisan perang dingin di semenanjung Korea. Korea Selatan akan berupaya terus untuk memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara, dan akan terus bekerjasama dengan para sekutunya dalam mensukseskan *Sunshine Policy* sementara itu memperkuat pertahanan nasionalnya.<sup>136</sup>

Dalam pesan yang selalu disampaikan setiap awal tahun baru oleh presiden-presiden di tiap-tiap negara, kali ini Presiden Kim Dae-jung menjanjikan akan memperluas hubungan non-pemerintah (*Non-Governmental Diplomacy*),

---

<sup>135</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 29.

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 30.

diantaranya meneruskan upaya yang pernah dilakukan mantan Presiden Korea Selatan sebelumnya Roh Tae-woo, yaitu membantu keluarga Korea yang terpisah melalui segala cara. Korea Selatan berupaya mengadakan perundingan dengan pihak Korea Utara untuk bekerjasama dalam mewujudkan pertemuan keluarga yang terpisah, dan menjanjikan bantuan pupuk untuk Korea Utara dalam menanggulangi masalah pertaniannya.<sup>137</sup>

Keberhasilan *Sunshine Policy* Korea Selatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh perbaikan hubungan antara Amerika Serikat, Jepang dengan Korea Utara, yang dimana ketiga negara tersebut pada saat itu sedang melakukan perundingan dalam upaya menormalisasikan hubungan diplomatik. Dukungan Korea Selatan terhadap upaya-upaya normalisasi hubungan diplomatik ketiga negara tersebut adalah sesuai dengan kebijakan yang menganjurkan negara-negara sekutunya tersebut untuk dapat membuka kembali hubungan diplomatik dan dialog dengan Korea Utara.<sup>138</sup>

Dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya perdamaian abadi dan stabilitas keamanan di semenanjung Korea, pada tahun 1999 telah dilakukan dialog empat negara (Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat dan Cina). Dialog ini merupakan dialog yang keenam kalinya, dan berhasil di Jenewa, walaupun pertemuan yang keenam kalinya tersebut belum membuahkan hasil yang berarti. Pada dialog tersebut, Korea Selatan mengusulkan kembali bahwa antara Korea Selatan dengan Korea Utara harus dapat membentuk perjanjian perdamaian yang baru, yang meliputi unsur non-agresi dan penyelesaian konflik permasalahan secara proses damai. Namun usulan tersebut justru bertolak belakang dengan Korea Utara yang masih menegaskan bahwa mereka akan tetap memasukkan dalam *rundown* acara dialog mengenai penarikan 37.000 pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan dan dialog yang harus ditandatangani oleh Korea Utara dan Amerika Serikat akan tetapi malah ditolak oleh Korea Selatan.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 6.

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 7.

Tentara Sekutu pimpinan Amerika Serikat yang menurut Korea Selatan telah menyelamatkan mereka dalam perang Korea tahun 1950-1953, dan ikut menjaga, memelihara keamanan dan berusaha menanamkan pengaruh paham liberal di semenanjung Korea hingga saat ini, telah membuat Korea Selatan memberikan prioritas utama dalam hubungan luar negerinya dengan Amerika Serikat. Hubungan persekutuan yang telah lama dijalin tersebut, dianggap Korea Selatan mempunyai arti penting, baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan dan keamanan (militer), maupun dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan dan memelihara hubungan tradisionalnya tersebut dengan Amerika Serikat. Presiden Kim Dae-jung pada tanggal 2 Juli 1999 melakukan kunjungan resmi kenegaraan yang kedua ke Amerika Serikat untuk meminta dukungan politik terhadap upaya-upayanya tersebut dalam mewujudkan tercapainya rezim perdamaian baru dan stabilitas di semenanjung Korea serta mewujudkan tercapainya rekonsiliasi dan hidup berdampingan secara damai diantara kedua Korea yang selama ini hidup dibawah konflik berkepanjangan.<sup>140</sup>

Dalam kunjungannya selama dua hari tersebut dan atas undangan presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Bill Clinton, dapat dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Kedua kepala negara sepakat untuk bekerjasama dalam mencegah Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba peluncuran rudalnya kembali, serta memperingatkan Korea Utara jika tetap melakukan uji coba rudalnya, maka hal tersebut akan dapat mengancam perdamaian dan stabilitas yang bukan saja di semenanjung Korea tetapi juga di Asia Timur Laut yang juga akan berpengaruh pada kepentingan Korea Selatan dalam menjaga hubungan baiknya dengan Amerika Serikat dan Jepang.
2. Presiden Clinton menegaskan kembali komitmennya bahwa Amerika Serikat akan terus melindungi keamanan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara seperti yang telah diperlihatkan sewaktu terjadinya insiden saling tembak antara kapal patroli angkatan

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

Korea Selatan dengan Korea Utara di laut barat pada bulan Juli dimana Amerika Serikat telah mengirimkan armadanya ke laut Korea Selatan, dan terus mendukung sepenuhnya *Sunshine Policy* yang digunakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.

3. Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat mempercepat upaya-upaya perbaikan jarak rudal Korea Selatan yang pengembangannya telah diawasi dibawah perjanjian Seoul-Washington. Dalam prinsipnya Washington menyetujui Seoul mengembangkan rudalnya dengan jarak sampai 300 km, meskipun kedua negara perlu lebih lanjut merundingkan hal tersebut secara transparan.
4. Presiden Kim Dae-jung menegaskan kembali komitmennya bahwa Korea Selatan dengan Amerika Serikat akan terus memelihara postur pertahanan gabungan yang kuat untuk menangkal provokasi Korea Utara, dan kedua pemimpin mempunyai pandangan yang sama bahwa kedua negara perlu untuk saling mendukung kebijakannya terhadap Korea Utara secara konsisten dan terus menerus.
5. Presiden Clinton menegaskan kembali komitennya bahwa Washington mendukung sepenuhnya *Sunshine Policy* yang digunakan Korea Selatan terhadap Korea Utara, dan memperkuat hubungan persekutuan keamanan bilateral yang bertujuan untuk menjamin perdamaian abadi dan stabilitas di semenanjung Korea.
6. Presiden Kim Dae-jung menegaskan bahwa Korea Selatan akan berupaya menyukseskan *Sunshine Policy*-nya atas dasar keamanan yang solid dan konsistensi.
7. Kedua belah pihak sependapat bahwa kedua negara harus menandatangani perjanjian investasi bilateral dan presiden Kim Dae-jung berjanji akan terus memperbaiki lingkungan usaha bagi investasi asing. Korea Selatan dengan Amerika Serikat juga menyambut baik perundingan perjanjian jaminan sosial bersama yang bertujuan untuk meringankan pengusaha dari pembayaran pajak jaminan sosial kedua negara.

8. Kedua presiden sepakat memperluas program *business visa referral*, dan presiden Kim Dae-jung berjanji akan terus mendorong reformasi dalam bidang finansial, korporasi, perburuhan dan sektor umum. Presiden Clinton memuji program reformasi restrukturisasi yang telah dilakukan Korea Selatan untuk mengatasi krisis, dan Washington mendukung program yang sedang berjalan tersebut. Kedua pihak juga sepakat melakukan upaya-upaya bersama untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.
9. Pada kesempatan kunjungannya ke Amerika Serikat tersebut, Presiden Kim Dae-jung menerima hadiah *The 1999 Philadelphia Liberty Medal* dari Walikota Philadelphia Edward G. Rendell atas prestasi memajukan demokrasi dan HAM di Korea Selatan. Presiden Kim Dae-jung dalam pidatonya berjanji akan terus mengembangkan pembangunan demokratisasi dan HAM di Korea Selatan, dan hadiah yang ia terima sebesar US\$ 100.000 akan disumbangkan kepada *Forum of Democratic Leaders in the Asia-Pacific Region (FDL-AP)* yang ia dirikan pada tahun 1994 bersama dengan pemimpin-pemimpin Asia Pasifik, termasuk mantan Presiden Filipina Corazon Aquino. Dipilihnya ia sebagai penerima medal diakhir abad ke-20 ini merupakan suatu kehormatan bagi Korea Selatan yang telah dapat mencapai kebebasan demokrasi dan menghargai Hak Asasi Manusia.<sup>141</sup>

Di ruang lingkup kebijakan politik dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Korea Selatan menunjukan kebijakannya pada peningkatan hubungan kerjasama luar negeri (yang cukup erat) dengan negara-negara di kawasan Asia timur laut, terutama dengan Jepang, yang tak lain juga merupakan sekutu dan negara yang pasca perang dunia II dikontrol oleh Amerika Serikat, baik secara militer maupun ekonomi. Begitupun dengan Cina dan Rusia, yang telah mereka normalisasi hubungan luar negerinya. Dalam hubungan luar negerinya dengan Jepang, Korea Selatan menganggap hal ini

<sup>141</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 31-33.

sebagai suatu hal penting, bukan hanya sama-sama sekutu dari Amerika Serikat, akan tetapi juga suatu hasil yang baik, mengingat kedua negara bila dilihat dari perspektif historis, merupakan negara (Korea Selatan) yang mempunyai hubungan kelim dengan Jepang di masa Perang Dunia II. Namun pasca kontrolisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Hubungan kedua negara dapat dikatakan telah membaik dan berjalan lancar. Hal tersebut ditandai dengan adanya kunjungan timbal-balik yang dilakukan pejabat tinggi antar kedua negara.<sup>142</sup> Hal terpenting yang dibahas adalah mengenai masa depan Korea Selatan dengan Korea Utara yang akan berdampak pada masalah keamanan di kawasan serta memperlancar hubungan kerjasama dengan tiga negara di kawasan Asia timur laut atas dasar pendekatan yang komprehensif terhadap Korea Utara. Selain itu, hal lain yang terpenting adalah dukungan terhadap upaya-upaya normalisasi hubungan luar negeri Jepang dengan Korea Utara yang diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan Korea Utara terhadap Korea Selatan serta membantu membuka hubungan antara Korea dan menjamin perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea.<sup>143</sup>

Dalam mendukung hal tersebut, hubungan mereka dengan Rusia juga mulai dinormalisasi kembali. Kunjungan Presiden Kim Dae-jung ke Rusia pada tanggal 27 Mei 1999, merupakan momentum baik bagi kedua negara untuk memulai kembali hubungan yang lebih bersahabat lagi setelah kasus skandal spionase bulan Juni 1998, dimana kedua negara saling mengusir diplomatnya. Tampaknya Korea Selatan mulai memikirkan kembali pentingnya Rusia untuk ikut dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan melalui dukungan terhadap tawaran Rusia untuk membentuk konferensi enam negara (Rusia, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara).<sup>144</sup> Korea Selatan mengharapkan Moskow dapat memainkan peranan positifnya dalam membujuk Korea Utara untuk dapat bekerjasama dalam upaya mewujudkan rezim

---

<sup>142</sup> Kunjungan kerja PM Kim Jong-pil ke Jepang pada tanggal 1 September 1999 dan Penyelenggaraan pertemuan ke-II tingkat menteri antara Korea Selatan dengan Jepang pada tanggal 24 Oktober 1999, yang dihadiri oleh PM Jepang, Keizo Obuchi, *ibid.*, h. 8.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Kelak nantinya tawaran tersebut direalisasikan dan dikenal dengan nama *Six Party Talks*. *Ibid.*, h. 9.

perdamaian baru di semenanjung Korea.<sup>145</sup> Sejalan dengan Korea Selatan, pihak Rusia juga ingin memperkuat hubungan dan kerjasama ekonominya dengan Korea Selatan dan Korea Utara dalam *Tripartite Cooperation*. Rencana kerjasama transportasi jalur kereta api Inter-Korea (yang merupakan implementasi dari KTT Inter-Korea) dengan *Trans-Siberia Railway (TSR)* dan pengiriman pasokan gas alam ke Korea Selatan melalui pipa yang melintasi Korea Utara juga menjadi perhatian kedua negara (Rusia dan Korea Selatan). Berbagai manfaat akan diraih jika jalur kereta api Inter-Korea dan TSR benar-benar terealisasi. Arus Transportasi dari Asia ke Eropa dan sebaliknya akan lebih efisien dan hemat, serta sekaligus membantu Korea Utara dalam meningkatkan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja. Presiden Kim Dae-jung sendiri memandang prospek jalur transportasi kereta api tersebut sebagai *iron silk road* yang akan menghubungkan wilayah Eropa, Asia Pasifik dimana Rusia dan Korea berada ditengah-tengahnya.<sup>146</sup>

Begitupula dengan hubungan antara Korea Selatan dan Cina yang semakin membaik. Presiden Kim Dae-jung dalam pertemuannya dengan Presiden Cina, Jiang Zemin pada kesempatan menghadiri pertemuan kepala-kepala negara APEC di Auckland, Selandia Baru tanggal 12 September 1999, memuji upaya-upaya yang telah dilakukan Cina untuk memajukan dialog antar Korea dan membujuk Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba rudalnya. Kedua pemimpin tersebut juga menyepakati untuk terus membangun dan memperkuat hubungan persahabatan Seoul-Beijing. Presiden Kim Dae-jung menegaskan kembali posisi pemerintahnya bahwa Seoul tetap mendukung *One China Policy*. Presiden Jiang Zemin menyatakan bahwa Cina tetap mendukung upaya-upaya perdamaian yang sedang dilakukan Korea Selatan dan akan memainkan peranan yang konstruktif dalam memajukan hubungan antara kedua Korea. Pada awalnya, masalah dikembalikannya 7 pengungsi warga Korea Utara oleh pemerintah Cina ke Korea Utara dan masalah meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh warga Cina maupun Cina etnik Korea terhadap pengusaha dan wisatawan Korea Selatan di Cina, menyebabkan hubungan kedua negara agak terganggu. Korea Selatan

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 36.

sebelumnya sudah meminta Cina agar memperlakukan mereka secara manusiawi dan melindunginya, sebab Korea Selatan khawatir bila mereka (7 pengungsi) dikembalikan ke Korea Utara akan dihukum mati.<sup>147</sup> Namun dalam upayanya memperbaiki hubungannya dengan Cina yang disebabkan oleh kasus-kasus tersebut, pemerintah Korea Selatan pada tanggal 2 Februari 2000 mengirim utusan khusus Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Jang Jae-ryong ke Cina untuk membicarakan langkah-langkah perbaikan hubungan bilateral kedua negara yang sempat terganggu. Dalam pertemuan antara Jang dan rekannya Wan Yi telah disepakati pembentukan saluran dialog untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda dengan lancar di masa mendatang.<sup>148</sup>

Korea Selatan juga meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasamanya dengan negara-negara Uni Eropa, seperti Itali, Perancis, Jerman dan Vatikan. Presiden Kim Dae-jung disertai delegasinya mengadakan kunjungan kenegaraannya ke negara-negara tersebut pada bulan Maret 2000. Upayanya tersebut juga tak lain untuk mendapatkan dukungan terhadap *Sunshine Policy* yang mereka usung. Presiden Kim Dae-jung menggunakan momentum tersebut untuk mengeluarkan Deklarasi Berlin yang berisikan empat butir usulan perdamaian terhadap Korea Utara serta menyampaikan aspirasi Korea Selatan terhadap upaya bersatunya kembali kedua Korea kembali secara damai, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat di semenanjung Korea.<sup>149</sup>

Dari dalam negeri sendiri, Korea Selatan diawal tahun 2000 mempunyai sasaran utama reformasi pemerintah Korea Selatan dalam mewujudkan pemerintah yang kecil namun juga bersih dan efisien dengan pelayanan yang baik bagi rakyatnya. Selain itu, lima tugas pemerintah Korea Selatan yang merupakan faktor dalam negeri adalah mewujudkan masyarakat intelektual Korea yang

---

<sup>147</sup> Pada tanggal 14 Januari 2000, Presiden Kim Dae-jung telah mengganti Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hong Soon-young dengan Lee Joung-binn yang berusia cukup tua, 63 tahun. Penggantian tersebut sehubungan dengan adanya tuntutan dari partai oposisi GNP yang menilai kegagalan diplomasi Menludag Korea tersebut dalam menangani masalah pengungsi warga Korea Utara di Cina sehingga pengungsi warga Korea Utara tersebut dikembalikan ke Korea Utara oleh pihak Cina. Lihat KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti)*, *op.cit.*, h. 8-9.

<sup>148</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>149</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 41-46.



berbasis pada informasi dan ilmu pengetahuan, mewujudkan ekonomi Korea Selatan menuju peringkat standar dunia dan mengusahakan perdamaian dan kerjasama dengan Korea Utara, serta tetap menjaga dan memelihara hubungan tradisional mereka dengan Amerika Serikat dan Jepang. Selain hal-hal tersebut yang tercermin dalam garis kebijakan politik luar negeri pemerintah Korea Selatan dalam memasuki milenium baru diarahkan untuk memperkuat hubungan tradisionalnya dengan Amerika Serikat dan Jepang, meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan Cina dan Rusia yang ditujukan untuk mencapai terwujudnya rezim perdamaian baru dan stabilitas di semenanjung Korea, memperkuat fondasi ekonomi dan kemampuan diplomatiknya serta ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya internasional untuk mencegah pengembangan senjata pemusnah massal, memainkan peranan penting dalam mewujudkan terbentuknya dialog keamanan Asia Timur Laut sebagai *middle power country*, dan Korea Selatan juga berusaha merealisasikan stabilitas dan perdamaian di semenanjung Korea melalui pendekatan kepada Korea Utara sehingga memungkinkan terselenggaranya pertemuan puncak antara Korea Utara dengan Korea Selatan sebagai upaya untuk menghilangkan struktur perang dingin. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa perdamaian di semenanjung Korea adalah prioritas utama bagi stabilitas di Asia Timur Laut, dan oleh karena itu, Korea Selatan bersama para sekutunya berupaya membantu Korea Utara untuk memahami bahwa pada kenyataannya perdamaian abadi dan stabilitas di semenanjung Korea hanya dapat dicapai bila kedua Korea mengadakan suatu dialog dan dapat mencapai suatu kesepakatan. Pemerintah Korea Selatan mempunyai prinsip bahwa masalah Inter-Korea hanya dapat diselesaikan oleh Korea Selatan dan Korea Utara, dan Korea Selatan menyatakan siap membuka dialog-dialog dengan Korea Utara setiap saat.<sup>150</sup>

Sekretaris Presiden Urusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Korea Selatan Hwang Won-taek, dalam keterangan pers-nya tanggal 17 Februari 2000, mengatakan bahwa hubungan Korea Selatan-Korea Utara akan membaik dalam tahun ini atas dasar perkembangan terakhir yang terjadi di sekitar

---

<sup>150</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 28-29.

semenanjung Korea, dimana Amerika Serikat dan Jepang sedang berupaya menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara. Hwang mengindikasikan bahwa Korea Utara sungguh-sungguh berupaya untuk mengakhiri era keterisolirannya dari komunitas internasional. Hwang juga merasa optimis mengenai kemungkinan pertemuan puncak antara Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Diperkirakan dalam tahun ini program pertukaran-pertukaran antar kedua Korea akan tumbuh dengan cepat dan Korea Selatan juga telah mendesak Korea Utara untuk menyusun langkah-langkah guna memajukan pertemuan bagi anggota keluarga yang terpisah.<sup>151</sup>

Kembali ke faktor dalam negeri Korea Selatan, Presiden Kim Dae-jung melihat hasil pemilu 13 April 2000 di Korea Selatan sebagai hal yang perlu dilihat dan perlu dilakukannya dialog serta kerjasama antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi guna menggalang rekonsiliasi dan persatuan dalam menghadapi berbagai isu nasional.<sup>152</sup> Presiden Kim Dae-jung menghimbau pihak oposisi dan masyarakat luas agar meninggalkan segala bentuk konflik dan mendukung pelaksanaan berbagai agenda nasional yang cukup dijalankan pemerintah, seperti diantaranya penyelenggaraan KTT Inter Korea di bulan Juni 2000 serta melanjutkan reformasi ekonomi. Untuk itu, dalam hal ini Presiden Kim Dae-jung mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pimpinan partai politik, mantan presiden, politisi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.<sup>153</sup>

Sebagai realisasi keinginannya untuk mengadakan pertemuan dengan para politisi dan pimpinan partai politik, Presiden Kim Dae-jung pada tanggal 24 April 2000 mengadakan pertemuan dengan pimpinan *Grand National Party* (GNP) Lee Hoi-chang. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan tukar pikiran dan pandangan guna mendapatkan dukungan pihak oposisi terhadap langkah-langkah kebijakan pemerintah yang akan diambil oleh Presiden Kim Dae-jung. Dalam

<sup>151</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>152</sup> Kemenangan *Grand National Party* (GNP) sebagai partai oposisi dalam pemilu 13 April 2000 membuat pihak *Millenium Democratic Party* (MDP) pimpinan presiden Kim Dae-jung mengajak partai oposisi bergabung terutama dalam rencana mereka (MDP) menyelenggarakan KTT Inter-Korea 2000 sebagai isu utama. Lihat KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 3.

<sup>153</sup> *Ibid.*

pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyatakan kepuasannya yang ditandai dengan dikeluarkannya 11 butir kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut antara lain berisi dukungan oposisi terhadap kebijakan Presiden Kim Dae-jung terhadap Korea Utara, khususnya yang menyangkut dengan catatan Korea Selatan tidak akan melakukan kompromi mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan nasional serta hubungan kedua Korea yang harus berdasarkan azas resiprositas. Dan mengenai kekhawatiran oposisi atas rencana *Millenium Democratic Party* (MDP) pimpinan Presiden Kim Dae-jung untuk melakukan koalisi bersama *United Liberal Democrats* (ULD) di parlemen, Presiden Kim Dae-jung berjanji tidak melakukan pembentukan koalisi yang bertujuan membangkitkan kekalahan dari partainya.<sup>154</sup>

Pada tanggal 28 April 2000 Presiden Kim Dae-jung mengadakan pertemuan dengan presiden partai oposisi minoritas ULD, Lee Han-dong di istana kepresidenan Chong Wa-dae. Pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut menghasilkan 8 (delapan) butir pernyataan bersama tanpa adanya kemungkinan kedua partai untuk kembali menjalin koalisi seperti yang pernah terbentuk pada bulan Februari 1998. Isi dari pernyataan bersama tersebut antara lain menegaskan pentingnya kedudukan ULD di dalam Majelis Nasional sebagai penyeimbang dan stabilisator, serta kesediaan kedua belah pihak untuk mengadakan pertemuan serupa jika terdapat hal-hal yang penting yang harus dibicarakan, khususnya yang menyangkut perkembangan dalam negeri dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin ULD, Lee Han-dong juga menyambut baik KTT Inter-Korea bulan Juni 2000 sebagai batu loncatan menuju penyatuan kedua Korea. Seperti halnya dalam pertemuan dengan pemimpin GNP, baik Presiden Kim Dae-jung maupun pemimpin ULD Lee Han-dong sepakat bahwa dalam KTT nanti tidak akan ada langkah kompromi yang dapat mengorbankan kepentingan nasional Korea Selatan, melainkan segala sesuatunya harus berdasarkan azas resiprositas. Presiden Kim Dae-jung juga akan menunggu ratifikasi dari majelis nasional terlebih dahulu jika masalah keterlibatan pembayar pajak Korea Selatan dalam bantuan ekonomi untuk Korea Utara diperlukan suatu landasan hukum (undang-

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, h. 4.

undangnyanya). Sedangkan dalam pertemuannya dengan pimpinan *Democratic People's Party* (DPP) Kim Yoon-whan pada tanggal 1 Mei 2000, telah dikeluarkan lima butir kesepakatan bersama yang pada intinya berisikan dukungan terhadap langkah Presiden Kim Dae-jung bagi terlaksananya KTT Inter-Korea.<sup>155</sup>

Pada akhir tahun 2001, konfrontasi di dalam lingkaran politik dalam negeri Korea semakin meningkat. Kebijakan pemerintah Presiden Kim Dae-jung “*sunshine policy*” yang ditujukan kepada Korea Utara merupakan penyebab pertama munculnya krisis kepercayaan. Presiden Kim saat itu menghadapi tantangan keras dari Majelis Nasional dan masyarakat Korea terhadap usahanya untuk secara sepihak meneruskan *sunshine policy* yang diyakini cukup rasional untuk membina hubungan Inter-Korea. Pada kenyataannya kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak dapat dipisahkan dari politik dalam negeri. Banyak elemen yang berpengaruh di dalam negeri Korea Selatan yang menolak pemberian bantuan kemanusiaan kepada rezim Korea Utara tanpa asas timbal balik, tanpa memperdulikan apakah *sunshine policy* telah berhasil mengakhiri konfrontasi Perang Dingin, apalagi selama ini Korea Selatan terlalu banyak mengalah terhadap tuntutan Korea Utara.<sup>156</sup>

### 3.3 Hasil dari penyelenggaraan KTT Inter-Korea

Tahun 2000 merupakan tahun bersejarah bagi hubungan kedua Korea, khususnya sejak bulan Juni 2000 yang dimana untuk pertama kalinya sejak Perang Korea (1950-1953), pemimpin kedua Korea dapat bertemu secara damai. Terealisasinya pertemuan antara kedua pemimpin Korea dalam sebuah KTT Inter-Korea antara Presiden Kim Dae-jung dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-il di Pyongyang, ibukota Korea Utara tanggal 13-15 Juni 2000 yang menurut Korea Selatan tidak terlepas dari upaya gigih Presiden Kim Dae-jung dalam menerapkan *Sunshine Policy* suatu *engagement policy* terhadap Korea

<sup>155</sup> *Ibid.*, h. 4-5.

<sup>156</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku I (Laporan Inti)*, Seoul: KBRI Seoul, 2001, h. 4.

Utara yang dicanangkan sejak ia terpilih menjadi presiden Korea Selatan pada bulan Februari 1998.<sup>157</sup>

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi tiga hari yang bersejarah tersebut, telah ditandatangani "Deklarasi Bersama" Korea Selatan dengan Korea Utara pada tanggal 15 Juni 2000 yang diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi babak baru hubungan antar kedua Korea dengan melaksanakan kerjasama di berbagai bidang, meredakan ketegangan demi terciptanya perdamaian abadi di semenanjung Korea menuju rekonsiliasi nasional dan penyatuan kedua Korea pada akhirnya. Deklarasi Bersama tersebut juga untuk menjalankan kembali persetujuan-persetujuan kedua Korea yang telah ditandatangani sebelumnya yaitu *Joint Communique* 1974 dan *Basic Agreements* 1992, dan isi dari "Deklarasi Bersama" (South-North Joint Declaration) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reunifikasi Independen Korea
2. Pengakuan atas kesamaan formula reunifikasi kedua Korea
3. Pertukaran keluarga-keluarga terpisah (*familiy reunification*) dan resolusi atas tahanan Korea Utara
4. Meningkatkan keseimbangan pembangunan ekonomi nasional
5. Menyelenggarakan dialog tingkat pemerintah dan kunjungan pemimpin besar Korea Utara Kim Jong-il ke Seoul, Korea Selatan.<sup>158</sup>

Selain itu hasil dari penyelenggaraan KTT Inter-Korea 2000 juga dilaksanakannya pertemuan tingkat menteri (*South-North Ministerial Meeting*) kedua Korea yang disepakati untuk diselenggarakan dalam rangka melaksanakan secara efektif lima butir kesepakatan dalam Deklarasi Bersama Korea Utara dan Korea Selatan yang ditandatangani pada saat KTT Inter-Korea, 13-15 Juni 2000, dan hingga akhir tahun 2000, telah dilaksanakan empat kali pertemuan yang dilaksanakan secara bergantian di wilayah masing-masing.<sup>159</sup>

Pertemuan tingkat menteri I, 29-31 Juli 2000. Merupakan pertemuan tingkat menteri pertama yang diselenggarakan pasca KTT Inter-Korea. Pertemuan

<sup>157</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 25.

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>159</sup> *Ibid.*

ini diselenggarakan di Seoul, ibukota Korea Selatan selama tiga hari. Pertemuan tersebut telah menghasilkan terobosan baru dengan menyetujui enam butir kesepakatan penting, yaitu :

1. Melaksanakan pertemuan tingkat menteri antara Korea Utara dan Korea Selatan yang sejalan dengan semangat Deklarasi Bersama Korea Utara-Korea Selatan
2. Pengoperasian kembali kantor penghubung di Panmunjom, Korea Utara yang terhenti sejak November 1996.<sup>160</sup>
3. Mengadakan serangkaian perayaan peringatan Hari Pembebasan Nasional tanggal 15 Agustus 2000, yang masing-masing dilaksanakan di Korea Selatan, Korea Utara dan luar negeri dalam mendukung Deklarasi Bersama Korea Utara-Korea Selatan guna menghidupkan tekad nasional secara luas menjadi suatu kenyataan.
4. Bekerja sama dan mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin para anggota *Chongryon* (Asosiasi masyarakat Korea yang bermukim di Jepang) untuk dapat berkunjung ke kampung halamannya.
5. Pemulihan kembali jalur kereta api Seoul-Shinuiju, dan bertekad untuk membahasnya dalam waktu dekat.
6. Mengadakan pertemuan tingkat menteri kedua pada tanggal 29-31 Agustus 2000 di Pyongyang, Korea Utara.<sup>161</sup>

Pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Unifikasi Korea Selatan ini, yaitu Park Jae-kyu dan Penasehat Senior Kabinet Korea Utara Jon Kum-jin juga telah dibahas dan disepakati bersama hal-hal khusus, seperti pelaksanaan pertemuan 100 orang anggota keluarga yang terpisah dari kedua belah pihak sebagai bagian dari perayaan Hari Pembebasan Nasional 15 Agustus ke-55. Kehadiran pejabat tinggi tingkat menteri Korea Utara dalam pertemuan tersebut

<sup>160</sup> Kedua Korea pada tahun 1992 membuka kantor penghubung di daerah perbatasan Panmunjom sebagai realisasi dari persetujuan dasar (*Inter-Korea Basic Agreement 1992*). Akan tetapi, pemerintah Korea Utara pada tahun 1996 secara sepihak menghentikan pengoperasian kantor penghubungnya. Sejak itu, satu-satunya sarana komunikasi antara kedua Korea akhirnya hanya melalui Palang Merah masing-masing pihak. *Ibid.*, h. 26-27.

<sup>161</sup> *Ibid.*

merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 1992, dimana kedua Korea mengadakan pertemuan tingkat perdana menteri di Seoul yang menghasilkan persetujuan dasar kedua Korea 1992. Ketua Delegasi Korea Utara Jon Kum-jin beserta 6 anggota dan 2 wartawan juga diterima Presiden Kim Dae-jung di istana kepresidenan *Chong Wa-dae*. Presiden Kim Dae-jung menyambut baik hasil-hasil dari pertemuan tersebut.<sup>162</sup>

Pertemuan tingkat menteri II, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus hingga 1 September 2000 selama empat hari di Pyongyang, Korea Utara. Delegasi Korea Selatan yang berjumlah 35 orang dan kembali dipimpin oleh Menteri Urusan Unifikasi Park Jae-kyu. Dalam pertemuan kali ini, kedua delegasi menindak lanjuti hasil pertemuan pertama di Seoul, 29-31 Juli lalu dengan menghasilkan tujuh butir kesepakatan sebagai berikut :

1. Mengatur rencana pelaksanaan dua pertemuan keluarga yang terpisah berikutnya dalam tahun 2000
2. Mengadakan konsultasi dalam waktu dekat bagi pembicaraan antara pejabat militer kedua Korea. Masalah militer memang telah menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pihak Korea Selatan mengusulkan agar kedua belah pihak membuka *hotline* militer dan menyelenggarakan pembicaraan antara pejabat militer kedua Korea. Korea Selatan dalam hal ini juga menuntut agar langkah-langkah detail mengenai pembentukan *Confidence Building Measures* (CBM) di bidang militer kedua belah pihak dapat lebih diperjelas dan diperinci dalam butir-butir kesepakatan ini. Namun, pihak Korea Utara memilih tetap untuk tidak beranjak lebih jauh dari posisinya yang hanya menegaskan berjanji akan membahasnya kemudian.
3. Pembentukan kerangka dasar hukum (*legal framework*) bagi kerjasama ekonomi dan bantuan pangan terhadap Korea Utara. Dalam hal ini, kedua Korea sepakat untuk membentuk sistem hukum dasar kerjasama tersebut seperti pembentukan *Investment Guarantee Agreement* (IGA) atau persetujuan perlindungan investasi dan persetujuan perlindungan

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 28.

pajak berganda (P3B). Pihak Korea Selatan juga menyetujui kemungkinan pemberian pinjaman kepada Korea Utara yang dilanda krisis pangan akibat bencana alam yang berkelanjutan.

4. Mengadakan kontak tingkat badan pekerja yang membahas penghubungan kembali jalur kereta api dan pembangunan jalan yang akan menghubungkan antara kedua Korea.
5. Pengawasan terhadap bahaya banjir pada sungai Imjin dengan mendirikan pusat pengawasan banjir bersama.
6. Pertukaran kunjungan sekitar 100 orang wisatawan dari masing-masing pihak. Sekitar 100 orang wisatawan dari masing-masing pihak berkunjung ke pegunungan Halla di Korea Selatan dan pegunungan Paektu di Korea Utara, pada pertengahan September dan awal Oktober tahun 2000.
7. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri III pada tanggal 27-30 September di pegunungan Halla, pulau Cheju, Korea Selatan.<sup>163</sup>

Selama pertemuan lima hari di Korea Utara tersebut, Menteri Urusan Unifikasi, Park Jae-kyu juga berkesempatan mengadakan pertemuan dengan ketua komisi pertahanan nasional, yang tak lain pemimpin besar Korea Utara, yaitu Kim Jong-il yang antara lain bertukar pandangan mengenai upaya-upaya peredaan ketegangan dan pembangunan *Confidence Building Measure* (CBM) antara pejabat militer kedua Korea.<sup>164</sup>

Pertemuan tingkat menteri III, 27-30 September 2000 kembali dilaksanakan di Korea Selatan, yaitu di pulau Cheju. Pertemuan diawali dengan mengevaluasi implementasi isi "Deklarasi Bersama" setelah 100 hari ditandatangani. Kedua belah pihak kemudian menyepakati beberapa keputusan penting diantaranya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga yang terpisah dan pembentukan "Komite Bersama" untuk merealisasikan proyek-proyek kerjasama ekonomi diantara keduanya.<sup>165</sup>

<sup>163</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*, h. 30.



Pertemuan tingkat menteri IV, 12-15 Desember 2000. Pertemuan tingkat menteri tahap empat kembali digelar pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Pyongyang. Dalam pertemuan selama empat hari tersebut kedua Korea telah menandatangani sejumlah persetujuan yang dimaksudkan dapat menunjang hubungan ekonomi Inter-Korea, yang diantaranya adalah persetujuan penghindaran pajak berganda dan persetujuan perlindungan investasi (IGA). Kedua Korea juga menegaskan rencana pertemuan para anggota keluarga terpisah putaran ketiga pada akhir Februari 2001. Dalam konferensi pers bersama, dikemukakan mengenai kesepakatan mengenai rencana Korea Selatan untuk memasok sekitar 500.000 Kw listrik kepada Korea Utara. Selain itu, kedua belah pihak juga setuju untuk merealisasikan pembentukan komite kerjasama ekonomi Inter-Korea yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak pada saat pertemuan tingkat menteri tahap III di pulau Cheju, september lalu. Dalam komite tersebut, masing-masing pihak akan mengirimkan lima hingga tujuh orang delegasinya yang akan dipimpin oleh pejabat setingkat wakil menteri. Komite akan membahas berbagai masalah yang menyangkut pelaksanaan proyek kerjasama ekonomi Inter-Korea diantaranya termasuk penyambungan kembali jalur kereta api Seoul-Shinuiju dan penanggulangan banjir sungai Imjin, Korea Utara.<sup>166</sup>

Hasil lain dari penyelenggaraan KTT Inter-Korea yang tercantum dalam Deklarasi Bersama adalah pembicaraan tingkat Palang Merah dan pertemuan kembali keluarga yang terpisah (*Family Reunification / Reunions of Separated Families*). Menurut data pemerintah Korea Selatan, hingga tahun 2000 diperkirakan terdapat 7,67 juta warga Korea Selatan yang terpisah dari anggota keluarganya. Dari jumlah tersebut, 1,23 juta orang merupakan para anggota keluarga yang terpisah dari sanak saudaranya di Korea Utara. Sisanya merupakan keturunan yang lahir di Korea Selatan setelah berakhirnya Perang Korea. Sebagai realisasi dari isi "Deklarasi Bersama", kedua Korea Sepakat pelaksanaan

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

pertemuan tersebut dibahas dalam pembicaraan tingkat Palang Merah masing-masing pihak.<sup>167</sup>

Pembicaraan palang merah Inter-Korea I, 27-30 Juni 2000. Dilaksanakan di pegunungan Kumgang, Korea Utara selama empat hari guna mempersiapkan pelaksanaan program pertemuan kembali keluarga terpisah (reunion of separated families) tahap pertama tanggal 15-18 Agustus 2000. 100 anggota keluarga dari masing-masing pihak disepakati untuk ikut serta dalam program pertemuan keluarga tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2000 bertepatan dengan hari Pembebasan Nasional Korea Ke-55 (dari pendudukan Jepang), pertemuan kembali anggota keluarga yang terpisah tahap pertama dapat dilaksanakan. Masing-masing pihak (Korea Utara dan Korea Selatan) mengirimkan 151 anggota rombongannya yang terdiri dari 100 orang anggota keluarga terpisah, 30 staf pembantu, 20 wartawan dan seorang pimpinan rombongan. Pada pertemuan bersejarah tersebut 102 warga Korea Selatan berkesempatan bertemu dengan 218 orang anggota keluarganya di Pyongyang dan 101 warga Korea Utara bertemu dengan sekitar 600 anggota keluarganya di Seoul. Seperti yang telah disepakati kedua belah, pertemuan antar-keluarga hanya dilakukan di tempat yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan untuk mengadakan pertemuan secara individual dengan mengunjungi rumah atau kampung halaman sanak saudaranya. Selain itu pertemuan kali ini juga hanya dilangsungkan di Seoul dan Pyongyang. Pada tanggal 12 Agustus 2000, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-il menyatakan bahwa pertemuan antara keluarga yang terpisah kedua Korea akan dilakukan kembali pada bulan September dan Oktober guna memenuhi keinginan dan harapan dari sekitar 7,67 Juta warga Korea Selatan yang mempunyai saudara di Korea Utara. Kim Jong-il juga berjanji akan memperbolehkan warga Korea Selatan untuk berkunjung ke kampung halamannya di Korea Utara.<sup>168</sup>

Pembicaraan palang merah tahap II, 20-23 September 2000. Pada pembicaraan yang berlangsung selama empat hari di pegunungan Kumgang, Korea Utara, kedua belah pihak sepakat untuk kembali melaksanakan pertemuan

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 31-32.

para anggota keluarga yang terpisah tahap kedua pada tanggal 2-4 November 2000 dan tanggal 5-7 Desember 2000 untuk pertemuan tahap ketiga. Dalam pembicaraan kali ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperbolehkan 300 anggota keluarga yang terpisah untuk saling berkomunikasi melalui surat pada bulan November 2000. Kedua belah pihak juga telah menetapkan tanggal 13-15 Desember 2000 untuk melangsungkan pembicaraan tahap ketiga. Pelaksanaan pertemuan kembali anggota keluarga terpisah tahap kedua baru terealisasi pada tanggal 30 November - 2 Desember 2000 karena pihak Korea Utara melakukan penundaan secara sepihak. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan penundaan tersebut erat kaitannya dengan keterbatasan tenaga dimana pada paruh kedua tahun 2000, Korea Utara banyak menyelenggarakan beberapa *event* besar di dalam negeri, seperti perayaan 55 tahun Partai Pekerja Korea Utara, perayaan 50 tahun keterlibatan Cina didalam membantu Korea Utara pada masa perang Korea, dan juga menerima beberapa kunjungan tamu asing termasuk Menlu Amerika Serikat pada masa itu, Madeleine Albright. Walaupun tertunda, pertemuan antar keluarga terpisah tetap dilaksanakan dengan penuh rasa haru oleh para sanak saudara dari kedua Korea yang telah lebih dari 50 tahun terpisah. Seperti halnya pertemuan pertama bulan Agustus lalu, kali ini 100 warga Korea Selatan diterbangkan ke Korea Utara dan juga sebaliknya 100 orang warga Korea Utara diterbangkan ke Korea Selatan untuk bertemu sanak saudaranya.<sup>169</sup>

Namun pertemuan keluarga terpisah tahap kedua agak berbeda dengan sebelumnya. Pemerintah Korea Selatan telah merampingkan seluruh proses untuk pertemuan tersebut termasuk juga dalam hal pendanaan. Menurut perkiraan, dana yang dikeluarkan Korea Selatan dalam *event* mencapai 1,9 milyar won. Pemerintah (Korea Selatan) merasa perlu merampingkan pengeluaran dana yang dianggap tidak begitu penting tujuannya demi mewujudkan peningkatan frekuensi pertemuan antar keluarga tersebut. Oleh karenanya dalam pertemuan tahap kedua ini, pemerintah juga tidak menempatkan para anggota keluarga dari Korea Utara di Hotel yang mewah seperti halnya pada pertemuan terdahulu, melainkan akan diberikan akomodasi di Hotel yang kelasnya lebih rendah. Pemerintah Korea

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, h. 32-33.

Selatan juga tidak mensubsidi para warganya yang bertemu keluarganya di Korea Utara, kecuali kepada mereka yang benar-benar tidak mampu.<sup>170</sup>

Penundaan pembicaraan palang merah dilakukan untuk pelaksanaan pertemuan kembali keluarga yang terpisah tahap III. Pembicaraan tahap III yang sedianya dilangsungkan pada tanggal 13-15 Desember 2000 ternyata tidak dapat terealisasi. Kedua Korea pada tanggal 10 Desember 2000 akhirnya memutuskan untuk menunda pembicaraan yang akan membahas pelaksanaan pertemuan kembali keluarga terpisah tahap III tersebut. Pada tanggal 9 Desember 2000, pihak Korea Selatan telah melayangkan surat kepada pihak Korea Utara mengingatkan tanggal pelaksanaan pembicaraan antara palang merah kedua Korea. Namun pihak Korea Utara membalas surat tersebut dengan mengusulkan agar pembicaraan tahap ketiga ditunda hingga tahun 2001. Menanggapi usulan pihak Korea Utara tersebut, Pihak Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk menerima usulan Korea Utara tersebut. Menurut kementerian Unifikasi Korea Selatan, tidak terdapat alasan bagi Korea Selatan untuk melangsungkan secara tergesa-gesa pembicaraan tahap ketiga tersebut. Namun demikian, pihak Korea Selatan akhirnya menyinggung masalah penundaaan ini dalam pertemuan tingkat menteri tahap IV di Pyongyang, 12-15 Desember 2000. Dalam pertemuan tingkat menteri ini, kedua Korea akhirnya menyepakati pelaksanaan pembicaraan tahap III dan pertemuan kembali keluarga terpisah tahap III, yang akhirnya dilaksanakan pada bulan Februari 2001.<sup>171</sup>

Program pertemuan kembali para anggota keluarga terpisah tahap III berhasil dilaksanakan pada tanggal 27 Februari-1 Maret 2001. Seperti halnya pertemuan sebelumnya, dalam pertemuan tersebut 100 anggota delegasi Korea Selatan berkesempatan mengunjungi saudaranya di ibukota Korea Utara, Pyongyang dan begitu pula sebaliknya, 100 anggota delegasi Korea Utara dapat bertemu dengan anggota keluarganya di ibukota Korea Selatan, Seoul. Dalam pertemuan kali ini, seorang anggota delegasi Korea Utara, Son Sa-jong yang berusia 90 tahun harus mendapat perawatan di rumah sakit di Seoul karena

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 34.

kondisinya lemah. Pihak Korea Selatan mengusulkan untuk merawat Son hingga kondisinya benar-benar pulih dan akan mengembalikannya ke Korea Utara melalui Panmunjom. Namun pihak Korea Utara menolak usulan tersebut dan berjanji akan merawat Son dengan baik. Isu pengembalian POW dan tahanan lainnya yang masih berada di Korea Utara juga sempat mewarnai jalannya pertemuan. Diantara 100 anggota delegasi Korea Utara terdapat dua orang POW dan seorang mantan *crew* maskapai penerbangan Korea Selatan, *Korean Air*. Selama ini pemerintah Korea Utara selalu menyangkal adanya POW ataupun tahanan lainnya di Korea Utara. Menurut Korea Utara, baik POW maupun tahanan lainnya telah memutuskan untuk menetap dan hidup di Korea Utara.<sup>172</sup>

Berdasarkan data resmi Pemerintah Korea Selatan yang tertuang dalam buku putih kementerian Unifikasi, masih banyak tahanan perang (POW) yang merupakan warga negara Korea Selatan terdapat di Korea Utara. Jumlah tersebut akan tertera pada grafik dibawah ini.

**Grafik 3.3.1**  
**Data Tahanan Perang (POW) Korea Selatan yang Terdapat di Korea Utara<sup>173</sup>**



Dalam bidang pertahanan, kedua Korea juga melakukan pertemuan dan merealisasikan implementasi dari "Deklarasi Bersama". Sejak penyelenggaraan KTT Inter-Korea bulan Juni di Pyongyang, ibukota Korea Utara. Hubungan dan

<sup>172</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 27-28.

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 31.

kerjasama bilateral kedua Korea diberbagai bidang memang terlihat jelas peningkatannya. Namun kemajuan tersebut ternyata belum menyentuh bidang pertahanan (militer) yang tidak kalah pentingnya dalam meredakan ketegangan militer di semenanjung Korea. Selain itu, implementasi "Deklarasi Bersama" seharusnya dibarengi oleh jaminan perdamaian dari otoritas militer kedua Korea. Atas dasar tersebut, pemerintah Korea Selatan menyerukan untuk diadakannya pertemuan atau pembicaraan tingkat militer dengan Korea Utara. Hasilnya pada saat pertemuan tingkat menteri II di Pyongyang, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat pejabat militer kedua Korea walaupun belum menentukan kepastian tanggalnya. Pada tanggal 13 September 2000, Menteri Angkatan Bersenjata Korea Utara, Kim Il-chol mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Korea Selatan Cho Seong-tae mengenai keseriusan Korea Utara terhadap usulan pertemuan Menteri Pertahanan Inter-Korea. Surat menteri Kim Il-chol sebagai jawaban atas usulan Korea Selatan pada tanggal 11 September 2000 yang disampaikan kepada Jenderal Pak Jae-gyong yang berkunjung ke Seoul dalam rangka menyampaikan hadiah dari Presiden Kim Jong-il kepada Presiden Kim Dae-jung. Pihak Korea Selatan dalam membalas surat Menteri Kim Il-chol menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar pertemuan Menteri Pertahanan Inter-Korea pertama hendaknya membahas berbagai isu yang berkaitan dengan peranan militer dalam proyek penyambungan kembali jalur kereta api Korea Utara dengan Korea Selatan yang menghubungkan Seoul-Shineuji. Agenda lain yang diusulkan Korea Selatan antara lain, pengenalan *Military Confidence Building Measures* termasuk didalamnya pembentukan *Military Hotline* dan beberapa hal lain yang menjadi perhatian bersama dalam rangka meredakan ketegangan militer kedua negara.<sup>174</sup>

Setelah melewati beberapa proses untuk menetapkan kepastian tanggal, pertemuan Menteri Pertahanan Inter-Korea yang pertama akhirnya dilangsungkan di pulau Cheju, Korea Selatan, 25-26 September 2000. Lima anggota delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Cho Seong-tae dan lima anggota delegasi Korea Utara dipimpin oleh Menteri Angkatan Bersenjata Korea Utara

---

<sup>174</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 34-35.

Kim Il-cho. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menyepakati lima butir persetujuan bersama yang antara lain berintikan kesepakatan untuk mengadakan *Working-level Meeting* pada bulan Oktober 2000, menyelenggarakan pertemuan Menteri pertahanan kedua pada pertengahan November 2000, memperbolehkan kendaraan, personil dan perlengkapan lainnya untuk memasuki masing-masing wilayah melalui DMZ dan menjamin keselamatan dalam mendukung pembangunan penyambungan kembali jalur kereta api dan jalan raya yang menghubungkan kedua Korea, serta akan mengambil langkah bersama dalam pelaksanaan "Deklarasi Bersama".<sup>175</sup>

Pembukaan kembali jalur kereta api kedua Korea akhirnya dapat dilaksanakan pada tanggal 18 September 2000, yang menghubungkan antara kota Seoul dengan Kota Shinuji secara resmi. Hal tersebut ditandai dengan pembongkaran dinding pemisah yang selama ini memutuskan jalur kereta api kedua Korea. Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung yang hadir untuk meresmikan acara tersebut di Imjingak, sebuah desa di dekat DMZ, menegaskan bahwa pembongkaran dinding pemisah yang selama ini merupakan simbol Perang Dingin dan pembagian kedua Korea telah hilang dan diganti dengan semangat untuk melakukan proses rekonsiliasi. Dengan diresmikannya penyambungan kembali jalur kereta api tersebut, kedua Korea dalam melakukan langkah awal akan membersihkan daerah tersebut dari ranjau-ranjau darat. Diharapkan pembersihan ranjau akan selesai pada akhir bulan November 2000. Rencananya Korea Selatan akan memperbaiki dan mengadakan penyambungan kembali jalur kereta api sepanjang 12 km antara kota Musan dengan Changdan. Diharapkan pekerjaan penyambungan kembali 12 km jalur kereta api yang menelan biaya 54,7 milyar won tersebut akan selesai sebelum bulan September tahun 2001. Sedangkan 12 km sisanya antara kota Changdan dan Kaesong akan dilakukan oleh pihak Korea Utara. Pada bulan September tahun 2001, kedua Korea juga akan memulai pembangunan jalan bebas hambatan (tol) yang akan menghubungkan kedua Korea. Terlepas dari pandangan bahwa pembangunan jalur kereta api dan jalan raya antara kedua Korea merupakan langkah maju

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, h. 35.

menuju terwujudnya rekonsiliasi kedua Korea, pihak partai oposisi dari dalam negeri Korea Selatan, yaitu *Grand National Party* (GNP) justru mengkhawatirkan pembangunan sarana transportasi darat tersebut yang dikatakan pihak GNP hanya akan mengundang ancaman keamanan bagi Korea Selatan. Pihak GNP mendesak pemerintah untuk menunda penghubungan kembali jalur kereta api antara kedua Korea, hingga Korea Utara dan Korea Selatan menyepakati pembentukan Komisi Militer Bersama, seperti yang dituangkan dalam *Basic Agreement* tahun 1992.<sup>176</sup>

Merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan tingkat menteri tahap IV, kedua Korea sepakat untuk mengadakan pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Inter-Korea yang pertama pada tanggal 26 Desember 2000 di Pyongyang guna membicarakan *supply* tenaga listrik ke Korea Utara dan pembangunan kawasan industri Grup *Hyundai* di kota Kaesong, Korea Utara. Terlepas dari kemajuan yang dicapai kedua belah pihak dengan disepakatinya beberapa persetujuan dalam pertemuan di Pyongyang tersebut, pihak oposisi di dalam negeri Korea Selatan justru kembali mengkhawatirkan sikap Korea Selatan yang terlalu lemah dengan selalu menuruti segala permintaan Korea Utara. Menurut juru bicara partai oposisi GNP Kwon Chul-hyeon, pihak Korea Selatan selama ini telah memberikan banyak bantuan terhadap pihak Korea Utara, yang di antara lain berupa bantuan pupuk, beras, televisi, dan juga bantuan berupa uang kepada pihak Korea Utara. Namun sebagai timbal baliknya pihak Korea Selatan, dikatakannya tidak mendapatkan apa-apa. Kwon (GNP) lebih lanjut mengingatkan bahwa untuk memasok tenaga listrik sebesar 500.000 Kw berarti *Korea Electric Power Corporation* (KEPCO) harus mengeluarkan biaya sebesar 700 milyar Won atau sekitar US\$ 636.000.000. Dalam perekonomian Korea Selatan yang dianggapnya masih belum stabil. Pemberian pasokan listrik terhadap Korea Utara yang memakan biaya begitu besar akan semakin melemahkan kondisi perekonomian Korea Selatan. Para Pejabat GNP lainnya juga memandang bahwa tuntutan Korea Utara akan permintaan pasokan listrik dari Korea Selatan hendaknya tidak dipenuhi, dan jika pemerintah Korea Selatan terus memenuhi segala permintaan Korea Utara segala permintaan Korea Utara, maka

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, h. 36.



dikhawatirkan kelangsungan pemberian bantuan kepada Korea Utara akan mendapat tekanan dan perlawanan dari masyarakat. Lebih lanjut GNP menegaskan kembali agar pemberian bantuan terhadap Korea Utara tetap dilakukan atas azas resiprositas, dalam hal ini menuntut pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan masalah *Prisoners of War* (POW) Korea Selatan dan tahanan lainnya yang masih berada di Korea Utara.<sup>177</sup>

Salah satu hasil dari KTT Inter-Korea yang tertuang dalam "Deklarasi Bersama" bulan Juni 2000 dan disepakati untuk dijalankan namun belum dijalankan hingga tahun 2001 adalah kunjungan balasan pemimpin Korea Utara, presiden Kim Jong-il ke Seoul sekaligus melaksanakan KTT Inter-Korea kedua pada tahun 2001. Pemerintah Korea Selatan sangat berharap kunjungan Kim Jong-il dapat terlaksana di tahun 2001. Namun kunjungan tersebut masih belum dapat terealisasi. Pihak Korea Utara sendiri berungkali menyatakan bahwa kunjungan tersebut akan terlaksana, namun tidak pernah memberikan ketegasan kapan kunjungan tersebut akan terealisasi. Menurut duta besar Belgia untuk Korea Utara, Koenraad Rouvroy (yang juga merupakan duta besar Belgia untuk Korea Selatan), pada saat ia bertemu menteri luar negeri Korea Utara saat itu, Paek Nam-sun di bulan Juli 2001, ditegaskan bahwa Presiden Kim Jong-il akan menepati janji melakukan kunjungan balasan ke Seoul. Namun, Dubes Rouvroy menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Paek Nam-sun tidak menyebutkan kapan kunjungan tersebut akan dilaksanakan. Perdana menteri Swedia saat itu, Goran Persson sebelumnya juga mengutarakan hal yang sama bahwa pada saat ia berkunjung ke Pyongyang di pertengahan Mei 2001, Presiden Kim Jong-il menyampaikan keinginannya untuk mengadakan kunjungan balasan ke ibukota Korea Selatan, Seoul. Namun kunjungan tersebut akan dikaitkan dengan bentuk kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara.<sup>178</sup>

Bagi Korea Utara sendiri, hasil dari KTT Inter-Korea membawa dampak positif bagi perkembangan dalam negerinya, khususnya dalam bidang ekonomi yang sebelum pertemuan tingkat tinggi tersebut mengalami penurunan yang

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, h. 36-37.

<sup>178</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 28-29.

sangat signifikan diakibatkan krisis, bencana alam dan kelaparan. Oleh karena itu, pemerintah Korea Utara berupaya memulihkan perkenomian. Dengan meingkatkan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, memperkuat undang-undang dibidang ekonomi, restrukturisasi perusahaan dan pabrik, menjernihkan dan memperjelas distribusi tanah dalam suatu tingkat nasional serta membangun pembangkit listrik skala kecil dan menengah. Presiden Kim Jong-il bertekad menghentikan krisis ekonomi yang melanda Korea Utara. Upaya-upaya tingkat nasional ini didukung oleh masyarakat internasional dan *joint economic ventures* dengan Korea Selatan. Dukungan ini diberikan untuk membantu Korea Utara menaikkan dan mengangkat nilai rendah ekonominya turun drastis pada tahun 1999. Kendala yang dihadapi oleh Korea Utara adalah sumber-sumber yang terbatas, fasilitas sosial yang kuno dan masalah-masalah lain yang menyedihkan, sehingga telah meminta kelanjutan dukungan luar untuk pertumbuhan ekonominya.<sup>179</sup>

Dengan dorongan perkembangan pandangan nasionalnya dalam masyarakat global sejak pertemuan puncak Korea Selatan, pemerintah Korea Utara berlomba menuju terjaminnya dukungan ekonomi dan secara aktif memperluas diri untuk menarik investasi luar dengan meyatukan industri dasar dan industri ringan dengan bentuk lain-lain yang di improvisasi. Meski demikian, karena kebijakan terbuka dan reformasi ekonomi pasar diperlukan untuk perkembangan yang normal dari ekonomi Korea Utara, tanpa perubahan-perubahan besar pada tingkat fundamental, harapan untuk pemulihan kembali ekonomi Korea Utara dapat dianggap sulit. Sebagai tambahan, faktor-faktor penyebab meluasnya kekhawatiran akan mengikuti roda depresi ekonomi dan akan tetap tinggal selama waktu itu. Guna memperketat genggam dan cengkraman terhadap rakyat dalam mengatasi dan menanggulangi harapan yang tidak realistis rakyat terhadap usaha reunifikasi dan adanya khayalan sekitar kapitalisme menyusulnya pertemuan puncak Korea Utara dengan Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara melakukan suatu kampanye propaganda nasional untuk membesarkan peranan Kim Jong-il dalam proses reunifikasi dan

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 137.

kepemimpinannya sebagai Ketua *National Defense Committee*. Pemerintah Korea Utara telah menekankan rakyat dengan suatu indoktrinasi ideologi yang lebih mendalam daripada sebelumnya dan mencari upaya untuk meredakan dan mengurangi guncangan intern mereka.<sup>180</sup>

Walaupun sebenarnya dalam kaitan dengan "Deklarasi Bersama" antara Korea Utara dengan Korea Selatan, pada tahun 2001 dapat diamati bahwa implementasinya belum menunjukkan perkembangan. Meskipun pada dasarnya kedua belah pihak menginginkan agar implementasi deklarasi tersebut dapat berjalan sesuai kesepakatan, namun terdapat beberapa faktor yang menghambatnya, antara lain adalah tekanan kelompok oposisi di Korea Selatan yang menginginkan pendekatan yang diambil pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara lebih mengedepankan prinsip timbal-balik dan saling menguntungkan. Faktor lainnya adalah tuntutan Korea Utara agar 37.000 pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan segera ditarik, sebagai syarat terciptanya perdamaian di semenanjung Korea. Di samping faktor-faktor tersebut diatas, terdapat pula variabel penting yang sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi "Deklarasi Bersama" Korea Utara dengan Korea Selatan tersebut, yakni kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang berubah sejak pemetintahan Presiden Bush pada bulan Januari 2001. Faktor-faktor tersebut yang pada gilirannya menjadi latar belakang gagalnya pertemuan tingkat menteri ke-VI di Geumgangsang, Korea Utara pada tanggal 9-12 November 2001, pelaksanaannya sendiri bahkan sempat tertunda beberapa kali dari jadwal semula yang direncanakan pada tanggal 28-31 Oktober 2001.<sup>181</sup>

### 3.4 Perkembangan Hubungan Kedua Korea Pasca KTT Inter-Korea

Dalam pidatonya menyongsong tahun 2001, Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mengatakan bahwa pemerintah akan tetap mendorong kebijakan Inter-Korea sebagai usaha untuk mengurangi ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan meningkatkan pertukaran hubungan bilateral, sebagai tanda abad perdamaian dan kesejahteraan di semenanjung Korea. Dengan memperkuat

<sup>180</sup> *Ibid.*, h. 137-138.

<sup>181</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti)*, *op.cit.*, h. 4.

konsensus nasional dan kerjasama supra-partisan, pemerintah akan menjamin bahwa hubungan Korea Utara dan Korea Selatan akan mendapat dukungan masyarakat. Sementara itu postur keamanan nasional tetap dipertahankan sampai perdamaian benar-benar terbentuk di semenanjung Korea.<sup>182</sup>

Pertemuan bersejarah antara Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada tanggal 15 Juni 2000 yang menghasilkan Deklarasi Bersama Pyongyang, dalam tahun 2001 ini belum mampu membawa pendekatan yang berarti dalam hubungan Inter-Korea. Harapan kunjungan balasan dari Pemimpin Korea Utara yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2001 belum terpenuhi. Bahkan sampai pertengahan pertama tahun 2001 dialog Inter-Korea terhenti sama sekali dan baru dibuka kembali pada tanggal 15 September 2001 dimana berlangsung pertemuan tingkat menteri V di Seoul dan pertemuan tingkat menteri VI di gunung Kumgang, Korea Utara. Pada kenyataannya Presiden Korea Selatan, Kim menghadapi masalah dalam negeri maupun situasi internasional yang tidak mendukung, sehingga kebijakan *sunshine policy* tidak berjalan dengan efektif.<sup>183</sup>

Deklarasi Bersama di Pyongyang oleh Presiden Kim Dae-jung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il merupakan langkah bersejarah bagi kedua Korea yang diharapkan mampu mengakhiri masa Perang Dingin yang telah berlangsung selama lima dekade di semenanjung Korea. Empat putaran pertemuan tingkat menteri dan satu putaran pembicaraan tingkat Menhan Inter-Korea telah diadakan tahun 2000 untuk menindaklanjuti kesepakatan dari hasil KTT Inter-Korea di Pyongyang. Program-program pertukaran kunjungan keluarga terpisah yang melibatkan 600 keluarga Korea Selatan dan Korea Utara telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di ibukota Seoul dan Pyongyang. Namun sejak terhentinya dialog Inter-Korea yang dinyatakan secara sepihak oleh Pemerintah Korea Utara pada tanggal 13 Maret 2001, maka pertemuan tingkat menteri V pada tahun 2001 yang seharusnya dilakukan pada 15-18 September 2001 dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri VI pada 8-14 November 2001. Hasil dari

---

<sup>182</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 22, 25.

<sup>183</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku I (Laporan Inti)*, op.cit., h. 6-7.

pertemuan tingkat menteri V di Pyongyang dinilai cukup menggembirakan namun kembali terkendala dalam pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai. Sedangkan pertemuan tingkat menteri VI di gunung Kumgang dapat dikatakan gagal menghasilkan kesepakatan yang signifikan. Sikap pemerintah Korea Utara kembali tertutup dengan adanya langkah-langkah *security alert* Pemerintah Korea Selatan dalam “*Emergency Precaution Measures*” yang dianggap ditujukan kepada Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan dalam *security alert* ini mengadakan latihan-latihan militer yang lebih intensif dengan sasaran stabilitas dalam negeri Korea Selatan dan keamanan warga asing dari serangan terorisme. Dalam pertemuan tingkat menteri VI pihak delegasi Korea Utara menuntut *security alert* Korea Selatan dicabut dan menolak Seoul dijadikan tempat pertemuan-pertemuan Inter-Korea berikutnya karena dianggap tidak aman. Darurat militer Korea Selatan akhir Desember 2001 dinyatakan dicabut.<sup>184</sup>

Sementara itu, untuk mengamankan semenanjung Korea, Pemerintah Korea Selatan mengusulkan untuk menghidupkan kembali “Pembicaraan empat Pihak” untuk membicarakan perjanjian perdamaian baru menggantikan *Armistice Treaty* Semenanjung Korea yang ditandatangani pada tahun 1953. Pembicaraan empat pihak yang melibatkan Amerika Serikat, RRC dan kedua Korea terhenti sejak bulan Agustus tahun 1999. Pada saat itu kebuntuan terjadi karena Korea Utara menuntut perundingan perjanjian damai hanya dengan Amerika Serikat yang intinya penarikan 37.000 pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan. *Armistice Treaty* tahun 1953 ditandatangani oleh pasukan koalisi internasional PBB pimpinan Amerika Serikat, pihak Korea Utara dan pihak *Chinese Volunteers’ Army*<sup>185</sup>.

Sejak permulaan tahun 2001, hubungan tersebut mulai terlihat *stagnant*. Pada bulan Maret 2001, hubungan Inter-Korea praktis terhenti setelah pemerintah Korea Utara secara sepihak pada tanggal 13 Maret 2001 membatalkan pertemuan tingkat menteri Inter-Korea V. Pertemuan tingkat menteri merupakan forum Inter-Korea terpenting selain KTT. Sejak KTT bulan juni tahun 2000 lalu di

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, h. 7-8.

<sup>185</sup> *Ibid.*, h. 10.

Pyongyang, kedua Korea telah melaksanakan empat kali pertemuan tingkat menteri yang menghasilkan berbagai realisasi terobosan penting dalam hubungan, dialog dan kerjasama Inter-Korea. Penundaan sepihak penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri V oleh Korea Utara pada bulan Maret 2001 memang bukan merupakan hal yang baru, hanya saja, penundaan tersebut sangat mengejutkan karena disampaikan pada hari pelaksanaan pertemuan. Keputusan sepihak Korea Utara tersebut juga membawa konsekuensi terhentinya segala bentuk dialog Inter-Korea. Hasil pertemuan antara Presiden Kim Dae-jung dan Presiden Amerika Serikat George W. Bush di Washington D.C yang dianggap tidak memberikan keuntungan terhadap Pyongyang merupakan alasan Korea Utara menghentikan sementara segala bentuk dialog Inter-Korea. Sebelum pertemuan antara Presiden Kim Dae-jung dan Presiden Bush berlangsung, pemerintah Korea Utara pada tanggal 7 Maret 2001 telah menyetujui usul Menteri Unifikasi Korea Selatan Park Jae-kyu, mengenai penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri V pada tanggal 13 Maret 2001 sebaliknya Presiden Kim Dae-jung dari Amerika Serikat. Pemerintah Korea Utara nampaknya justru berhasrat mendengar hasil-hasil pertemuan antara Presiden Kim Dae-jung dan Presiden George W. Bush yang diharapkan mengakomodir kepentingan Korea Utara. Namun pada kenyataannya, dalam pertemuan di Washington D.C, Presiden Bush yang menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap pelaksanaan *Sunshine Policy* sebagai bentuk *engagement policy* terhadap Korea Utara tetap bersikap skeptis terhadap Korea Utara, khususnya pada pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Collin Powell juga masih belum sepenuhnya mempercayai Korea Utara yang dianggapnya sebagai *rogue state*, khususnya dalam hal program pengembangan peluru kendali. Hal inilah yang nampaknya membuat Korea Utara memutuskan menunda segala bentuk dialog Inter-Korea sementara itu menunggu bentuk kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang dapat diterima oleh Pyongyang.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahun 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 22-23.

Walaupun tidak sampai mengganggu kedekatan hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara, perubahan pandangan pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara menimbulkan *perception gap* antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Presiden Kim Dae-jung dapat memahami sikap skeptis dan *concern* Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan ingin melakukan segala upaya untuk membantu Korea Selatan menyelesaikan *pending issues* dengan Korea Utara. Namun keadaan seperti ini juga menyulitkan posisi Korea Selatan dalam melanjutkan pendekatan terhadap Korea Utara. Bagi Korea Selatan nampaknya tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan langkah-langkah penyesuaian mengenai kelanjutan kebijakan pendekatan terhadap Korea Utara tanpa bertentangan dengan pandangan Amerika Serikat. Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sementara usulan atau keinginan penandatanganan *Peace Treaty* untuk menjamin perdamaian di semenanjung Korea dan menggantikan *Armistice Treaty 1953*. Sebagai gantinya, pemerintah Korea Selatan lebih mengaktifkan perjanjian non-agresi yang tertuang di dalam *South – North Basic Agreement 1992*.<sup>187</sup>

Upaya peredaan ketegangan di semenanjung Korea juga dilakukan pemerintah Amerika Serikat pada bulan Juni 2001. Pada saat itu pemerintah Amerika Serikat menyatakan siap membuka kembali dialog dengan pemerintah Korea Utara. Kesiapan Amerika Serikat yang didukung Korea Selatan tersebut sayangnya belum juga mempertemukan Amerika Serikat dan Korea Utara karena penolakan Korea Utara terhadap tiga prasyarat yang diajukan Amerika Serikat menyangkut masalah program nuklir, pengembangan rudal dan persenjataan konvensional Korea Utara. Pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell ke Seoul, pemerintah Amerika Serikat menyatakan kesiapannya untuk memulai dialog tanpa syarat dan kapan saja dengan Korea Utara. Pemerintah Amerika Serikat hanya tetap berpedoman pada pembahasan agenda secara komprehensif yang menyangkut revisi *Agreement Framework 1994*, upaya pembentukan *Military Confidence Building Measures (Military CBMs)* dan masalah kemanusiaan disamping masalah masalah persenjataan

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, h. 32-33.

nuklir, persenjataan konvensional serta pengembangan rudal yang tetap harus dibahas secara serius dalam dialog tersebut. Pemerintah Korea Utara tidak memberikan tanggapan apapun terhadap kesiapan Amerika Serikat tersebut.<sup>188</sup>

Namun disela-sela perkembangan tersebut, perubahan sikap Amerika Serikat dan konstelasi politik terjadi pasca serangan 11 September 2001 terhadap *World Trade Center* di New York dan *Pentagon* di Amerika Serikat. Hal tersebut semakin tidak menguntungkan bagi peredaan ketegangan Amerika Serikat dengan Korea Utara yang melahirkan implikasi langsung terhadap kelangsungan dialog Inter-Korea. Pada awal bulan Desember 2001, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menuntut pemerintah Korea Utara untuk mengizinkan para pengawas asing dalam memberikan keyakinan bahwa Korea Utara tidak memproduksi senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction*). Presiden Bush juga memperingatkan Korea Utara mengenai konsekuensi atas profilerasi Korea Utara. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat juga menunjukkan sikap kerasnya terhadap Korea Utara dengan menuduh Korea Utara telah mengembangkan *Germ Warfare Weapons*. Sikap keras pemerintah Amerika Serikat dibalas dengan peringatan Korea Utara kepada Amerika Serikat agar menghentikan *Hostile Policy* terhadap Korea Utara atau pihaknya akan melakukan *Countermeasures* terhadap Amerika Serikat.<sup>189</sup>

Selama tahun 2001, sejumlah warga (pelarian) Korea Utara berupaya untuk bermigrasi ke Korea Selatan. Para warga Korea tersebut pada umumnya merupakan warga yang telah menetap dan bersembunyi selama beberapa tahun di Cina sebelum memutuskan untuk bermigrasi ke Korea Selatan melalui negara ketiga. Keputusan pemerintah Cina yang menolak memberikan mereka status pengungsi, namun memperbolehkan mereka ke negara selanjutnya, disambut baik oleh Korea Selatan. Namun, pemerintah Korea Utara menyampaikan ketidaksenangannya atas keputusan tersebut dan menuduh Seoul menggunakan isu tersebut untuk kepentingan politis semata. Pemerintah Korea Utara

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>189</sup> *Ibid.*



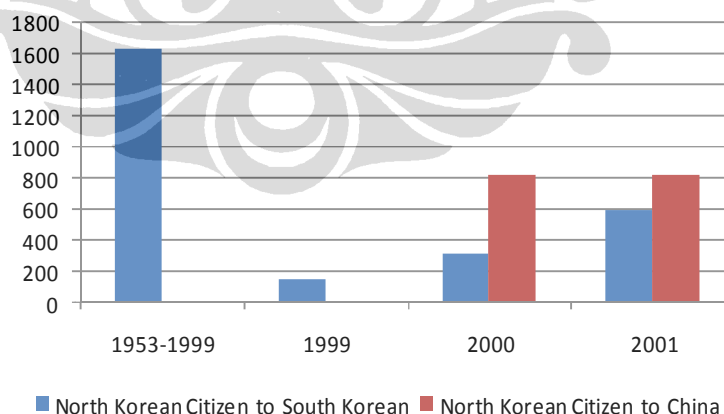
memperingatkan hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan rekonsiliasi Inter-Korea.<sup>190</sup>

Derasnya arus kedatangan warga pelarian Korea Utara di Seoul memaksa pemerintah Korea Selatan melakukan langkah-langkah lanjutan menyangkut kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan rekonsiliasi Inter-Korea. Pemerintah Korea Selatan berharap kasus-kasus tersebut tidak akan mempengaruhi rencana kedua Korea dalam mewujudkan langkah-langkah lanjutan menyangkut kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan rekonsiliasi Inter-Korea. Pemerintah Korea Selatan berharap kasus-kasus tersebut tidak akan mempengaruhi rencana kedua Korea dalam mewujudkan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya sesuai isi 'Deklarasi Bersama' dan semangat KTT Inter-Korea tahun lalu.<sup>191</sup>

Berdasarkan data statistik pemerintah Korea Selatan, sejak berakhirnya Perang Korea (1950-1953) jumlah keseluruhan warga Korea Utara yang lari ke wilayah Korea Selatan sejumlah 1633 orang. Penjabaran akan dijelaskan pada grafik dibawah ini<sup>192</sup>

**Grafik 3.4.1**

**Statistik Penduduk Korea Utara yang Melakukan Pelarian Diri ke Wilayah Korea Selatan dan Cina**



<sup>190</sup> *Ibid.*, h. 29-30.

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 30.

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 31.

Dalam grafik diatas tertera dengan jelas bahwa telah banyak penduduk Korea Utara yang telah melakukan pelarian diri ke wilayah terdekat dari negaranya, seperti Korea Selatan dan Cina, karena berbatasan langsung dengan wilayah Korea Utara. Jumlah yang tertera di wilayah Cina, pada akhir tahun 2001 akan tiba dari Cina ke Korea Selatan, setelah pemerintah Cina mengizinkan mereka untuk pindah ke negara lain, setelah Cina menjadi wilayah perantara mereka untuk melarikan diri.<sup>193</sup>

Namun, walaupun hal tersebut membuat pemerintah Korea Selatan cukup antusias, pada kenyataannya hal tersebut membuat masalah baru bagi pemerintah Korea Selatan, mengingat kapasitas penampungan yang mereka miliki untuk tahun 2001 hanya cukup menampung sebanyak 130 orang.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, h. 29-30.

<sup>194</sup> *Ibid.*, h. 31.

## BAB 4

### PROSES PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN REUNIFIKASI SEPAKBOLA ANTARA KOREA SELATAN DENGAN KOREA UTARA DI SEOUL SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA REUNIFIKASI KEDUA KOREA

#### 4.1 Kemunculan Ide Menuju Proses Reunifikasi Kedua Korea

Pandangan Korea Selatan dalam memperjuangkan reunifikasi, khususnya dalam memasuki abad ke-21 tercermin dalam kebijakan pemerintah Korea Selatan yang gencar mengadakan promosi dan kerjasama dengan Korea Utara yang merupakan suatu realisasi dalam mempersatukan bangsa yang terpisah, hal tersebut dianggap Korea Selatan sebagai masalah yang menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Kim Dae-jung.

Program-program bersama yang dijalankan Korea Utara dan Korea Selatan sebelum dan pasca terlaksananya KTT Inter-Korea dalam berbagai bidang merupakan suatu hasrat yang mendalam untuk membuka jalan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Korea yang masih terpecah hingga saat ini. Bahkan hingga menyentuh bidang olahraga, seperti pembangunan infrastruktur olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara maupun pelaksanaan event olahraga itu sendiri antara Korea Utara dengan Korea Selatan.<sup>196</sup>

Pada tanggal 29 September 1999 di daerah sungai potonggang, kota Pyongyang dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung olahraga Pyongyang oleh *Hyundai Business Group* dan disponsori oleh Ketua Kehormatan *Hyundai Group* Jong Ju-yong. *Hyundai Business Group* merupakan kelompok bisnis yang berasal dari Korea Selatan. Bagi Korea Utara sendiri, bantuan itu disambut baik oleh mereka dan pernyataan mereka akan kerjasama dan arah yang lebih positif di masa mendatang diharapkan memunculkan persatuan dan kesatuan yang makin erat diantara kedua Korea. Ketua Komite Perdamaian Asia Pasifik Korea Utara, Kim Yong-sun menyatakan bahwa bantuan yang merupakan hadiah dari perwakilan Korea Selatan untuk memajukan infrastruktur kota Pyongyang merupakan hasrat yang mendalam bagi kedua Korea untuk bersatu. Begitupula

<sup>196</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (Operasional)*, op.cit., h. 111.

dari perwakilan Korea Selatan, Ketua *Hyundai Group*, Jong Mong-hon menyatakan bahwa pembangunan gedung ini dilakukan dengan kerjasama antara pihak Korea Utara dengan Korea Selatan dan merupakan salah satu simbol peredaaan ketegangan yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>197</sup>

Dalam kerangka hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, Korea Utara konsisten menempatkan upaya tercapainya reunifikasi Korea sebagai sasaran utama dalam politik luar negerinya. Pemerintah Korea Utara berpendirian bahwa reunifikasi hendaknya diwujudkan dalam bentuk “Republik Konfederasi Demokrasi Koryo” dengan formula “Satu Bangsa, Satu Negara, Dua Sistem dan Dua pemerintahan” yang berawal dari gagasan Kim Il-sung yang dicetuskan pada bulan Oktober 1980. Dalam konteks inilah, terselenggaranya KTT Inter-Korea (Korea Utara-Korea Selatan) tanggal 13-15 Juni 2000 yang menghasilkan “Deklarasi Bersama” Utara-Selatan dapat ditempatkan sebagai momentum bagi upaya reunifikasi Korea serta terpeliharanya perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea.<sup>198</sup>

Begitupula dengan Korea Selatan yang telah lama berusaha agar hubungan dan proses reunifikasi dengan Korea Utara dapat segera dilakukan. Oleh karena itu Korea Selatan bahkan membentuk kementerian unifikasi dalam menempatkan konsistensinya atas upaya-upaya reunifikasi tersebut. Bahkan faktor dalam negeri Korea Selatan sendiri yang mengkritik pemerintahan presiden Kim Dae-jung yang dianggap terlalu lemah kepada Korea Utara hanya untuk tetap menjalankan proses reunifikasi tersebut yang memang mereka anggap seharusnya ada hubungan timbal balik apabila ingin bersatu diantara kedua belah pihak. Proyek-proyek kerjasama juga banyak yang dimulai oleh inisiatif Korea Selatan. Namun upaya-upaya pemerintah Korea Selatan tersebut juga seringkali dipengaruhi oleh hubungan pemerintah Korea Utara dengan pihak Amerika Serikat, yang akhirnya sering menghambat proses perdamaian dan peredaaan ketegangan diantara keduanya.

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti)*, *op.cit.*, h. 3-4.

#### 4.2 Inisiatif *Union for the Future of Korea* Mencari Suatu *Milestone* Dalam Memperbaiki Hubungan Kedua Negara

Park Geun-hye, anggota majelis nasional Korea Selatan yang juga menjabat sebagai ketua *Preparatory Committee for founding the Union for the future of Korea*<sup>199</sup> dari Korea Selatan, Park Geun-hye beserta rombongannya telah tiba di Pyongyang, pada tanggal 11 Mei 2002, untuk sebuah kunjungan resmi hingga tanggal 14 Mei 2002. Kunjungan Park Geun-hye yang juga merupakan putri salah satu mantan Presiden Korea Selatan Park Chun-hye tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan Kim Yong-dae, ketua rekonsiliasi nasional Korea Utara. Selama di Korea Utara, Park Geun-hye telah mengadakan pertemuan dengan para pejabat Partai Pekerja Korea (PPK) dan dewan rekonsiliasi nasional Korea Utara, yakni antara lain dengan Sekretaris Komite Sentral Partai Pekerja Korea (PPK) Kim Yong-sun, Wakil Direktur Departemen PPK, Rim Tong-ok, Direktur Sekretariat Komisi Reunifikasi Damai Korea An Kyong-ho, Ketua Perhimpunan Wanita Korea Hong Son-ok dan Kim Yong-dae sendiri tentunya.<sup>200</sup>

Dalam pidato jamuan makan malam yang diadakan untuk menghormati kunjungan Park Geun-hye, tuan rumah Korea Utara yang diwakili oleh Kim Yong-dae mengatakan antara lain bahwa meskipun kedua Korea memiliki latar belakang politik yang berbeda, tetapi hendaknya tidak menghalangi segala upaya bagi masa depan kedua bangsa. Untuk itu, ia menghimbau seluruh pihak dan politisi di Korea Utara dan Korea Selatan untuk terus mempertahankan “Deklarasi Bersama 15 Juni 2000”. Hal ini juga dikatakannya agar diperkokoh dengan semangat kebangsaan dan berlandaskan pada “Pernyataan Bersama 4 Juli 1972”, yang menjadi komitmen kedua Korea untuk mengimplementasikannya. Sementara Park Geun-hye dalam pidato balasannya, menyatakan pentingnya reunifikasi nasional yang sesuai “Pernyataan Bersama 4 Juli 1972” dan “Deklarasi Bersama

<sup>199</sup> *Union for the future of Korea* adalah suatu organisasi yang mewadahi suatu pergerakan menuju proses reunifikasi Korea. Lihat *Park Chun Hee's Daughter Goes to North; Kim Jong-il Meets Ms. Park*, May 11<sup>th</sup> 2002. [http://www1.korea.np.co.jp/pk/180th\\_issue/2002052501.htm](http://www1.korea.np.co.jp/pk/180th_issue/2002052501.htm) dan diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

<sup>200</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2002: Buku II (Kegiatan Operasional)*, *op.cit.*, h. 18.

15 Juni 2000". Hal ini disebutkannya penting dipertahankan oleh seluruh pihak guna menciptakan perdamaian di semenanjung Korea.<sup>201</sup>

Terdapat hal yang bisa menjadi suatu hal positif yang diajukan oleh Park Geun-hye kepada pemimpin tertinggi Korea Utara dalam mendamaikan dua saudara ini, dan itu diajukan pada kunjungannya ke Korea Utara, dan kunjungannya tersebut dimanfaatkan oleh Park Geun-hye untuk menanyakan persetujuan Korea Utara dalam berpartisipasi di kegiatan yang dapat digolongkan sebagai suatu bentuk *Soft Power*. Kegiatan tersebut adalah suatu Pertandingan Sepakbola, yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah permainan belaka. Namun bagi Korea Utara dan Korea Selatan, pertandingan yang dilaksanakan di ibukota Korea Selatan, Seoul pada tanggal 7 September 2002 ini, dapat dikatakan merupakan pertemuan yang menjadi *milestone* bagi hubungan kedua negara. Karena pada saat itu, perwakilan dari "*Union for the future of Korea*", Park Geun-hye dan perwakilan kedua Negara yang masing-masing diwakili oleh Ri Kwang-gun yang merupakan ketua umum federasi sepakbola Korea Utara dan Jong Mon-jun yang juga merupakan ketua umum dari federasi sepakbola Korea Selatan mengeluarkan pernyataan yang mencerminkan keinginan untuk bersatu dari kedua belah pihak, pernyataan tersebut berbunyi "*We are one regardless which side wins*" (Kami adalah satu, terlepas dari siapapun yang menang).<sup>202</sup> Pertemuan pada pertandingan ini merupakan pertemuan yang pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir di atas lapangan sepakbola,<sup>203</sup> Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-il telah berjanji akan mengirimkan tim nasional sepakbola negaranya ke Korea Selatan untuk melakukan pertandingan persahabatan yang diajukan oleh Korea Selatan dengan diwakili oleh Park Geun-hye pemimpin "*Union for the future of Korea*" di Korea Selatan, Pada saat itu, Park Geun-hye

---

<sup>201</sup> *Ibid.*, h. 18-19.

<sup>202</sup> KCNA correspondent, *Football Match for reunification takes place in Seoul*, Seoul, 7 September 2002. KCNA (Korean Central News Agency) DPRK. <http://www.kcna.co.jp> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

<sup>203</sup> CNN.com Asia, *Koreas Unite for Soccer Match*, September 7, 2002 Posted: 10:34 AM EDT (1434 GMT). <http://www.cnn.com/asia> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

mengatakan ”*Thursday I proposed the friendly match during my visit to Pyongyang last week, and Kim (Jong-il) agreed*”.<sup>204</sup>

### 4.3 Sikap Korea Utara terhadap bentuk dan proses reunifikasi kedua Korea

Meskipun timbul suasana baru rekonsiliasi di wilayah semenanjung Korea dan adanya gerakan diplomatik yang positif, namun akan terkesan dini jika menyimpulkan bahwa kalangan militer Korea Utara telah merubah atau menghentikan strategi lamanya dalam upaya mengkomunikasikan wilayah selatan semenanjung Korea. Dan terlalu dini pula mengatakan Korea Utara sudah cenderung membuka kebijakan pintu terbuka dengan dunia luar. Dalam hal ini penilaian yang baik mungkin hanyalah suatu tahap awal atau permulaan.

Dari dalam negeri Korea Utara, terutama pada kegiatan organisasi masa atau rakyat di Korea Utara, pada tanggal 25 April 1999 di Pyongyang, Korea Utara berlangsung rapat umum yang diikuti oleh kaum buruh, pekerja tani dan mahasiswa. Rapat umum itu dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Korea Selatan yang berjuang untuk memperoleh hak-hak vital mereka serta perjuangan demokrasi. Rapat umum tersebut dihadiri antara lain oleh Yun Ki-bok, anggota Presidium Komite Sentral *Front* Demokrasi untuk Reunifikasi Tanah Air dan Ryom Sun-gil, Ketua Komite Sentral Federasi Buruh Korea. Dalam pidatonya Ryom Sun-gil menyatakan antara lain bahwa langkah-langkah penguasa Korea Selatan terlihat telah menyebabkan banyaknya pengangguran, kemiskinan dan juga kematian yang disebabkan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang mengiuti kemauan kaum kapitalis asing yang saat ini telah memonopoli perekonomian Korea Selatan. Dalam rapat umum tersebut juga disepakati pengiriman surat untuk kaum buruh, petani dan mahasiswa Korea Selatan yang isinya antara lain mendukung perjuangan rakyat Korea Selatan untuk mengakhiri dominasi militer dan ekonomi Amerika Serikat guna memulihkan hak-hak asasi serta demokrasi dalam menuju masyarakat yang independen.<sup>205</sup>

<sup>204</sup> Associated Press (AP), *Kim Jong Il Promises Friendly Inter-Korean Soccer Match*, 17 May 2002. <http://www.ap.org> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

<sup>205</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (Operasional)*, *op.cit.*, h. 11-12.

Selain itu, dalam minggu ke dua bulan Agustus 1999 di Pyongyang telah berlangsung sebuah forum internasional untuk “Pembongkaran Tembok Beton”. Forum tersebut diadakan bertepatan dengan 20 tahun dibangunnya tembok beton oleh Korea Selatan yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Forum ini dimaksudkan untuk menggalang solidaritas guna menghapuskan tembok beton tersebut dan diikuti oleh berbagai organisasi pendukung reunifikasi dan perdamaian Korea dari berbagai negara Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Selatan. Dalam pidato sambutannya Sekretaris CC-Partai Pekerja Korea dan Ketua SPA Cho Thae-bok mengatakan antara lain bahwa forum ini merupakan kesempatan penting dalam menghadang gerak langkah anti-reunifikasi penguasa Korea Selatan yang tekah membangun tembok penghalang reunifikasi. Pada akhir pertemuan, forum telah mengeluarkan seruan yang antara lain menyatakan bahwa masyarakat dunia mempunyai harapan baru akan perdamaian dan kemakmuran dalam abad ke-21 dan mendesak segera dibongkarnya tembok beton yang memisahkan korea.<sup>206</sup>

Penyatuan kedua Korea dalam waktu secepat mungkin merupakan hasrat kuat bangsa Korea untuk menyatukan negerinya yang terpisah. Penyatuan nasional Korea tersebut memerlukan tiga syarat mendasar, yakni tiga prinsip penyatuan nasional, sepuluh butir program penyatuan seluruh bangsa dan rancangan acuan bagi sebuah negara “Republik Konfederasi Demokrasi Koryo (*Democratic Confederal Republic of Koryo*)”. Tiga prinsip penyatuan negeri meliputi independensi, penyatuan secara damai, dan penyatuan nasional secara menyeluruh. Sepuluh butir program penyatuan negeri yang diharapkan akan dapat menempatkan bangsa Korea sebagai bangsa yang bermartabat, baik di Utara maupun di Selatan, mengakui adanya agama maupun tidak serta menghormati segala perbedaan masing-masing, dan dilakukan dengan upaya bersama. Sedangkan rancangan acuan bagi pembentukan suatu negara “Republik Konfederasi Demokrasi Koryo” adalah usulan mengenai pendirian negara konfederasi yang berdasarkan “satu bangsa, satu negara, dua sistem dan dua pemerintahan”. Dalam kerangka ini, partai-partai politik dengan ideologi yang

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, h. 13.



berbeda membentuk pemerintahan koalisi, sebagaimana telah diterapkan di banyak negara antara lain Cina yang menerapkannya sejak kembalinya Hongkong dan Makau.<sup>207</sup>

Setelah setengah abad terpisah, bangsa Korea merasakan penderitaan dan kesengsaraan akibat terpisah satu sama lain. Dengan penyatuan kedua Korea, maka berarti akhir dari dominasi dan campur tangan kekuatan asing, kemerdekaan seluruh negeri, penyatuan kembali ikatan persaudaraan serta tercapainya kesatuan bangsa. Bagi Korea Utara, pemisahan kedua Korea antara lain juga didorong oleh arus globalisasi dan campur tangan kekuatan asing, sementara pemerintah Korea Selatan dipandang telah dengan sengaja memasukkan dirinya ke dalam politik engagement bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang “sistem kerjasama” melawan Korea Utara sebagai target perang mereka. Disebutkan bahwa bagi Korea Utara penyatuan kedua Korea merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kemakmuran dan kejayaan dan hal ini merupakan tugas bersejarah bagi seluruh rakyat Korea. Selanjutnya Korea Utara juga menegaskan bahwa apabila perdamaian abadi dan stabilitas ingin tercipta di semenanjung Korea, serta proses penyatuan Korea dapat terus berjalan dengan baik, maka tentara Amerika Serikat secepatnya harus keluar dari Korea Selatan.<sup>208</sup>

#### **4.4 Situasi di semenanjung Korea dan Seoul secara khusus menjelang penyelenggaraan pertandingan reunifikasi sepakbola antara Korea Selatan dengan Korea Utara**

Situasi keamanan di semenanjung Korea pada tahun 2001 atau setahun sebelum inisiatif untuk menyelenggarakan pertandingan reunifikasi sepakbola antara Korea Selatan dengan Korea Utara masih belum menunjukkan akhir persaingan indikatornya, karena beberapa kali pihak Korea Utara terlihat melanggar NLL, di tahun 2001 pihak Korea Utara telah melanggar NLL sebanyak 12 kali, dan terakhir dilakukan pada tanggal 18 November 2001 pagi hari dimana sebuah kapal patroli Korea Utara melintasi NLL sejauh 1.8 mil laut dan pada beberapa hari kemudian terjadi insiden baku tembak tepatnya pada tanggal 27

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>208</sup> *Ibid.*, h. 26-27.

November 2001 di DMZ yang disebabkan oleh pihak pengawal Korea Utara memasuki daerah DMZ sejauh 1 km lebih, dan telah diberikan tembakan peringatan oleh pihak pengawal Korea Selatan, namun terjadi salah paham sehingga timbul peristiwa yang sangat disesalkan keduanya, terutama oleh pihak Korea Selatan.<sup>209</sup>

Uji tembak rudal Korea Selatan pada tanggal 22 November 2001 dengan jarak jangkauan 100 km yang dilakukan oleh *Agency for Defense Development* (ADD) untuk target sejauh 50 km, diarea penembakan dekat Byeonsan, propinsi Cholla Utara, Korea Selatan dengan sasaran tembak ke laut barat dan diberi nama *Korea Portable Surface to Air Missile* (K-PSAM). Sekalipun hal itu telah sesuai petunjuk dan persetujuan *Missile Control Technology Regime* (MCTR) tetap saja memicu permasalahan diantara kedua Korea, Korea Utara terus menegur pihak Amerika Serikat akan hal ini. Korea Utara menilai Amerika Serikat tidak mempunyai keadilan dalam hal ini. Kegiatan yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut menambah kompetisi persaingan persenjataan diantara keduanya.<sup>210</sup>

Pada tanggal 3 April 2002, pemerintah Korea Selatan sempat mengirimkan seorang utusan yang merupakan penasihat khusus dari Presiden Kim Dae-jung, yaitu Rim Dong-won ke Korea Utara. Kunjungan tersebut dalam upaya untuk memulai kembali hubungan bilateral dan rekonsiliasi. Kunjungan selama tiga hari itu merupakan kontak publik pertama diantara kedua belah pihak secara resmi sejak November 2001 dan pasca KTT Inter-Korea 2000, menyusul perang retorika antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Disebutkan bahwa maksud kunjungan utusan khusus ini adalah untuk mendesak Korea Utara menghidupkan kembali proyek kerjasama Korea Utara-Korea Selatan yang sempat terhenti. Selain itu, Rim Dong-won juga membawa sebuah pesan pribadi dari Presiden Kim Dae-jung pada pemimpin tertinggi Korea Utara, Marsekal Kim Jong-il. Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk meyakinkan Kim Jong-il agar memenuhi janjinya mengunjungi Korea Selatan yang merupakan hasil dari “Deklarasi Bersama”. Motif lain juga diketahui bahwa kunjungan tersebut juga dilakukan

---

<sup>209</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional)*, op.cit., h. 136.

<sup>210</sup> *Ibid.*, h. 136.

untuk membujuk Korea Utara agar memulai kembali perundingan dengan pihak Amerika Serikat dan Jepang. Pengiriman utusan khusus itu dianggap Korea Selatan sebagai upaya terakhir yang dilakukan oleh Presiden Kim Dae-jung dalam rangka rekonsiliasi kedua negara, sehubungan dengan masa jabatannya yang akan segera berakhir.<sup>211</sup>

#### 4.5 Situasi didalam Sangam World Cup Stadium pada saat-penyelenggaraan pertandingan persahabatan sepakbola antara Korea Selatan dengan Korea Utara

Memuluskan jalan dalam upaya rekonsiliasi dan reunifikasi, tim nasional sepakbola Korea Utara dan Korea Selatan memainkan pertandingan penting. Pertandingan yang disponsori oleh *Europe-Korea Foundation* dan disupervisi oleh *Korean Football Association* (Persatuan Sepakbola Korea Selatan) selaku panitia pelaksana tempat pertandingan ini disebut Pertandingan Reunifikasi.<sup>212</sup>

Keadaan di dalam Stadion juga tak jauh berbeda, diawali dengan kemunculan para pemain dari kedua tim dengan mengenakan kostum kebanggaan masing-masing, namun dengan perbedaan yang sangat menonjol, yaitu dilekatkannya emblem logo jazirah Korea di dada masing-masing kostum kedua tim, serta dibawanya bendera jazirah Korea kedalam lapangan oleh para pemain dari kedua tim dengan diiringi oleh alunan lagu<sup>213</sup> "Arirang".<sup>214</sup>

Para pemain memasuki lapangan dengan saling berpegangan tangan dengan diiringi nyanyian para penonton *Jo Guk Tong Il! (Reunify Fatherland)*. Slogan-slogan seperti "Let us become the one and startle the world" dan

<sup>211</sup> KBRI Pyongyang, *Laporan Tahunan 2002: Buku II (Kegiatan Operasional)*, h. 15.

<sup>212</sup> The People's Korea, *North and South Korea Unite as One in Inter-Korean Soccer Match*, No. 1.919. September 14<sup>th</sup> 2002.

<sup>213</sup> Caroline Gluck, BBC Seoul correspondent in BBC News world edition (Asia-Pacific news world page), *High Emotions in Korea Football Stand*, Saturday, 7 September, 2002, 21:18 GMT 22:18 UK. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2242612.stm> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

<sup>214</sup> *Arirang* merupakan lagu kebanggaan bangsa Korea, baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan. Lagu ini tercipta dari pengharfiah bahasa Korea, sejarah dan kebudayaan bangsa Korea yang berarti "kekasihku sayang. Kedua Korea mengenal betul lagu ini, karena pada dasarnya mereka berasal dari budaya yang sama, ras yang sama. Mereka hanya terpecah oleh tirai ideologi yang hingga saat ini menjadi suatu perbedaan yang bermasalah. Lihat [http://rki.kbs.co.kr/indonesian/enter/music\\_concert\\_detail.htm?No=2620](http://rki.kbs.co.kr/indonesian/enter/music_concert_detail.htm?No=2620) diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

“*Whichever team may win, we are one*” terdapat di tiap-tiap tribun stadion. Penonton di Korea Selatan memberikan sambutan hangat kemunculan tim nasional sepakbola Korea Utara didalam lapangan sambil memegang spanduk besar bertuliskan “*We are one*”, mereka bertepuk tangan sepanjang pertandingan yang dilakukan keduanya.<sup>215</sup>

Kedua tim memainkan pemain utama dalam tim nasional sepakbola U-23-nya, sebagai persiapan untuk ikut serta dalam 14<sup>th</sup> Asian Games di Busan, Korea Selatan, yang akan dimulai pada akhir September 2007. Korea Utara mendominasi pertandingan babak pertama, sementara Korea Selatan mendominasi permainan di babak kedua, namun Korea Selatan tidak dapat melunakkan pertahanan tim Korea Utara dan gagal mencetak gol. Bahkan rakyat Korea yang telah lama bermigrasi ke Jepang akibat konflik yang berkepanjangan diantara kedua negara tersebut ikut bergabung untuk mengorganisir delegasi-delegasi yang akan menonton pertandingan bersejarah tersebut dari Jepang, sebagai bagian dari proses rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. An Yon-hak, rakyat Korea yang tinggal di Jepang dan berprofesi sebagai pemain sepakbola profesional di sebuah klub divisi 2 liga Jepang (J-League) Albirex Nigata terpilih menjadi pemain di tim nasional Korea Utara dalam pertandingan reunifikasi tersebut.<sup>216</sup>

Pertandingan pun diawali dengan *kick-off* yang dilakukan oleh tim nasional sepakbola Korea Utara, pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 0-0. Seusai pertandingan, pemain dari kedua tim yang sejak lama telah bertikai tersebut, benar-benar menunjukkan rasa persahabatan mereka dengan berlari bersama serta membawa bendera jazirah Korea.<sup>217</sup>

Bahkan, mantan pelatih tim sepakbola Korea Utara pada era awal tahun 1990-an, yaitu Yun Myong-chan mengatakan :

- “*The feeling of most attending this game was that all Koreans emerged as winners from this milestone event, "It's regrettable that I can't be the head*

<sup>215</sup> The People's Korea, *op.cit.*

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> KCNA correspondent, *op.cit.*

*coach for either side. I can't lead either side, the North or the South now. In 1990, I came to Seoul bringing the North Korean side to play its friendly. "But despite my personal regrets, I think this is a good idea, for the two sides to play together. Whoever wins or loses isn't so important. This is a friendly match."*<sup>218</sup>

Begitupula dengan Ketua Umum *Korean Football Association* (Persatuan Sepakbola Korea Selatan) saat itu, Chong Mong-jun berkata *"It would be a historic match which would unite people from the two sides"*. Dari pihak Korea Utara pun, sosok Ri-Kwang-gun yang merupakan Ketua Umum *DPRK Football Association* dan Menteri Perdagangan Korea Utara mengatakan dalam pidatonya :

- *"At the opening ceremony that the Korean people will show the power of unified Korea to the world, referring to the achievement of the north Korean football team in the 1966 World Cup and of the south Korean football team in the 2002 World Cup."*<sup>219</sup>

Park Geun-hye, yang merupakan pemimpin *Union for the future of Korea* dan juga bertindak sebagai salah satu eksekutif dalam *Europe-Korea Foundation*<sup>220</sup> juga berbicara *"the activation of inter-Korean sports exchanges would promote peace between both sides and serve an opportunity for the cooperative development of the north and the south."*<sup>221</sup>

Seperti halnya keempat tokoh diatas, pelatih tim nasional sepakbola Korea Utara saat itu, Ri-Jong-man, turut mengemukakan pendapatnya setelah pertandingan usai :

- *"The north got to the last eight of the 1966 World Cup in England, and the south was among the last four of the 2002 Korea - Japan World Cup. If we get together we can be a powerhouse, Korea Will Be A Great Team If North and South Korea Unite as One."*<sup>222</sup>

<sup>218</sup> Caroline Gluck, BBC Seoul correspondent in BBC News world edition (Asia-Pacific news world page), *op.cit.*

<sup>219</sup> The People's Korea. *op.cit.*

<sup>220</sup> *Europe-Korea Foundation* atau yang disingkat EKF, merupakan yayasan *Charity* yang dibentuk oleh Uni Eropa pada bulan Mei 2001. EKF melakukan berbagai macam program dan penanganan lebih jauh dalam promosi persahabatan serta rasa kesepahaman diantara duo Korea. EKF program meliputi beasiswa, pelatihan seminar, dan mendukung kegiatan organisasi amal di Korea Selatan. EKF menyediakan beasiswa untuk pelajar dari Korea Utara dan Korea Selatan yang ingin belajar di Eropa. Lihat <http://www.ekf.or.kr> diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

<sup>221</sup> The People's Korea. *op.cit.*

<sup>222</sup> *Ibid.*

Akan tetapi, kali ini dengan berapa pun hasilnya, pertandingan sepakbola reunifikasi antara tim Korea Selatan dan Korea Utara patut disambut di tengah sejumlah negara terancam terpecah hanya karena nasionalisme maupun emosi politik sempit. Kedua tim 'saudara sekandung' tersebut bermain tanpa gol dalam pertandingan persahabatan di Sangam *World Cup Stadion*, Seoul. Sekitar 60.000 penonton menyaksikan kekuatan pertahanan Korea Utara yang dikawal pemain-pemain jangkung, yang lebih kreatif daripada para pemain Korea Selatan.<sup>223</sup> Pertandingan ini juga menjadi simbol hubungan baik yang berkelanjutan pasca kesepakatan pembangunan jalan dan jalur kereta api lintas perbatasan antara kedua negara di akhir bulan agustus 2002 yang merupakan implementasi dari KTT Inter-Korea (13-15 Juni 2000).<sup>224</sup>

Pertandingan ini juga mempunyai dampak positif bagi hubungan politik kedua negara, pasalnya, semenjak kedua negara yang bertikai tersebut sepakat untuk menggelar pertandingan dalam mensukseskan proses reunifikasi keduanya, hubungan keduanya sedikit mencair. Aktifitas militer yang selama ini selalu memanas di semenanjung Korea dengan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh Kedua Korea serta terjadinya insiden-insiden di laut Korea Utara dan Selatan pada tahun 1998-1999 menjadi sedikit teredam, setelah adanya kesepakatan untuk bertemu di arena KTT Inter-Korea dan pertandingan persahabatan Sepakbola di Seoul. Perubahan-perubahan sikap ini tergolong langka bagi beberapa negara yang sedang bertikai, apalagi terjadi setelah diselenggarakannya pertandingan persahabatan, yang notabene bagi orang awam hanyalah pertandingan sepakbola, yang dimana si kulit bundar diperebutkan oleh sebelas orang yang menginginkan kemenangan dalam suatu permainan.

Kalau instrumen diplomasi tidak efektif dan tindakan militer tidak *feasable* dilakukan, tampaknya ketegangan di Semenanjung Korea akan terus berlangsung. Akan tetapi, suatu *Soft Power* lain tampaknya untuk sementara menjadi alat yang cukup ampuh dalam meredam perseteruan kedua negara ini. Dalam hal ini, sepakbola juga dapat dikatakan sebagai jembatan pemersatu, dan

<sup>223</sup> "Tim Korea Utara Menahan Korea Selatan 0-0", *Media Indonesia*, 7 September 2002, <http://www.mediaindonesia.com> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

<sup>224</sup> CNN.com Asia, *op.cit.*

membantu masyarakat Korea meredam konflik politik yang terjadi, serta mempersatukan mereka dalam satu kesatuan bangsa.<sup>225</sup>

#### **4.6 Implementasi pertemuan KTT Inter-Korea dan Penyelenggaraan-pertandingan reunifikasi sepakbola antara Korea Utara dengan Korea Selatan**

Pertemuan-pertemuan lanjutan pasca KTT Inter-Korea yang diselenggarakan Korea Utara dan Korea Selatan dalam tataran para petinggi dan pengambil keputusan diantara keduanya merupakan suatu hal penting dalam sejarah proses reunifikasi Korea setelah berakhirnya perang Korea pada tahun 1953. Pujian memang pantas dialamatkan kepada kedua pemimpin di semenanjung Korea saat itu, walaupun inisiatif lebih banyak dihasilkan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung. Dengan terselenggaranya berbagai macam pertemuan pasca KTT Inter-Korea (hasil “Deklarasi Bersama”), disusul dengan dilaksanakannya secara periodik program untuk pertemuan keluarga yang terpisah di kedua negara yang sering bertikai tersebut, serta upaya penyambungan kembali jalur kereta api antara Seoul (wilayah Korea Selatan) dengan Shinouji (wilayah Korea Utara) melalui pembersihan ribuan ranjau yang berada di jalur tersebut. Hal ini menunjukkan suatu pencapaian besar bagi duo Korea dalam proses reunifikasi mereka.

Walaupun banyak dari para pengamat politik menyatakan tidak yakin benar bahwa proses reunifikasi dapat terlaksana secara cepat, karena dari pihak angkatan bersenjata Korea Selatan tampaknya tidak terpengaruh oleh keputusan para politisi dan tataran eksekutif untuk berbaik hati dengan Korea Utara, karena 65% kekuatan militer kedua negara masih tersebar disepanjang perbatasan kedua negara, bahkan propaganda perbatasan di media lokal yang telah dihentikan untuk menghormati pertemuan puncak tersebut dalam kenyataannya hanya dihentikan untuk beberapa hari saja dan selanjutnya tetap berlangsung seperti biasanya. Dengan demikian, timbul pula pertanyaan, jika reunifikasi sulit untuk terlaksana dalam waktu dekat, lalu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh kedua pemimpin negara yang bertikai tersebut? Sepertinya masing-masing kedua negara

<sup>225</sup> Caroline Gluck, BBC Seoul correspondent in BBC News world edition (Asia-Pacific news world page), *op.cit.*

mempunyai *interest* yang berbeda dan dikemas dengan baik serta disatukan dalam pertemuan puncak tahun 2000 (KTT Inter-Korea). Analisa terhadap Korea Utara sendiri lebih menekankan pada perubahan sikap yang dikarenakan keadaan sulit yang menimpa mereka seperti krisis ekonomi sejak runtuhnya negara yang membawa pengaruh ideologi komunis bagi mereka, yaitu Uni Soviet. Ditambah pula dengan keadaan alam yang tidak mendukung seperti gagalnya panen dalam tingkat nasional yang diakibatkan oleh bencana banjir besar yang melanda wilayah Korea Utara.<sup>226</sup>

KTT tiga hari di Pyongyang (13-15 Juni 2000), dapat dikatakan berhasil meletakkan dasar-dasar bagi pembicaraan lebih lanjut di masa mendatang. Kedua pemimpin memperlihatkan rasa puasnya terhadap hasil yang dicapai karena ada titik kesamaan dari kedua pihak yang menginginkan keberhasilan KTT dan sekaligus keinginan untuk menyelesaikan masalah Korea oleh mereka sendiri. Dalam rangka menangani isu-isu kemanusiaan, seperti antara lain reuni keluarga dan kerabat yang telah lama terpisah tampaknya mendapat sambutan yang positif dari kedua belah pihak walaupun dalam pelaksanaannya nanti masih tetap dibawah pengawasan yang ketat oleh pihak Korea Utara. Kesepakatan untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional yang berimbang jelas akan menjadi beban bagi Korea Selatan, mengingat kondisi ekonomi Korea Utara yang jauh tertinggal dari Korea Selatan. Oleh karena itu, Presiden Kim Dae-jung mendesak Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dan meminta Jepang dan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan ekonominya kepada Korea Utara.<sup>227</sup>

Dalam rangka membentuk kepercayaan satu sama lain. Kedua belah pihak juga dituntut bersama-sama mewujudkan tanpa saling curiga. Karena selama ini selalu ada rasa kecurigaan dari Korea Utara bahwa Korea Selatan bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang senantiasa bersikap bermusuhan dengan Korea Utara. Dalam kurun waktu 50 tahun pasca berakhirnya Perang Korea (1950-1953), antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan termasuk Amerika Serikat tidak ada

---

<sup>226</sup> KBRI Seoul, *Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional)*, *op.cit.*, h. 7-9.

<sup>227</sup> *Ibid.*, h. 25-39.



perjanjian perdamaian yang berlaku. “Perjanjian Gencatan Senjata” yang disepakati tahun 1953 nampaknya sudah tidak diakui kesepakatannya oleh pihak yang terkait akibat seringnya pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak. Melalui pertemuan KTT ini, sepertinya apa yang diinginkan oleh Korea Utara agar diadakannya ‘Perjanjian Perdamaian’ menjadi sebuah peluang yang kian terbuka. Dengan terbukanya peluang untuk melakukan dialog-dialog di masa mendatang akan merupakan sarana yang dapat mengurangi ketegangan di semenanjung Korea. Terbukanya dialog ini juga akan menciptakan peluang untuk menjadikan Korea Utara lebih cepat membuka diri.<sup>228</sup>

Sedangkan mengenai penyelenggaraan pertandingan reunifikasi, sampai tahun 2002, yang dimana Korea Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Jepang pada tahun tersebut. Dialog yang sempat terhenti beberapa tahun lamanya kembali dicoba untuk dicairkan melalui pertandingan sepak bola diantara kedua negara.<sup>229</sup> Bahkan sempat beredar kabar untuk memasukkan pemain Korea Utara di tim piala dunia Korea dan menggelar salah satu laga di Korea Utara, kendati akhirnya gagal, walaupun sudah disarankan oleh presiden FIFA Sepp Blatter untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan *event* piala dunia 2002 yang diadakan di wilayah bagian saudaranya.<sup>230</sup>

Kita mengetahui bahwa selama ini dunia berusaha melakukan upaya perdamaian dua bangsa yang bersaudara ini, namun kini, bukan hanya perdamaian yang dapat direngkuh, tapi proses reunifikasi menjadi hal yang memungkinkan untuk dilaksanakan, walaupun masih jauh dari harapan. Pertemuan di atas lapangan hijau kali ini dapat dikatakan mempunyai anomali tersendiri, karena kita ketahui sebelumnya, pertemuan kedua Korea diatas lapangan hijau pernah terjadi pada tahun 1993. Kala itu, Korea Selatan mengungguli Korea Utara dengan skor

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> Zainal A. Budiyo ”Sepakbola Sebagai Elemen Soft-Power”, *Suara Karya*, 7 Agustus 2007.

<sup>230</sup> “DPRK Airs World Cup Matches,” *Korea Times* 3 June 2002.

<http://www.cankor.ca/issues/86.htm> diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

3-0, dan keadaan tak pernah tampak baik hingga niat bersama untuk menggelar pertandingan persahabatan muncul pada tahun 2002.<sup>231</sup>

Pertandingan reunifikasi tersebut merupakan momen penting untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Korea adalah bangsa yang mempunyai ciri dan identitas yang sama. Hal tersebut benar-benar ditunjukkan pada pertandingan reunifikasi Inter-Korea pada tanggal 7 September 2002. Kedua Korea walau mengenakan kostum kebesaran yang berbeda di atas lapangan, akan tetapi simbol yang ditunjukkan pada momen penting tersebut adalah simbol persatuan dan perdamaian kedua Korea, simbol jazirah atau semenanjung Korea dan mengumandangkan lagu *Arirang* adalah hal penting untuk melakukan pendekatan kebudayaan dan kebiasaan yang digemari oleh rakyat Korea pada khususnya. Kedua Korea ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka adalah bangsa yang bersatu. *Reunification match*, itulah titel pertandingan yang diselenggarakan atas inisiatif Park Geun-hye selaku ketua *Union for the of Korea*. Dan sekali lagi kedua Korea menunjukkan inisiatif yang bersifat positif diantaranya keduanya untuk bertemu dengan niat menunjukkan identitas penting mereka sebagai sebuah bangsa yang akan kembali pada persatuan.

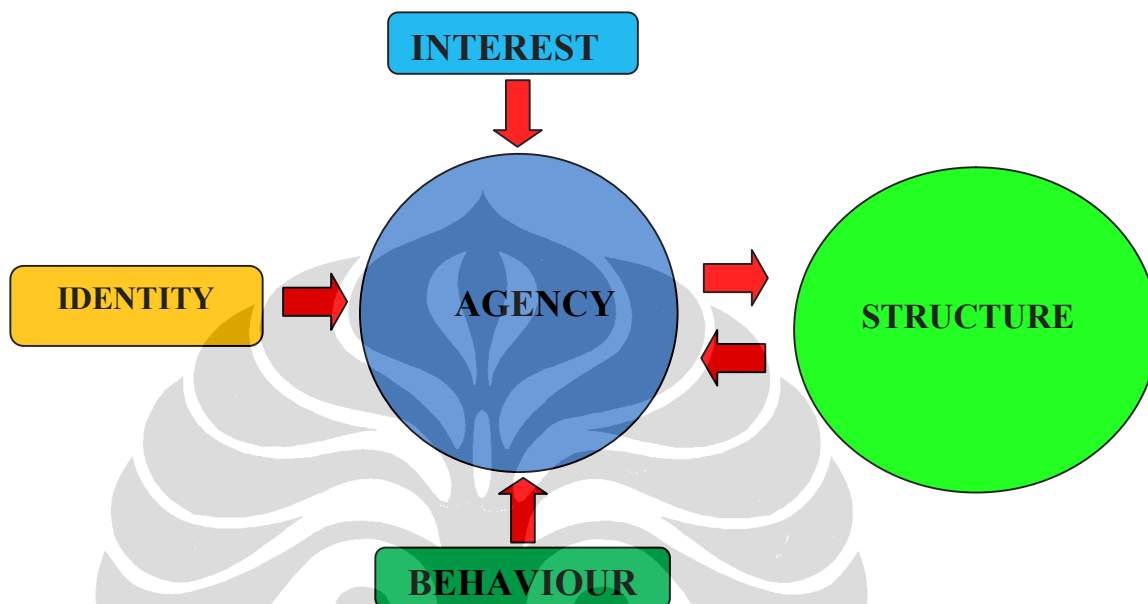
Pada penerapan teori konstruktivis mengenai peredaan ketegangan di semenanjung Korea. Yang dapat dijelaskan adalah mengenai peranan para Agen yang didalam studi kasus ini adalah keberadaan para aktor yang berperan didalamnya, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Keberadaan para aktor yang berkepentingan tersebut, sekaligus juga berperan sebagai agen yang mempengaruhi keadaan, situasi dan kondisi serta segala aspek yang terkait didalamnya dengan fokus pada peredaan ketegangan kedua Korea di semenanjung Korea. Para agen mempunyai pengaruhnya masing-masing terhadap satu sama lain serta mempunyai pengaruh pula terhadap wilayah semenanjung Korea yang menjadi struktur dalam pembahasan teori konstruktivis.<sup>232</sup> Pola dan alur hubungan antara agen dan struktur yang kesemuanya berdasarkan pemahaman dari

<sup>231</sup> "Lima Tahun Berlalu, Prospek Reunifikasi Korea Makin Samar" *Suara Merdeka*, 16 Juni 2005, [http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/16/x\\_int.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/16/x_int.htm) diakses pada tanggal 15 September 2008.

<sup>232</sup> Stefano Guzzini, *op.cit.*, h. 7.

konstruktivis versi Stefano Guzzini yang dimana struktur dan agen saling mempengaruhi akan dijelaskan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 4.6.1**  
**Pola dan Alur Hubungan antara Agen dan Struktur**



Berdasarkan pada gambar diatas, Agen merupakan aktor yang berperan di dalam struktur, agen tersebut adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sedangkan struktur, yang dalam studi kasus ini adalah wilayah semenanjung Korea dan Asia Timur itu sendiri juga mempengaruhi para agen yang memainkan peran di dalam wilayah (struktur) tersebut. Semenanjung Korea telah mempengaruhi dan menanamkan ketertarikan tersendiri kepada para aktor, bahkan diluar Korea Utara dan Korea Selatan sendiri, dan ketertarikan itu muncul sejak dari masa kedisnatian Cina dan Jepang, sebagai agen yang telah lama memainkan peranannya di dalam wilayah tersebut. Wilayah semenanjung Korea memang mempunyai pengaruh dan daya tarik tersendiri pada masa kontemporer, atau tepatnya pasca Perang Dunia II. Wilayah semenanjung Korea sebagai struktur pada masa pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, mempengaruhi para agen untuk terlibat di dalam permasalahan yang terdapat di dalam wilayah tersebut, khususnya mengenai perpecahan dua negara bersaudara yang pernah terlibat peperangan diantara keduanya dan yang diakibatkan oleh pemahaman terhadap ideologi yang bertolak belakang diantara keduanya. Ideologi yang berbeda dari keduanya lambat laun dipengaruhi oleh

struktur dan sistem yang memberikan ruang gerak pada kedua aktor untuk memiliki persamaan persepsi satu sama lain untuk saling membutuhkan. Para aktor memainkan peranana sebagai dua polar yang mengisi kesenjangan hubungan melalui interaksi reunifikasi yang diharapkan mampu memberikan pemahaman sejarah dan kepentingan bertetangga baik demi satu identitas. Proses reunifikasi ini kemudian menjadikan hubungan keduanya sedikit mencarir atau mereda. Situasi ini menjadi celah hubungan keduanya dalam situasi yang tidak lagi begitu kontradiktif satu sama lain.<sup>233</sup>

*Behaviour* dalam studi kasus ini adalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan kedua Korea pasca terselenggaranya KTT Inter-Korea 2000 dan merupakan implementasi serta hasil dari pertemuan tertinggi kedua Korea tersebut yang dituangkan dalam “Deklarasi Bersama 15 Juni 2000”. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan keduanya merupakan jalan dan proses menuju keinginan bersama dan kepentingan masing-masing yang tercemin dalam *Shared Ideas* dan *Interest* masing-masing negara. Bagi Korea Selatan, kebijakan *Sunshine Policy* merupakan jalan dalam mewujudkan *Interest* yang mereka inginkan.<sup>234</sup>

*Shared Ideas*<sup>235</sup> yang disampaikan adalah terjadinya rekonsiliasi dan reunifikasi secara damai, tidak adanya lagi ketegangan dan kecurigaan diantara keduanya. Keduanya berhasil menyatukan persepsi dalam pertemuan tertinggi yang dinamakan KTT Inter-Korea, dan keduanya juga mempunyai niat yang sama, namun dalam proses tersebut selalu dipengaruhi oleh hubungan-hubungan dengan negara ketiga yang tidak ingin pengaruhnya disingkirkan begitu saja.

Masing-masing Korea, dengan wilayah yang terpisah, Utara dan Selatan, serta mempunyai *interest* yang berbeda pula walaupun dengan kesamaan jalan, yaitu reunifikasi. Korea Utara ingin sekali bersatu dengan Korea Selatan dengan mewujudkan cita-cita yang telah lama ditanamkan oleh mantan Presiden Kim Il-sung, yang juga merupakan ayah dari presiden Korea Utara saat ini, yaitu Marsekal Kim Jong-il, walaupun pergeseran tujuan penyatuan Semenanjung

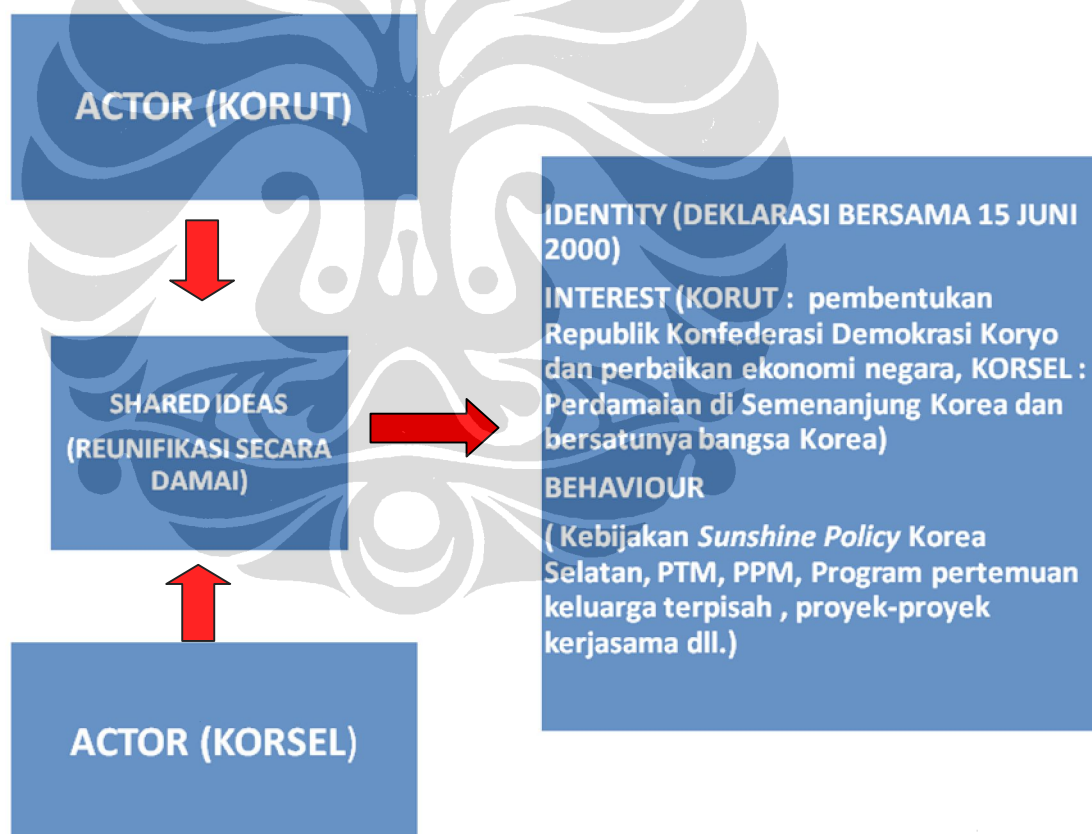
<sup>233</sup> Wendt, *Social Theory of International Politics*, *op.cit.* h. 171.

<sup>234</sup> *Ibid.*

<sup>235</sup> *Ibid.*

Korea telah bergeser, yang sebelumnya berupa penanaman ideologi *Juche* secara utuh dan kini menjadi pemahaman akan pentingnya “Satu Bangsa, Satu Negara, Dua Sistem dan Dua Pemerintahan” yang telah dicetuskan oleh mantan Presiden Kim Il-sung sejak tahun 1980 dengan tujuan mendirikan Republik Konfederasi Demokrasi Koryo. Begitupula dengan Korea Selatan, perdamaian di Semenanjung Korea adalah sesuatu yang sangat penting, oleh karena itulah proses reunifikasi harus diwujudkan dengan tujuan menyatukan bangsa Korea. Visualisasi penerapan teori konstruktivis berdasarkan pola pikir Stefano Guzzini pada studi kasus ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini<sup>236</sup>

**Gambar 4.6.2**  
**Penerapan Teori Konstruktifis Pada Peredaan Ketegangan Konflik**  
**Korea Utara-Korea Selatan**



<sup>236</sup> Stefano Guzzini, *op.cit.*, h. 2.

Dari segi identitas, seperti yang dikatakan oleh Alexander Wendt, *Identity are the Basic of Interest*,<sup>237</sup> disini identitas kedua Korea yang pada dasarnya merupakan satu bangsa dan dipisahkan oleh kepentingan dan ingin pula bersatu demi kepentingan yang dinamakan perdamaian, identitas sebuah aktor merupakan suatu hal penting untuk mencapai suatu kepentingannya, dalam hal ini kedua Korea yang telah lama bertikai ingin menciptakan perdamaian di semenanjung Korea, bahkan mereka juga mempunyai cita-cita mendirikan pemerintahan yang bersatu dalam satu wilayah dan satu bangsa yang berdaulat seperti yang diinisiatifkan oleh Korea Utara. Pada dasarnya kedua negara mempunyai keinginan kuat dan inisiatif besar dalam proses reunifikasi, namun kepentingan aktor lain terhadap wilayah semenanjung Korea yang menjadi struktur (dalam perspektif konstruktivis) muncul dan seringkali menghambat proses dan keinginan dua negara bersaudara tersebut. Identitas masing-masing negara terlihat dari *national interest* yang tampak dalam proses kesehariannya. Bagi Korea Utara yang pola dan tingkah kesehariannya berdasarkan pada kebijakan kepala pemerintahannya, dapat dilihat melalui *individual level analysis*, yang dimana Marsekal Kim Jong-il sangat berperan dalam mengatur langkah-langkah dan sikap yang diambil oleh Korea Utara dalam dinamika politik internasional.

---

<sup>237</sup> Wendt, *op.cit.*, h. 141.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menekankan pada proses peredaan ketegangan dalam konflik Korea Utara dan Korea Selatan pada rentang waktu 2000-2002. Ketegangan yang terjadi antara Korea Utara dengan Korea Selatan sejak perpecahan keduanya yang menghasilkan Perang Korea (1950-1953) mempunyai berbagai macam dinamika yang terjadi. Pasang surut hubungan keduanya menjadi suatu proses perjalanan menuju interest bersama, yaitu rekonsiliasi atau lebih tepatnya reunifikasi yang memang telah lama terpikirkan oleh keduanya. Dimulai dari ketika cara pandang Korea Utara yang berubah kearah positif akibat beban berat yang mereka alami di krisis pangan dan ekonomi akibat bencana alam, Korea Utara berpikir akan masa depan mereka di Semenanjung Korea. Keinginan untuk bersatu telah ada, bahkan telah lama ada di benak pemimpin besar Korea Utara yang telah wafat, yaitu Kim Il-sung untuk bersatu dengan pihak selatan. Cita-cita tersebut telah dicetuskan oleh Kim Il-sung sejak tahun 1980 dengan formula “Satu bangsa, Satu negara, Dua Sistem dan Dua Pemerintahan”. Pola penerapan seperti ini pernah terjadi ketika Cina berhasil mempersatukan Hongkong dan Makau ke dalam wilayah kekuasaannya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *Case Study* dan *Historical Perspective Research* dengan tanpa meninggalkan tahapan kritik sebagai bagian penting dalam melakukan penelitian. *Case Study* yang diangkat adalah konflik dua negara bersaudara yang terpisah karena tirai ideologi yang perbedaannya sangat tajam. Sedangkan kerangka berpikir yang diterapkan adalah penerapan teori konstruktivis ke dalam penulisan. Teori konstruktivis dianggap tepat dalam mengetahui proses peredaan ketegangan yang terjadi antar aktor. Penerapan teori konstruktivis dalam hubungan antar aktor berhasil memunculkan *agent, structure, shared ideas, identity, interest, dan behaviour* yang dalam *Case Study* ini berhasil menyatukannya dalam proses pembentukan peredaan ketegangan antara aktor yang satu dengan yang lainnya. Dalam *Case Study* ini tidak dapat dipisahkan pula pemahaman akan *Security* dan *Bilateral Relation*.

Selain itu, perbandingan *Arms* dan *Power* juga menjadi hal penting untuk dianalisa dalam aktor-aktor yang sedang berkonflik. Karena pada dasarnya konflik tidak akan terlepas dari *Arms* dan *Power* yang dimiliki oleh kedua Negara yang bertikai. Pemakaian metode penelitian *Historical Perspective-Research* juga menjadi hal yang penting dalam penelitian ini, diterapkannya pemahaman sejarah dari dua negara yang bertikai dapat membantu analisa dari pola dan tingkah laku aktor, karena pada dasarnya latar belakang sejarah dapat menentukan perubahan pola dan tingkah laku dari aktor. *Historical Perspective-Research* pula yang dapat membantu proses peredaan ketegangan yang terjadi diantara kedua Korea.

Dalam penelitian dan penulisan ini berhasil menghasilkan temuan-temuan penting yang dimana bahwa adanya niat dari kedua Korea untuk menjalankan proses reunifikasi dalam menciptakan perdamaian diantara keduanya. Pemahaman dan dikotomi bahwa Korea Utara merupakan negara yang selalu ingin mencari masalah (seperti yang disampaikan Amerika Serikat) tidaklah sepenuhnya benar, apa yang dilakukan Korea Utara sebenarnya adalah tindakan preventif dan defensif terhadap suasana yang tidak kondusif di Semenanjung Korea serta keadaan yang berubah dan dianggap tidak mendukung keberadaan Korea Utara sebagai sebuah negara yang mempunyai kebebasan hak dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan diterapkan dalam kebijakannya sebagai negara yang mempunyai kedaulatan. Perubahan sikap juga ditemukan pada Korea Utara yang diketahui sangat ofensif pada masa Perang Korea (1950-1953), perubahan sikap ini adalah sikap Korea Utara yang mau membuka diri dan melakukan interaksi dengan dunia politik internasional. Selain itu, kemauan kedua Korea dalam bersepakat dan mencapai tujuan bersama dalam KTT Inter-Korea merupakan hal penting untuk diketahui. Hal lain adalah cita-cita untuk bersatu merupakan pemikiran yang telah sejak tahun 1980 dicetuskan oleh mantan Presiden Korea Utara Kim Il-sung, Kim Il-sung mempunyai cita-cita dan keinginan bahwa penyatuan kedua Korea harus berdasarkan formula “Satu Bangsa, Satu Negara, Dua Sistem dan Dua Pemerintahan” dengan perwujudan sebuah negara Republik Konfederasi Demokrasi Koryo.



Penelitian dan penulisan mengenai studi kasus serta topik ini dapat dikatakan telah berhasil dilakukan, karena penelitian ini telah berhasil menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan penulis. Proses peredaan ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan merupakan proses yang benar-benar terjadi dan proses tersebut dijelaskan secara mendalam dalam penelitian ini dari mulai ulasan singkat mengenai awal terjadinya konflik dalam Perang Korea (1950-1953) hingga proses peredaan ketegangan itu sendiri dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2002. Penelitian ini berhasil menjawab hipotesa yang diungkap, yaitu bahwa ketegangan keduanya (antara Korea Utara dan Korea Selatan) yang telah berlangsung sejak 25 Juni 1950, cukup menurun drastis pada kurun waktu tersebut yang disebabkan oleh pelaksanaan KTT Inter-Korea dan implementasi hasilnya serta pelaksanaan pertandingan persahabatan sepakbola tanggal 7 September 2002.

## **5.2 Implikasi Kebijakan**

Implikasi kebijakan yang telah diambil Korea Utara dan Korea Selatan dalam menempuh proses peredaan ketegangan diantara keduanya yang telah berlangsung sejak lama merupakan hal positif untuk dijadikan contoh oleh negara lain, khususnya Indonesia. Perubahan ego diantara keduanya dalam dinamika dunia politik internasional demi mencapai kesepakatan bersama, yaitu rekonsiliasi dan reunifikasi membuat proses terhadap hal tersebut dapat dijalani keduanya. Pada dasarnya keputusan yang diambil oleh aktor-aktor dunia internasional dapat menghasilkan suatu proses dalam dinamika politik internasional. Bagi Indonesia sebagai bagian dari dunia politik internasional, sebagai salah satu negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan Korea Selatan serta sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tujuan menciptakan perdamaian di dunia diharapkan dapat memberikan dorongan untuk menciptakan perdamaian di semenanjung Korea. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif seharusnya dapat menciptakan hal positif bagi terciptanya perdamaian di dunia. Dalam hal ini Indonesia yang mempunyai hubungan cukup dekat dengan Korea Selatan dan juga mempunyai jalur berkomunikasi dengan pihak Korea Utara dapat memberikan usulan dan masukan

demikian terciptanya perdamaian di dunia, walaupun wilayah Indonesia cukup jauh dari kawasan Asia Timur. Namun pencegahan terhadap krisis yang terjadi merupakan langkah positif demi menjaga kestabilan dalam bidang ekonomi dan politik dunia Internasional, apalagi sebagian besar kekuatan ekonomi Asia terdapat di Asia Timur, yang dimana Jepang, Cina dan Korea Selatan menguasai sendi-sendinya.

Bagi Korea Utara dan Korea Selatan sendiri, implikasi kebijakan yang telah diambil dan diterapkan keduanya diharapkan dapat terus menjadi hal positif. Keinginan Korea Utara untuk melakukan rekonsiliasi dan reunifikasi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga diharapkan dapat diikuti pula oleh Korea Selatan. Aktor-aktor lain yang bermain dan mempunyai kepentingan di kawasan Semenanjung Korea diharapkan dapat memudahkan proses perdamaian diantara keduanya. Pertemuan enam negara (*Six Party Talk*) yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Jepang, Cina, Rusia, Korea Utara dan Korea Selatan juga diharapkan dapat membantu proses reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan mengakomodir keinginan Korea Utara dan Korea Selatan untuk bersatu dan menciptakan perdamaian di kawasan Semenanjung Korea tanpa mengutamakan kepentingan masing-masing aktor, karena pada dasarnya perdamaian di dunia adalah hal yang terpenting untuk dilaksanakan.

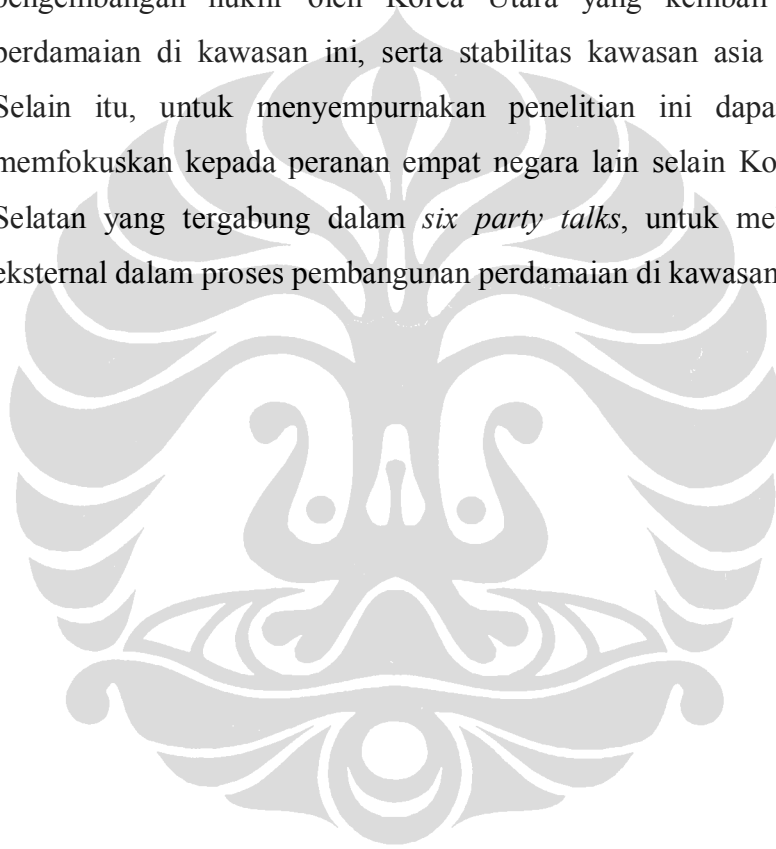
### 5.3 Implikasi Teoritis

Tesis ini membuktikan bahwa peredaan ketegangan bahkan penyelesaian konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara dapat dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivis, dimana dengan pendekatan yang memunculkan *actor, structure, shared ideas, identity, interest, dan behaviour* dalam aplikasi teoritis studi kasus ini berhasil menggambarkan proses peredaan ketegangan antara kedua aktor, yang kemudian membangun *shared ideas* antar aktor untuk menciptakan perdamaian di kawasan semenanjung Korea. Selain itu penggambaran mengenai proses peredaan ketegangan antara kedua aktor dapat menggambarkan secara jelas mengenai *identity, interest* dan *behaviour* yang terdapat pada masing-masing aktor. Akan tetapi pendekatan ini hanya dapat

menggambarkan proses terbangunnya *shared ideas* antar aktor, tanpa dapat memproyeksikan tindakan-tindakan lanjutan yang akan diambil oleh para aktor.

#### 5.4 Saran

Untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dapat dilakukan dengan menggambarkan perkembangan terkini dari proses perdamaian di kawasan semenanjung Korea, dimana pasca tahun 2002 proses perdamaian di kawasan ini kembali memanas dengan munculnya pengembangan nuklir oleh Korea Utara yang kembali mengancam proses perdamaian di kawasan ini, serta stabilitas kawasan asia timur secara umum. Selain itu, untuk menyempurnakan penelitian ini dapat dilakukan dengan memfokuskan kepada peranan empat negara lain selain Korea Utara dan Korea Selatan yang tergabung dalam *six party talks*, untuk melihat pengaruh aktor eksternal dalam proses pembangunan perdamaian di kawasan semenanjung korea.



## Daftar Pustaka

### Publikasi Lembaga

KBRI Seoul, Laporan Tahunan 1999/2000: Buku I (Laporan Inti), Seoul: KBRI Seoul, 2000.

-----, Laporan Tahunan 1999/2000: Buku II (Bidang Operasional), Seoul: KBRI Seoul, 2000.

-----, Laporan Tahunan 2000: Buku II (Bidang Operasional), Seoul: KBRI Seoul, 2000.

-----, Laporan Tahunan 2001: Buku I (Laporan Inti), Seoul: KBRI Seoul, 2001.

-----, Laporan Tahunan 2001: Buku II (Bidang Operasional), Seoul: KBRI Seoul, 2001.

KBRI Pyongyang, Laporan Tahunan 1999/2000: Jilid II (Operasional), Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2000.

-----, Laporan Tahunan 2000: Jilid II (Periode April-Desember), Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2000.

-----, Laporan Tahunan 2001: Jilid I (Inti), Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2001.

-----, Laporan Tahunan 2002: Buku II (Kegiatan Operasional), Pyongyang: KBRI Pyongyang, 2002.

### Buku

Bleiker, Roland, *Divided Korea: Toward a Culture of Reconciliation*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.

Burchill, Scott, Richard Devetak & Andrew Linklater et. al (eds), *Theories of International Relations*, New York: Palgrave, 1996.

Carlnaes, Walter, Thomas Risse & Beth Simmons (eds), *Handbook of International Relations*. London: Sage Publications, 2002.

Chang, Gordon G., *Nuclear Showdown: North Korea Takes on The World*, London : Hutchinson, 2007.

- Creswell, John A. (terjemahan oleh Aris Budiman), *Research Design: Qualitative and Quantitative Approachs*, Jakarta: Klik Press, 2002.
- Fierke, Karin M. & Knud Erik Jorgensen (eds), *Constructing International Relations: the Next Generation*, New York: M.E. Sharpe, 2001.
- Hawley, Samuel, *The Imjin War: Japan's Sixteenth Century Invasion of Korea and Attempt to Coquer China*, Seoul: The Royal Asiatic Society, 2005.
- Held, David & Anthony McGrew, *Understanding Globalization: Theories and Controversie*, Cambridge: Polity Press, 2005.
- Hill, Christopher. *The Changing Politics of Foreign Policy*, New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance: 1983-1984*, London: The International Institute for Strategic Studies, 1983.
- , *The Military Balance: 1999-2000*, London: The International Institute for Strategic Studies, 1999.
- Jackson, Robert & George Sorensen, *Introduction to International Relations: 3rd edition*, New York: Oxford University Press, 2006.
- Ko-cha, Yoong & Kang Choi, *South Korea Defense Posture*, Seoul: JFQ Forum, Spring, 1995.
- Korea Institute of Military History, *The Korean War*, Lincoln: University of Nebraska Press, 2000.
- Kratochwil, Friedrich & Edward D. Mansfield (eds), *International Organization: A Reader*, New York: Harper Collins College Publishers, 1994.
- Little, Richard & Michael Smith (eds), *Perspective on World Politics*, second edition, Routledge 11 New Fetter Lane, London, 2000.
- Linklater, Andrew (ed), *International Relations: Critical Concept in Political Science*, London: Routledge, 2000.
- Nainggolan, Poltak Partogi, *Konflik dan Perkembangan Kawasan Pasca-Perang Dingin*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjend DPR-RI, 2004.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* 3rd Ed, Boston: Allyn and Bacon, 1997.
- Scalapino, Robert, Seizaburo Sato & Jusuf Wanandi (ed.), *Masalah Keamanan Asia*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1990.

Stueck, William, *The Korean War: an International History*, New Jersey: Princeton University Press, 1999.

Weber, Cynthia. *International Relations Theory: A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2001.

Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*, New York: Cambridge University Press, 1999.

Hermawan, Yulius P. (ed), *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, Bandung: Parahyangan Catholic University Press-Graha Ilmu, 2007.

### **Makalah seminar, konferensi dan sejenisnya**

Guzzini, Stefano, “Constructivism and the role of Institution in International Relations”, *The Commissioned Paper for a Special Issue of the Rassegna Italiana di Sociologia*, Copenhagen,. Ed. Marco Clementi, 2003.

### **Artikel Jurnal**

Hiebert, Murray, John Larkin & Susan Lawrence, *North Korea: Consequence of Confession*, Far Eastern Economic, 31 Oktober 2002.

Hong, Kim Byong, *Korean Reunification* dalam “Proceedings of the Academy of Political Science”, Vol. 38, No. 2, “The China Challenge: American Policies in East Asia”, The Academy of Political Science, 1991.

Niksch, Larry. A, *North Korea’s Nuclear Weapons Program*, CRS Issue Brief for Congress, Congressional Research Service, 27 Agustus 2003.

Park, John S. *The Washington Quarterly*; “Inside Multilateralism: The-Six Party Talks”, Vol. 28, No. 4, Autumn 2005.

### **Situs Web**

Aftergood, Steven, *Nuclear Weapons Program-North Korea*, diunduh dari <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/index.html>, dan diakses pada tanggal 9 Juni 2008.

Associated Press (AP), *Kim Jong Il Promises Friendly Inter-Korean Soccer Match*, 17 May 2002. Diunduh dari <http://www.ap.org> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

Asian Info.org March 1<sup>st</sup> Independence Struggle, diunduh dari [http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/history/march\\_1st\\_independence\\_struggle.htm](http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/history/march_1st_independence_struggle.htm) diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

CNN.com Asia, *Koreas Unite for Soccer Match*, September 7, 2002 Posted: 10:34 AM EDT (1434 GMT). Diunduh dari <http://www.cnn.com/asia> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

European-Korea Foundation, *EKF*, diunduh dari <http://www.ekf.or.kr> dan diakses pada tanggal 9 Juni 2008.

Gluck, Caroline, BBC Seoul correspondent in BBC News world edition (Asia-Pacific news world page), *High Emotions in Korea Football Stand*, Saturday, 7 September 2002, 21:18 GMT 22:18 UK. Diunduh dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2242612.stm> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

*Half Century History of the ROK Navy.*

Diunduh dari <http://www.navy.go.kr/english/history/half.jsp> Republic of Korea Navy\_official website. Diakses pada tanggal 6 Juni 2009.

KBS World Radio, *Arirang Lagu Rakyat Korea*, diunduh dari [http://rki.kbs.co.kr/indonesian/enter/music\\_concert\\_detail.htm?No=2620](http://rki.kbs.co.kr/indonesian/enter/music_concert_detail.htm?No=2620) diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

KCNA DPRK correspondent, *Football Match for reunification takes place in Seoul*, Seoul, 7 September 2002. KCNA (*Korean Center News Agency*) DPRK. Diunduh dari <http://www.kcna.co.jp> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

Korea Herald, *The Military Balance*, 3 Februari 1984. Diunduh dari <http://www.koreaherald.co.kr/archives> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

Korea Times, *DPRK Aims World Cup Matches*, 3 June 2002. Diunduh dari <http://www.cankor.ca/issues/86.htm> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

Kompas, Senin, 12 Mei 2003, *Korea Utara antara Diplomasi dan Perang*. Diunduh dari <http://www.kompas.com> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2008.

Media Indonesia, 7 September 2002, *Tim Korea Utara Menahan Korea Selatan 0-0*. Diunduh dari <http://www.mediaindonesia.com> dan diakses pada tanggal 15 September 2008.

*Park Chun Hee's Daughter Goes to North; Kim Jong-il Meets Ms. Park*, May 11<sup>th</sup> 2002. Diunduh dari [http://www1.korea\\_np.co.jp/pk/180th\\_issue/2002052501.htm](http://www1.korea_np.co.jp/pk/180th_issue/2002052501.htm) dan diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

Suara Merdeka, 16 Juni 2005, *Lima Tahun Berlalu, Prospek Reunifikasi Korea Makin Samar*. [http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/16/x\\_int.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/16/x_int.htm) dan diakses pada tanggal 15 September 2008.

The Official Webpage of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), *Korea Juche*, diunduh dari <http://www.korea-dpr.com/koreajuche.htm> dan diakses pada tanggal 6 Juni 2009.

The Russo-Japanese War Sosial Research. *The Russo-Japanese War*, diunduh dari <http://www.russojapanesewar.com/phila-1.html> dan diakses pada tanggal 6 Juni 2009.

Trueman, Chris, *The United Nations and the Korean War*, diunduh dari [http://www.historylearningsite.co.uk/united\\_nations\\_korean\\_war.htm](http://www.historylearningsite.co.uk/united_nations_korean_war.htm) diakses - pada tanggal 9 Juni 2009.

### **Media Cetak**

Suara Karya, *Sepakbola Sebagai Elemen Soft-Power*. 7 Agustus 2002.

The People's Korea, *North and South Korea Unite as One in Inter-Korean Soccer Match*, No. 1.919. September 14<sup>th</sup> 2002.



## LAMPIRAN A

## Peta Semenanjung Korea



Sumber: Korean Peninsula Map, diunduh dari [www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/koreanpn.htm](http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/koreanpn.htm) diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

## LAMPIRAN B

## Peta Alur Serangan Pertama Korea Utara terhadap wilayah Korea Selatan



Sumber: William Stueck, *The Korean War : an International History*, New Jersey : Princeton University Press, 1999, h. 49.